PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2023

RENCANA PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL KOTA TANGERANG

Laporan Akhir

PT. MAJARI MITRA KONSULTAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, maka Kami dapat menyusun **Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang** sebagai bagian laporan pada tahapan akhir pelaporan dari serangkaian proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan **Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang** pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun Anggaran 2023.

Pada prinsipnya, Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang ini menyajikan tentang : Pendahuluan; Pendekatan Teori Konsep dan Metode Penyusunan; Permasalahan Dan Tantangan; Visi Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Roadmap; dan Penutup.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap semoga Laporan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang ini bermanfaat bagi Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Tangerang, 2023

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB. 1 PENDAHULUAN 1-1
1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1-5
1.3 REFERENSI HUKUM 1-6
1.4 STANDAR TEKNIS 1-9
1.5 RUANG LINGKUP 1-13
1.5.1 Lingkup Wilayah 1-13
1.5.2 Lingkup Kegiatan 1-13
1.5.3 Lingkup Materi 1-16
1.6 KELUARAN 1-17
1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN 1-17
BAB. 2 PENDEKATAN TEORI, KONSEP DAN METODE PENYUSUNAN 2-1
2.1 PENDEKATAN TEORI 2-1
2.1.1 Data, Statistik Dan Informasi 2-1
2.1.2 Kebutuhan Data Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Daerah 2-24
2.1.3 Statistik dan Pembangunan Daerah 2-28
2.2 KONSEP PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL 2-32
2.3 EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2-40
2.4 PENDEKATAN METODE 2-45
2.5 METODOLOGI 2-61

2.5.1 Pengumpulan Data 2-61
2.5.2 Metode Analisis..... 2-62
1. Analisis Statistik..... 2-62
2. Analisis Kebijakan 2-66
2.5.3 Proses Analisis 2-69
BAB. 3 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN..... 3-1
BAB. 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 4-1
4.1 VISI..... 4-1
4.2 Misi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang ... 4-4
4.3 Tujuan Dan Sasaran..... 4-9
BAB. 5 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL 5-1
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 5-1
5.2 ROADMAP RENCANA PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL KOTA TANGERANG..... 5-5
BAB. 6 PENUTUP..... 6-1
6.1 KESIMPULAN..... 6-1
6.2 REKOMENDASI 6-18

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah	2-27
Tabel 2-2	Matriks Kerangka kerja Logis	2-71
Tabel 3-1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 dan Target Nilai Tahun 2024 Pemerintah Kota Tangerang	3-2
Tabel 3-2	Domain Penyelenggaraan, Aspek, Indikator Aspek Statistik Sektoral, Potensi, Permasalahan dan Tantangan	3-5
Tabel 4-1	Perumusan Visi	4-3
Tabel 4-2	Penjelasan Visi Perencanaan Statistik Sektoral Kota Tangerang	4-3
Tabel 4-3	Keterkaitan dari Domaiin,Aspek, Indikator Aspek Statistik Sektoral dengan misi	4-4
Tabel 4-4	Misi, Tujuan Dan Sasaran	4-9
Tabel 5-1	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	5-2
Tabel 5-2	Roadmap Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang Tahun 2024-2028	5-6
Tabel 6-1	Hubungan Domain, Aspek dan Indikator Dengan Arah Kebijakan	6-2
Tabel 6-2	Arah Kebijakan dan Pekerjaan yang Direncanakan	6-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Landasan Peraturan Untuk Upaya Pembangunan Statistik Sektoral Berkualitas 1-2
Gambar 1.2 Latar Belakang Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang 1-5
Gambar 2.1 Ketersediaan Data dalam Siklus Perencanaan 2-30
Gambar 2.2 Kebutuhan Data Berkualitas 2-32
Gambar 2.3 Tata Kelola Statistik Di Tingkat Daerah..... 2-33
Gambar 2.4 Model Proses Bisnis Statistik 2-34
Gambar 2.5 Proses Bisnis Statistik..... 2-36
Gambar 2.6 High Level Architecture 2-37
Gambar 2.7 Pemanfaatan Instrumen Penjaminan Kualitas 2-40
Gambar 2.8 Komponen Penyusun Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2-44
Gambar 2.9 Predikat Nilai Indeks Pembangunan Statistik..... 2-44
Gambar 2.10 Keterlibatan Pelaku Pembangunan Dalam Proses Perencanaan... 2-49
Gambar 2.11 Aspek Pada Konsep Pembangunan Berkelanjutan 2-56
Gambar 2.12 Analisa Kebijakan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral..... 2-68
Gambar 2.13 Kerangka Kerja Logis Dalam Perencanaan 2-71
Gambar 2.14 Logika Vertikal dan Horizontal 2-73

BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Landasan hukum terkait Kebutuhan akan data dan Informasi dalam perencanaan pembangunan didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Amanah tersebut dengan jelas mensiratkan Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan didasarkan dengan fakta yang objektif dan memperoleh interpretasi tentang fakta tersebut sehingga perencanaan pembangunan dapat dengan tepat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan target yang jelas dan pada akhirnya program dan kegiatan yang dibuat dapat menjawab capaian yang diharapkan.

Selanjutnya secara teknis agar data dan informasi dapat dengan mudah diperoleh dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam satu perenencanaan pembangunan maka data tersebut haruslah sudah tersedia dalam satu sistem informasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 274 yang berbunyi “Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah” berkaitan dengan penjelasan pasal 274 maka pasal 391 lebih memperkuat tingkat pentingnya ketersediaan informasi pemerintah daerah dimana pasal 391 tersebut berbunyi “Pemerintah Daerah Wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi”.

Lebih teknis lagi perlunya data dan Informasi yang tersedia dalam suatu sistem pengelolaan data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dipertegas melalui permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah pasal 144 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Gambar 1.1 Landasan Peraturan Untuk Upaya Pembangunan Statistik Sektoral Berkualitas

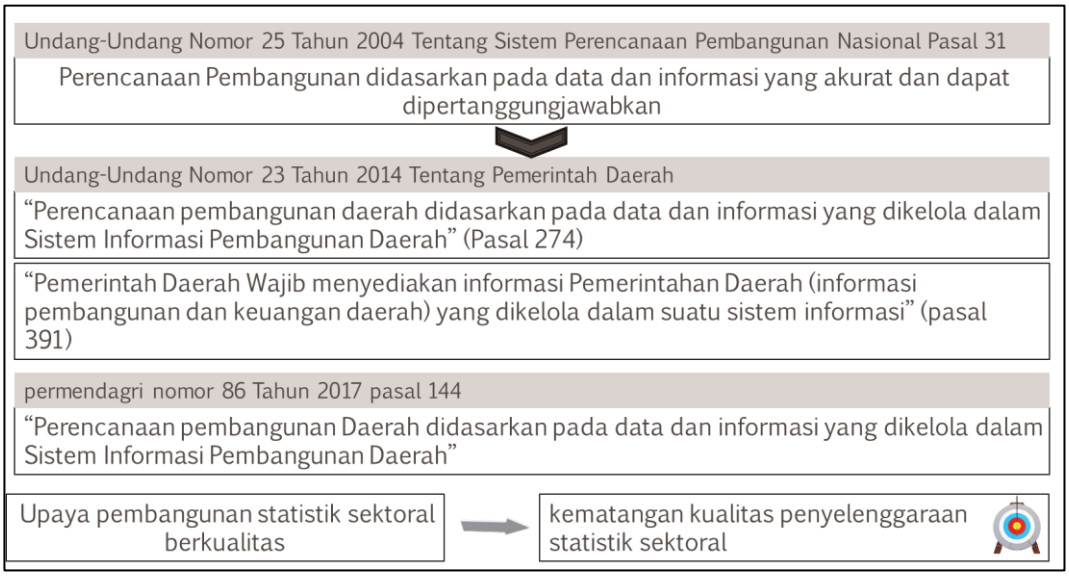

Untuk menjawab amanah dari peraturan perundangan tersebut diatas bahwa penyelenggaraan data yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan maka dibutuhkan pengaturan satu data yang mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan dengan tegas dinyatakan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Pasal 2: "Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.

BAB 1. Pendahuluan

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Data yang berkualitas berperan penting dalam mewujudkan tujuan utama pembangunan Daerah sebagaimana tergambar pada uraian berikut:

1. Perencanaan yang berkualitas

   Data yang berkualitas sebagai dasar informasi dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan

   Perencanaan yang berkualitas didukung oleh:

   a. Penyediaan data dan informasi yang baik
   b. Analisis data dan informasi yang tepat
   c. Perumusan permasalahan yang tepat
   d. Perumusan strategi dan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan

2. Pelaksanaan sesuai dengan rencana

   Dengan adanya data dan informasi yang berkualitas memudahkan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan dengan baik.

   Data yang berkualitas sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

3. Pembangunan daerah yang berkualitas

   Dengan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan sesuai dengan rencana menghasilkan pembangunan daerah yang berkualitas

4. Evaluasi Pembangunan yang Berkualitas

   Sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak dari pencapaian pembangunan, data yang berkualitas menjadikan evaluasi pembangunan berkualitas.

5. Pemenuhan tujuan pembangunan Daerah dengan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Data yang berkualitas sebagai panduan dalam penentuan batasan-batasan untuk menjamin ketercapaian pembangunan.

Data yang berkualitas, perencanaan berkualitas, pelaksanaan sesuai dengan rencana, pembangunan daerah yang berkualitas serta evaluasi pembangunan yang berkualitas pada akhirnya berdampak pada pemenuhan tujuan pembangunan daerah.

Untuk mendukung dan penguatan kebijakan diatas, perlu adanya pembangunan statistik sektoral di Pemerintah Kota Tangerang dengan strategi antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral
2. Pengembangan Kapabilitas Statistik Sektoral
3. Peningkatan Kapasitas Statistik Sektoral

Upaya pembangunan sektoral berkualitas Kota Tangerang diharapkan meningkatkan indeks pembangunan statistik yang merupakan ukuran menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Dari landasan peraturan perundangan yang telah disampaikan diatas maka berpijak pada kondisi tersebut pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika berinisiatif dan memandang perlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang. Rencana Pembangunan Statistik Sektoral tersebut diharapkan dapat meningkatkan kematangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral yang ditunjukan dengan peningkatan indeks pembangunan statistik.

Berdasarkan harapan tersebut dengan memperhatikan karakteristik persoalan statistik di Kota Tangerang dengan mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan daerah maka Rencana Pembangunan Statistik Kota Tangerang menjadi solusi penanganan persoalan statistik Kota Tangerang yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

Gambar 1.2 Latar Belakang Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

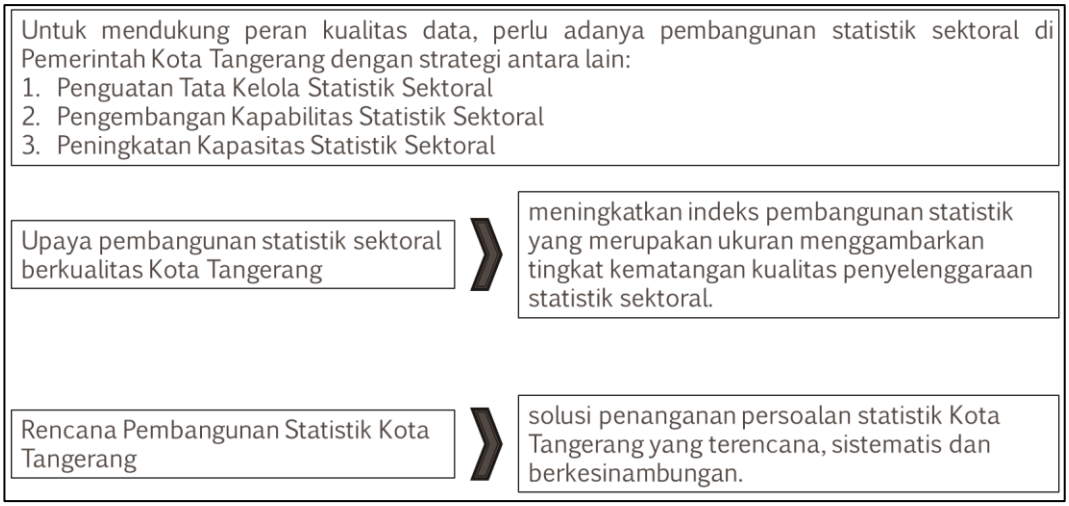

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Kota Tangerang adalah diperolehnya dokumen Pembangunan Statistik sektoral agar pembangunan statistik sektoral tersebut terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor yang dapat meningkatkan kematangan kualitas penyelenggaaran Statistik Sektoral di Kota Tangerang.

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Kota Tangerang adalah diperolehnya dokumen Pembangunan Statistik sektoral agar pembangunan statistik sektoral tersebut terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor yang dapat meningkatkan kematangan kualitas penyelenggaaran Statistik Sektoral di Kota Tangerang.

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Kota Tangerang adalah merumuskan perencanaan pembangunan yang befungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan statistik Kota Tangerang. Tujuan tersebut dilakukan dengan capaian strategis antara lain:

1. Isu Strategis Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
    a. Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral

   b. Pengembangan Kapabilitas Statistik Sektoral
   c. Peningkatan Kapabilitas Statistik
2. Menyusun Visi, misi bedasarkan isu strategis statistik sektoral Kota Tangerang
3. Menyusun Arah kebijakan pembangunan Statistik.
4. Roadmap Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang (Tujuan, Sasaran dan target).

Sedangkan Sasaran Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang adalah dokumen rencana yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan statistik sektoral Kota Tangerang.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang adalah sebagai berikut ;

1. Diperolehnya Isu Strategis Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang terkait dengan:
   a. Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral
   b. Pengembangan Kapabilitas Statistik Sektoral
   c. Peningkatan Kapabilitas Statistik
2. Tersusunnya Visi, misi bedasarkan isu strategis statistik sektoral Kota Tangerang
3. Tersusunnya Arah kebijakan pembangunan Statistik.
4. Tersusunnya Roadmap Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang (Tujuan, Sasaran dan target)

1.3 REFERENSI HUKUM

Referensi Hukum merupakan peraturan perundanganan yang menjadi acuan dari pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang antara lain::

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Stastistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 126 Tahun 2020 Tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020 ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dn Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.12.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dn Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
16. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 22);
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Satu Data Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26).

1.4 STANDAR TEKNIS

Standar teknis yang dimaksud adalah acuan, pedoman serta metode yang digunakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan teknis perkerjaan antara lain:

1. Kriteria Standar Umum;
    a. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral

        Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral memberikan pemahaman terkait kondisi kematangan penyelenggaraan statistik sektoral kota tangerang agar dapat diperoleh upaya mencapai target goal kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dengan strategi antara lain:

        1.) Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja
        2.) Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
        3.) Proses penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan secara terpadu dan berkontribusi pada kinerja organisasi
        4.) Peningkatan kualitas secara berkesinambungan

b. Penerapan prinsip data.

Penerapan prinsip data statistik sektoral memberikan pemahaman terkait kondisi penerapan prinsip data penyelenggaraan statistik sektoral kota tangerang agar dapat diperoleh upaya mencapai target goal penerapan prinsip data statistik sektoral dengan strategi peningkatan standar data statistik di Kota Tangerang dengan strategi antara lain:

1.) Standar Data Statistik

Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

2.) Metadata Statistik

Penerapan Metadata Statistik

3.) Interoperabilitas Data

Penerapan Interoperabilitas Data

4.) Kode Refensi dan/atau Data Induk

Penerapan Kode Referensi

c. Peningkatan kualitas data

Peningkatan Kualitas data statistik sektoral memberikan pemahaman terkait kondisi kualitas data penyelenggaraan statistik sektoral kota tangerang agar dapat diperoleh upaya mencapai target goal peningkatan kualitas data statistik sektoral

d. Proses Bisnis yang Tepat

Proses bisnis yang tepat dalam peningkatan data statistik sektoral memberikan pemahaman terkait kondisi penyelenggaraan statistik sektoral kota tangerang agar dapat diperoleh upaya mencapai target goal proses bisnis data statistik sektoral dengan strategi antara lain:

1.) Perencanaan Data

Pendifinisian kebutuhan statistik

Desain Statistik

Penyiapan Instrumen Statistik

2.) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data/akuisisi data

3.) Pemeriksaan Data

Pengolahan data

Analisa data

4.) Penyebarluasan Data

Desiminasi data

e. Peningkatan Kelembagaan

Peningkatan kelembagaan dalam peningkatan data statistik sektoral memberikan pemahaman terkait kondisi penyelenggaraan statistik sektoral kota tangerang agar dapat diperoleh upaya mencapai target goal peningkatan kelembagaan data statistik sektoral dengan strategi antara lain:

1.) Profesionalitas

Penjaminan transparansi informasi statistik

Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Penjaminan Kuallitas data

Upaya penjaminan konfidensialitas data

2.) SDM yang memadai dan kapabel

Upaya Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik

Upaya Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik

3.) Pengorganisasian Statistik

Kolaborasi kegiatan statistik

Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik

Pelaksanaan tugas walidata

f. Pemanfaatan statistik, kolaborasi statistik lintas Kementerian, Lembaga dan Pemda

Pemanfaatan statistik, kolaborasi statistik lintas Kementerian, Lembaga dan Pemda memberikan pemahaman terkait kondisi kualitas data penyelenggaraan statistik sektoral kota tangerang agar dapat diperoleh

upaya mencapai target goal peningkatan Pemanfaatan statistik, kolaborasi statistik lintas Kementerian, Lembaga dan Pemda data statistik sektoral

g. Penguatan Sistem Statistik Nasional berkelanjutan

Penguatan Sistem Statistik Nasional berkelanjutan memberikan pemahaman terkait kondisi kualitas data penyelenggaraan statistik sektoral kota tangerang agar dapat diperoleh upaya mencapai target goal Penguatan Sistem Statistik Nasional berkelanjutan data statistik sektoral dengan strategi antara lain:

1.) Pemanfaatan Data Statistik

Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

2.) Pengelolaan Kegiatan Statistik

Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

3.) Penguatan SSN Berkelanjutan

Perencanaan Pembangunan Statistik

Penyebarluasan Data

Pemanfaatan Big Data

2. Kriteria standar teknis

a. Substansi Materi antara lain:

1.) Tata kelola statistik tingkat daerah

2.) Kapabilitas statistik

3.) Kapasitas statistik

4.) Standar Data Statistik

b. Perumusan Rencana Pembangunan Statistik Kota Tangerang

Tahapan pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang :

1. Penyusunan Laporan Pendahuluan, meliputi tahapan sebagai berikut:
   a. Persiapan awal dan penyusunan rencana kerja
   b. Kajian (studi) awal literatur dan kebijakan
   c. Perancangan Draft Instrumen Survey
   d. Perumusan Konsep Pola dan Mekanisme Penyajian Materi
   e. Penyusunan Draft Laporan Awal
   f. Pembahasan Draft Laporan Awal
   g. Perbaikan Draft Laporan Awal
   h. Pengumpulan Laporan Awal
2. Pengolahan Data Dan Informasi
   a. Pengumpulan dan Pengolahan Data
   b. Perekaman data visual lapangan
   c. Kompilasi data, Analisis data
3. Penyusunan Laporan Akhir, meliputi tahapan sebagai berikut:
   a. Penyusunan Draft Laporan Akhir
   b. Pembahasan Draft Laporan Akhir
   c. Perbaikan Draft Laporan Akhir
   d. Pengumpulan Laporan Akhir

1.5 RUANG LINGKUP

1.5.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang yaitu Wilayah Administrasi Kota Tangerang.

1.5.2 Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang adalah sebagai berikut

A Tahap Persiapan Dan Rumusan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan persiapan meliputi hal-hal yang harus disiapkan dalam pekerjaan perencanaan, baik tenaga ahli dan pendukung yang sebelumnya sudah ditunjuk agar melakukan survey awal sesuai metode yang telah ditentukan. Dalam hal ini tidak terlepas dari mobilitas dan peralatan yang menunjang harus sudah dalam kondisi siap digunakan.

Tahap persiapan yang dilakukan oleh Konsultan antara lain:

1. Persiapan Awal

   Kegiatan ini merupakan langkah awal setelah SPMK ditandatangan oleh pengguna anggaran. Pada tahap ini, program kerja yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa konsultansi adalah sebagai berikut:

   a. Melakukan koordinasi dengan Tim teknis terkait dengan rencana dan output yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam kerangka acuan kerja.
   b. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tangerang sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi serta arahan terkait dengan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
   c. Mobilisasi tim pelaksana pekerjaan (team leader, tenaga ahli dan tenaga pendukung)
   d. Studi Literatur dan Kebijakan

      Tenaga ahli melakukan desk study, guna meningkatkan pemahaman mengenai substansi pekerjaan, khususnya mengkaji peraturan perundangan (di tingkat pusat dan daerah) yang berkaitan dengan statistik sektoral di Kota Tangerang. Sejalan dengan studi literatur dan kebijakan, maka dilakukan pula pembahasan internal (brainstorming)

      Sebelum berpijak pada proses kegiatan kajian lapangan, seluruh tenaga ahli melakukan kajian literatur yang terkait dengan pekerjaan. Kajian ini ditujukan untuk memantapkan pemahaman dan wawasan Tenaga Ahli,

serta mereview kembali perkembangan terbaru yang akan dijadikan rujukan dalam penyusunan.

2. Perumusan Metodologi dan Rencana Kerja

   Pada kegiatan ini, Team Leader bersama seluruh tenaga ahli akan merumuskan dan memantapkan kembali metodologi pelaksanaan pekerjaan, serta merumuskan rencana kerja yang menekankan pada langkah-langkah, waktu, penugasan dan produk yang dihasilkan pada setiap langkah yang ditempuh.

3. Penyusunan Rencana Kerja

   Perumusan rencana kerja ini dilakukan dengan pembahasan kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan guna mendapatkan kesepemahaman dan arahan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh, pendistribusian tugas, dan brainstorming terkait dengan teknis dan materi pekerjaan mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait substansi materi pekerjaan.

   Pada tahapan ini, Team Leader bersama seluruh tenaga ahli akan merumuskan dan memantapkan kembali metodologi pelaksanaan pekerjaan, serta merumuskan rencana kerja yang menekankan pada langkah-langkah, waktu, penugasan dan produk yang dihasilkan pada setiap langkah yang ditempuh.

B Analisa Perencanaan

1. Pengumpulan Data dan Informasi

   Pengumpulan Data dan Informasi dilakukan untuk kebutuhan bahan analisa. Data dan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan pendataan kebutuhan data yang telah dilakukan

2. Analisa Data dan Informasi

   Analisa pada pembangunan statistik sektoral berdasarkan Aspek yang merupakan Domain penilaian Pembangunan Statistik.

C Laporan

Laporan terdiri dari dua laporan dimana laporan awal merupakan laporan yang berisikan latar belakang, maksud tujuan sasaran referensi hukum yang termaktub

dalam pendahuluan, Tinjauan teori, Permasalahan Dan Tantangan, metodologi dan rencana kerja.

Laporan akhir merupakan laporan yang menyajikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang sesuai dengan outline yang telah disepakati.

1.5.3 Lingkup Materi

Lingkup materi Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. penyusunan kerangka kerja logis (kerangka pikir) dan jadwal rencana kerja.
   Kerangka kerja logis disusun guna kebutuhan untuk penyusunan rencana pembangunan statistik sektoral Kota Tangerang yang dapat memunculkan konsep yang berkaitan.
2. Penyusunan sistematika Dokumen Perencanaan Statistik Sektoral.
   Sistematika dokumen perencanaan statistik sektoral dibangun untuk dapat menuangkan konsep yang saling berkaitan pada kerangka kerja logis secara runtun dalam bentuk Bab.
3. Indentifikasi Isu Strategis Statistik Sektoral Kota Tangerang.
   Identifikasi isu strategis merupakan proses yang penting untuk menentukan rencana pembangunan statistik sektoral Kota Tangerang.
   Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
4. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan dan Roadmap Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.
   Wujud dari rencana pembangunan statistik Sektoral Kota Tangerang adalah dengan adanya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi, arah kebijakan dan Roadmap Pembangunan Statistik Sektoral.

1.6 KELUARAN

Keluaran merupakan Output berupa Dokumen Rencana Pembangunan Statistik Kota Tangerang / menigkatkan kematangan kualitas penyelenggaaran Statistik Sektoral di Kota Tangerang. Dokumen yang menjadi Output pekerjaan antara lain:

1. Laporan Pendahuluan

   Merupakan dokumen yang berisikan latarbelakang pekerjaan rencana pembangunan statistik sektoral Kota Serang, tinjauan teori, pendekatan dan metode penyusunan serta rencana kerja.

2. Laporan Akhir

   Merupakan dokumen yang berisikan outline yang disepakati pada laporan pendahuluan yang mengandung:

   a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
   b. Strategi, arah kebijakan dan
   c. Roadmap Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan terdiri dari dua sistematika yaitu sistematika Laporan Awal dan Sistematika Laporan Akhir.

Sistematika penyajian Laporan Awal Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada prinsipnya bab ini menguraikan penjelasan terkait dilakukannya penyusunan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang. Pendahuluan ini setidaknya memberikan penjelasan terkait:

1. Latar Belakang perlunya dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

2. Maksud, tujuan dan sasaran disusunya dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
3. Referensi Hukum dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
4. Standar Teknis Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
5. Ruang lingkup dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
6. Keluaran dan manfaat dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
7. Sistematika penyajian dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

BAB II PENDEKATAN TEORI

Pada prinsipnya bab ini menguraikan tentang kerangka teori terkait dengan Penyusunan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

BAB III PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Pada prinsipnya bab ini menguraikan menguraikan permasalahan, kondisi yang diharapkan dan Tantangan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

BAB IV METODOLOGI

Pada prinsipnya bab ini menguraikan tentang pendekatan, Metodologi yang dimana terdapat kerangka pemikiran, metode penyusunan dan metode analisis dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

BAB V RENCANA KERJA

Pada prinsipnya bab ini menguraikan tentang:

1. Rencana program kerja dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.
2. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.
3. Organisasi Pelaksana Pekerjaan pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

Sistematika penyajian Laporan Akhir berupa **Laporan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang** adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada prinsipnya bab ini menguraikan penjelasan terkait dilakukannya penyusunan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang. Pendahuluan ini setidaknya memberikan penjelasan terkait:

1. Latar Belakang perlunya dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
2. Maksud, tujuan dan sasaran disusunya dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
3. Referensi Hukum dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
4. Standar Teknis Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
5. Ruang lingkup dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
6. Keluaran dan manfaat dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang
7. Sistematika penyajian dokumen Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

BAB II PENDEKATAN TEORI, KONSEP DAN METODE PENYUSUNAN

Pada prinsipnya bab ini menguraikan tentang kerangka teori, Konsep dan Metode terkait dengan Penyusunan Pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

BAB III PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Pada prinsipnya bab ini menguraikan menguraikan permasalahan, kondisi yang diharapkan dan Tantangan Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada prinsipnya bab ini menguraikan tentang Visi Pembangunan Statistik Sektoral, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan Visi Pembangunan Statistik Sektoral.

BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL

Pada prinsipnya bab ini menguraikan tentang Strategi yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan, arah kebijakan yang merupakan penjabaran strategi untuk menyelesaikan masalah dengan kebijakan yang akurat dan tepat serta roadmap tahapan pekerjaan untuk mencapai target sasaran yang akan dicapai.

BAB VI PENUTUP

Pada prinsipnya bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil pengolahan pekerjaan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang dan Rekomendasi.

BAB. 2 PENDEKATAN TEORI, KONSEP DAN METODE PENYUSUNAN

2.1 PENDEKATAN TEORI

2.1.1 Data, Statistik Dan Informasi

A Data

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, data berarti sekumpulan keterangan yang benar atau nyata. Keterangan tersebut bisa berupa angka, huruf, simbol ataupun gambar. Demikian juga dalam kamus wikipedia, data disebutkan sebagai catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Dari sudut pandang bisnis, data bisnis adalah deskripsi organisasi tentang sesuatu (resources) dan kejadian (transactions) yang terjadi. Pengertian yang lain menyebutkan bahwa data adalah deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapi. Kata data bisa berarti juga fakta mentah dan tidak terukur, yang bila diolah akan menjadi suatu informasi. Atau dengan kata lain tujuan mendasar dari pengumpulan dan pengolahan data adalah untuk menghasilkan informasi. Meskipun data merupakan bahan utama informasi, namun perlu diingat tidak semua data relevan dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi.

Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu.

BAB 2. Pendekatan Teori, Konsep dan Metode Peunyusunan

Data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam nyata, data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu.

Sebagian besar orang awam sering memiliki pengertian yang agak rancu terhadap data dan informasi. Sering terjadi pengertian data digunakan untuk menyebut informasi. Demikian pula sebaliknya.

Jenis-jenis data dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, waktu pengumpulannya dan skala datanya sebagai berikut.

1. Menurut sifatnya

   Berdasarkan sifatnya, data dapat dibedakan menjadi:

   a. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, misalnya: Kuesioner Pertanyaan tentang suasana kerja, kualitas pelayanan sebuah rumah sakit atau gaya kepemimpinan, dll.
   b. Data Kuantitatif, data yang berbentuk angka, misalnya: harga saham, besarnya pendapatan, dll

2. Menurut waktu pengumpulannya

   Data dapat dikumpulkan pada beberapa waktu yang berbeda, maka data berdasarkan waktu pengumpulannya dapat dibedakan sebagai:

   a. Data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (at a point of time) untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya; data penelitian yang menggunakan kuesioner.
   b. Data berkala (time series data), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian/ kegiatan selama periode tersebut. Misalnya, perkembangan uang beredar, harga 9 macam bahan pokok penduduk.

3. Menurut cara memperolehnya

   Menurut cara memperolehnya, data terdiri dari:

a. Data Primer (primary data): data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.
b. Data Sekunder (secondary data): data sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

4. Menurut sumbernya data

   Bila dilihat dari sudut pandang suatu organisasi, menurut sumbernya data dibedakan menjadi:

   a. Data Internal: data intenal adalah data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya: suatu perusahaan, jumlah karyawannya, jumlah modalnya, atau jumlah produksinya, dll.
   b. Data Eksternal: data eksternal adalah data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Misalnya: daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan suatu perusahaan

5. Menurut skala data

   Bila dilihat dari skala data, maka jenis-jenis data dapat terbagi antara lain:

   a. Data Nominal: data yang diperoleh dengan cara katagorisasi atau klasifikasi.

      Data Nominal tidak dapat dilakukan operasi matamatika (X, +, - atau :). Misalnya, jenis pekerjaan diklasifikasikan dalam pegawai negeri (kode 1) , pegawai swsta (kode 2) dan wiraswata (kode 3). Dari contoh itu, tidak mungkin 3-2=1 (wiraswasta –pegawai negeri = pegewai swasta).

      Data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin dapat digolongkan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Barang yang cacat bisa diberi angka 0 dan yang tidak cacat diberi angka 1. Data 1 tidaklah berarti

mempunyai arti lebih besar dari 0. Data satu hanyalah menyatakan lambang untuk barang yang tidak cacat.

Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya di antara ke empat skala pengukuran yang lain. Seperti namanya, skala ini membedakan satu obyek dengan obyek lainnya berdasarkan lambang yang diberikan. Ciri data yang dihasilkan adalah posisi data setara (pegawai negeri tidak lebih tinggi dari wiraswasta meskipun angka tandanya berbeda).

Bilangan dalam Skala Nominal berfungsi hanya sebagai lambang untuk membedakan, terhadap bilangan-bilangan tersebut tidak berlaku hukum aritmetika, tidak boleh menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, maupun membagi. dan adalah hubungan sama dengan dan tidak sama dengan. Statistik yang sesuai dengan data berskala Nominal adalah Statistik Nonparametrik. Contoh perhitungan statistik yang cocok adalah Modus, Frekuensi dan Koefisien Kontingensi.

b. Data Ordinal: data yang diperoleh dengan cara katagorissi atau klasifikasi, tetapi diantara data tersebut terdapat hubungan. Data Ordinal juga tidak bisa dilakukan operasi matamatika.

   Misalnya, kepuasan pelanggan, diklasifikasikan sebagai: sangat puas (diberi tanda 1), Puas (diberi tanda 2), Cukup puas (diberi tanda 3), Tidak puas(diberi tanda 4), dan Sangat tidak puas (diberi tanda 5). Posisi 1 lebih tinggi dibanding posisi 2, Tidak mungkin 1+2=3 (yang berarti sangat puas ditambah puas = cukup puas.

   Skala pengukuran ordinal mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari skala pengukuran nominal. Dalam skala ini, terdapat sifat skala nominal, yaitu membedakan data dalam berbagai kelompok menurut lambang, ditambah dengan sifat lain yaitu, bahwa satu kelompok yang terbentuk mempunyai pengertian lebih (lebih tinggi, lebih besar,…) dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, dengan skala ordinal data atau obyek memungkinkan untuk diurutkan atau dirangking. Ciri data yang dihasilkan nominal adalah posisi data tidak setara.

c. Data Interval: data yang diperoleh dengan cara pengukuran, dimana jarak antar dua titik pada skala, sudah diketahui. Berbeda dengan skala ordinal, dimana jarak dua titik tidak diperhatikan (seperti berapa jarak antara puas dan tidak puas, yang sebenarnya menyangkut perasaan orang saja).

   Skala pengukuran Interval adalah skala yang mempunyai semua sifat yang dipunyai oleh skala pengukuran nominal, dan ordinal ditambah dengan satu sifat tambahan. Dalam skala interval, selain data dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat dirangking, perbedaan (jarak/interval) antara data yang satu dengan data yang lainnya dapat diukur.

   Misalnya, temperatur ruangan. Bisa diukur dalam Celsius, atau Fahrenheit, dengan masing-masing punya skala sendiri. Untuk air membeku dan mendidih: Celcius pada 0° C sampai 100° C. Sakala ini jelas jaraknya, bahwa 100-0=100. Fahreinheit pada 32° F sampai 212°F. Skala ini jelas jaraknya, 212-32=180.

   Bilangan pada skala interval fungsinya ada tiga yaitu :

   1.) Sebagai lambang untukmembedakan
   2.) Untuk mengurutkan peringkat, misal, makin besar bilangannya, peringkat makin tinggi (> atau <).
   3.) Bisa memperlihatkan jarak/perbedaan antara data obyek yang satu dengan data obyek yang lainnya.Titik nol bukan merupakan titik mutlak, tetapi titik yang ditentukan berdasarkan perjanjian.

d. Data Rasio: adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, dimana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, dan mempunyai titik nol yang absolut. Ini berbeda dengan skala interval, dimana tak ada titik nol mutlak/absolut. Seperti titik 0°C tentu beda dengan titik 0°F. atau pergantian tahun pada system kalender Masehi (setiap 1 Januari) berbeda dengan pergantian tahun Jawa, China dan lainnya. Sehingga tak ada tahun baru dalam artian diakui oleh semua kalender sebagai tahun baru.

   Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi peringkatnya. Semua sifat yang ada dalam skala terdahulu dipunyai oleh skala rasio. Sebagai

tambahan, dalam skala ini, rasio (perbandingan) antar satu data dengan data yang lainnya mempunyai makna.

Misalnya, jumlah buku di kelas: Jika 5, berarti ada 5 buku. Jika 0, berarti taka da buku (absolut 0). Tidak ada kategorisasi atau pemberian kode. Bisa dilakukan operasi matematika. Missal: 100 cm + 35 cm = 135 cm; 5 mangga + 2 mangga = 7 mangga.

B Statistik

Kata statistik sering menimbulkan bayangan akan angka dalam tabel atau grafik-grafik. Kata statistik berasal dari bahasa latin ”status” yang dalam bahasa inggris berarti ”state” yang diartikan dalam bahasa indonesia sebagai ”pernyataan” (Johnson and Bhattacharya, 2007). Memang dalam pengertian awam statistik bersinonim dengan data, dimana dalam bahasa inggris disebut dengan statistic. Statistik dalam hal ini juga biasa dikenal dengan informasi, karena telah melalui proses pengolahan, analisis dan penyajian yang tepat dan menjadi bermakna.

Statistik juga berarti nama suatu ilmu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan data, yang kalau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah statistics. Dalam modul ini selanjutnya kata statistik diartikan sebagai produk kegiatan statistik, khususnya pengumpulan, pengolahan data, meringkas dan menginterpretasikan sampai pada pengambilan keputusan (Johnson and Bhattacharya, 2007). Apakah suatu statistik sudah berupa informasi? Jawabanya bisa subyektif, tergantung kebutuhan khusus pengguna sendiri, karena suatu tabel statistik mungkin sudah merupakan informasi bagi A tetapi belum bagi B (sebab masih perlu diolah lagi).

Agar pengertian statistik sebagai kumpulan angka-angka, tidak mengaburkan perbedaan anatara kumpulan angka-angka dengan metode sehingga kumpulan angka tersebut “berbicara”. Dalam arti kumpulan angka tersebut disajikan dalam bentuk table/diagram, selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpula. Ini semua ternyata merupakan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika. Jadi Statistika adalah ilmu pengetahuan, murni dan terapan, mengenai penciptaan, pengembangan,

dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian inferensia induktif dapat dievaluasi. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Perbedaan dari statistic dan parameter adalah statistic merupakan sembarangan nilai yang menjelaskan nilai dari sampel. Sedangkan parameter merupakan sembarangan nilai yang menjelaskan nilai dari populasi.

Pengertian statistik dalam penyelenggaraan statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik

Statistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti: sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk table maupun diagram, penentuan rata-rata (mean), modus, median, rentang serta simpangan baku.
2. Statistik inferensial (induktif) mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum penarikan kesimpulan dilakukan suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistic deskriptif.

Sedangkan yang dimaksud dengan data statistik adalah deskripsi numerik dari aspek kuantitatif sesuatu. Namun demikian tidak semua diskripsi numerik adalah data statistik, dikatakan data statistik jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Harus dalam bentuk agregat (seperti: jumlah, rata-rata, proporsi dan persentase).
2. Perubahan karakteristik fenomena yang diteliti disebabkan oleh sejumlah kekuatan yang bekerja secara simultan. Contoh: perubahan yang terjadi pada tingkat penjualan, kualitas produk, jumlah penduduk, dsbnya.
3. Diperoleh dengan cara pencacahan/pengukuran atau diestimasi berdasarkan standar akurasi yang memadai.

4. Harus dikumpulkan secara sistematik bagi maksud/tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Fakta harus dapat dibandingkan, misalnya perbandingan antar waktu bagi fakta yang sama. Fakta (data) yang sama diperoleh dengan cara dan pengukuran yang sama pula dan hanya waktu pelaksanaan pengukuran/pencacahan yang berbeda.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik, selalu berhubungan dengan data. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. tujuan pengumpulan data adalah :

- Untuk memperoleh gambaran suatu keadaan.
- Untuk dasar pengambilan keputusan

Syarat data yang baik agar memperoleh kesimpulan tepat dan benar maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar, diantaranya:

Data harus obyektif (sesuai keadaan sebenarnya)

- Data harus mewakii(representative)
- Data harus update
- Data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, statistik banyak diterapkan dalam berbagai sektor, baik di sektor bisnis, ekonomi, pertanian, industri, maupun sosial, politik dan pertahanan/keamanan. Di sektor pemerintahan misalnya, statistik digunakan sebagai alat pengambil keputusan dalam rangka macam tujuan pembangunan, diantaranya adalah untuk mengetahui jumlah dan karakteristik penduduk yang dilakukan melalui kegiatan sensus penduduk.

Dari kegiatan statistik ini dapat diperoleh beberapa gambaran penduduk diantaranya: jumlah penduduk, tingkat pendidikan, penyebaran penduduk,

ketenagakerjaan dan karakteristik sosial budaya lainnya. Perkembangan harga (dalam bidang ekonomi) juga dapat diketahui dengan data statistik yang dikumpulkan secara sampel melalui survei, yaitu Survei Harga Konsumen yang dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan sehingga dapat menghasilkan angka inflasi.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan wilayah, maka statistik daerah sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah dan nasional, sebagai bahan pemantauan pelaksanaan pembangunan, dan selanjutnya sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Ada kata pepatah membangun itu sulit, tapi lebih sulit lagi membangun tanpa data, karena suatu perencanaan dan kebijakan tidak akan bermanfaat dan tepat sasaran kalau tidak didukung dengan adanya data yang akurat.

Dengan perkembangan ekonomi nasional dan global saat ini, data dan statistik juga dirasakan semakin penting peranannya dalam pembangunan sektor ekonomi. Sebagai contoh dengan berkembangnya bisnis asuransi dan valuta asing, maka teori probabilitas (hitung peluang) menjadi dasar pemikiran para pelaku usaha di bidang ini. Dalam sektor industri dan perdagangan, data statistik tentang besarnya kepemilikan modal dan asset perusahaan, penggunaan faktor produksi, hasil produksi dan pemasaran merupakan faktor penting untuk ditelaah demi kemajuan perkembangan bisnis atau indutri dan perdagangan yang lebih luas lagi.

Soetjipto (2007) mengatakan bahwa ada empat alasan mengapa statistik itu penting dalam dunia bisnis, yaitu pertama karena statistik digunakan sebagai catatan kegiatan usaha dan keterangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; kedua karena data statistik merupakan bagian penting dalam laporan bisnis/usahanya; ketiga karena statistik sebagai alat kontrol yang memberikan informasi kuantitatif bagi direksi dalam melakukan pengendalian operasional usaha/bisnis; dan keempat karena statistik sebagai dasar pengambilan keputusan yang telah memperhitungkan faktor resiko. Untuk pengembangan bisnis biasanya dilakukan dahulu survei pasar untuk menggali infromasi tentang pangsa pasarnya,

siapa target pembelinya, seberapa besarnya, kapan dan dimana cocok dipasarkannya. Survei yang dilakukan tentunya harus mengikuti prosedur yang benar bersarkan tehnik pengumpulan data yang tepat, diolah dengan cara yang tepat dan benar serta dianalisis sesuai kebutuhan dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik yang ada.

Penerapan ilmu statistik lainnya yang sekarang popular adalah prosedur jajak pendapat atau pooling (misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum). Sudah sering kita dengar dan baca dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sering ada pooling tentang prediksi hasil pilkada, atau bahkan untuk melihat hasilnya secara cepat dilakukan perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count dari para calon kepala daerah.

Dengan dasar perhitungan angka-angka indeks dapat dikembangkan berbagai indikator baru yang sedang aktual saat ini seperti Indeks Kualitas Hidup Manusia, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Kebahagiaan, Indeks Demokrasi Indonesia dan lain-lainnya. Semua indikator tersebut dapat memberikan gambaran perkembangan keadaan ekonomi, sosial dan politik antar wilayah maupun antar waktu.

Dengan berbagai jenis data tersebut diatas, tentunya banyak sekali kegunaan dari data yang telah dikumpulkan, karena dengan data dapat diperoleh gambaran tentang suatu keadaan yang sedang menjadi perhatian. Secara rinci kegunaan data adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan kegiatan.
2. Perencanaan yang baik dan tepat harus didasari dengan data yang akurat, karena bila data yang digunakan sebagai dasar perencanaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya maka perencanaannya juga menjadi tidak tepat.
3. Sebagai dasar pembuatan keputusan dalam memecahkan masalah.

4. Setiap masalah tentu ada penyebabnya, untuk melihat penyebab terjadinya masalah maka dapat diidentifikasi faktor-faktornya melalui data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diperhatikan.
5. Sebagai alat kontrol/pengendalian dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan.
6. Dengan adanya data yang berupa pemantauan pelaksanaan suatu kegiatan, maka dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
7. Sebagai bahan evaluasi hasil suatu kegiatan.
8. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka diperlukan data yang dapat menggambarkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan itu telah berhasil dilaksanakan atau gagal dalam mencapai tujuannya.

Dalam memanfaatkan data dan statistik dalam berbagai sektor, maka data dan statistik yang dapat digunakan adalah data dan statistik yang memiliki kualitas yang baik, dalam hal menilai apakah kualitas data dan statistik baik atau tidak, maka faktor-faktor yang dapat menjadi penilaian adalah sebagai berikut:

1. Objektif

   Data yang objektif berarti bahwa data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (as it is). Contoh data yang tidak objektif adalah Rp.5.000,- yang dikatakan dengan harganya Rp.7.500,- karena dalam kuitansi tertulis Rp.7.500,- tersebut adalah data yang tidak objektif.
2. Representatif (mewakili)

   Data statistik harus mewaki kelompok objek yang di amati. Misalnya data rata-rata produksi padi di daerah A yang hanya diwakili oleh rata-rata produksi dari sawah yang subur saja. Data ini tidak mewakili rata-rata (atau gambaran umum) produksi padi di daerah A yang sesungguhnya.
3. Bergalat (error) kecil

   Suatu data yang baik bila mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, yaitu beda yang kecil dari nilai yang sesungguhnya (true value). Kesalahan tersebut berupa kesalahan sampling (sampling error) (bila data tersebut berdasarkan

pengamatan sebagian sampel) atau kesalahan bukan sampling (non-sampling error) (yang dapat terjadi baik data berdasarkan sampel atau berdasarkan pengamatan keseluruhan).

4. Tepat waktu (Timeliness).

   Apabila data akan dipergunakan untuk melakukan perencanaan, pengendalian atau evaluasi, maka syarat data yang tepat waktu ini penting sekali agar bisa bermanfaat, misalnya dalam pengendalian kegiatan maka sempat dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan kalau ada kesalahan atau penyimpangan di dalam implementasi. Data yang tersedia tetapi tidak pada saat diperlukan tentunya kurang bermanfaat.

5. Relevan.

   Data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan. Misal, pemerintah ingin menanggulangi korban banjir di suatu daerah maka yang perlu dicatat adalah data dari mereka yang terkena korban banjir di daerah tersebut, bukan data dari penduduk lain.

6. Reliabel.

   Data yang reliabel adalah data yang dapat diandalkan, yaitu data yang berkualitas yang dikumpulkan dan diolah dan disajikan mengikuti kaidah-kaidah statistik.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentan Statistik, Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis Statistik terdiri atas:

1. Statistik Dasar

   Penyelenggara Statistik Dasar adalah BPS Untuk Keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintahan maupun masyarakat, lintas sektoral, berskala nasional dan makro

2. Statistik Sektoral

   Pemyelenggara antara lain Kementerian, Lembaga dan OPD untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan urusan/tugas pemerintahan.

Disimpulkan bahwa statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

3. Statistik Khusus

   Penyelenggara perorangan atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat.

C Informasi

Dalam ungkapan sehari-hari, banyak yang mengatakan bahwa informasi adalah segala yang kita komunikasikan, seperti yang disampaikan oleh seseorang lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain. Ungkapan ini— karena seringnya dipakai—Fox (1983) yang dikutip Pendit (1992:64) mengategorikannya sebagai the ordinary notion of information. Dalam ungkapan ini, terkandung pengertian bahwa tidak ada informasi kalau tidak ada yang membawanya. Di antara yang membawa informasi ini, yang paling sering dibicarakan adalah bahasa manusia melalui komunikasi antarmanusia. Meskipun tidak selalu manusia yang membawa informasi, komunikasi bisa juga berarti asap, DNA, aliran listrik, atau gambar. Dengan demikian, informasi di sini bisa dianggap sebagai pesan atau makna yang terkandung dalam sebuah pesan. Padahal, dalam kenyataan sehari-hari, sering kita harus membedakan informasi yang dikandung suatu kalimat atau yang tertulis dalam kalimat tersebut. Misalnya, si A mengatakan, “Pintar kamu,” kepada si B. Belum tentu yang dimaksud si A bahwa si B benar-benar pintar, tetapi ada makna lain. Jadi, ada makna yang terkandung dalam informasi tersebut.

Informasi berbeda secara mendasar dengan data. Informasi adalah hasil agregasi atau pengolahan data yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengguna informasi. Data dapat menjadi informasi setelah dilakukan pemilihan, pengurutan, analisis dan interpretasi yang tepat dan relevan dengan masalah yang dihadapi.Fungsi utama informasi (statistik) adalah memberikan penjelasan atau

keterangan, mengurangi adanya banyak pilihan/alternatif dan meningkatkan kepastian. Suatu keputusan yang berlandaskan informasi akan lebih bijaksana.

Oleh karena itu, ada tiga makna dari kata informasi. Pertama adalah informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi terinformasi. Makna yang kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Di sini, informasi mengacu pada segala kejadian di dunia (entitas) yang tak terhingga, yang tak dapat disentuh, atau sesuatu yang abstrak. Sebagai sesuatu yang abstrak, informasi dilihat dari makna yang terkandung dalam keseluruhan medium yang digunakan, kemudian dapat diartikan secara berbeda antara si pengirim dan si penerima. Informasi dianggap sebagai bagian abstrak dari pikiran manusia sesuai dengan isi dan makna pesan yang diterima. Misalnya, si Ani berkata kepada Budi, "Wah, pandai betul kamu." Mungkin, maksud Ani karena jengkel melihat si Budi yang menyontek pekerjaan temannya. Mungkin juga, Budi mengira bahwa Ani betul-betul menganggap Budi pandai.

Makna yang ketiga adalah informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Sebagai benda yang nyata, informasi dilihat dari rangkaian simbol-simbol dan dapat ditangkap oleh pancaindra manusia serta dapat saling dipertukarkan. Informasi dianggap sebagai bahan mentah yang nyata, yang berada di luar manusia yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Sebagai contoh, pemakai perpustakaan mencari informasi tentang penelitian perpustakaan. Petugas perpustakaan kemudian mengambilkan buku tentang penelitian perpustakaan karangan Sulityo-Basuki. Di sini, petugas menganggap bahwa informasi tersebut berada dalam buku itu yang dapat diambil dari rak dan diberikan kepada pemakai.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi, informasi dapat kita definisikan sebagai kumpulan data yang terstruktur yang kita komunikasikan lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu 1) sebagai benda nyata (information as a thing) dan 2) sebagai sesuatu yang abstrak. Definisi tersebut berdasarkan pendapat Teskey (Pendit,

1992). Menurutnya, informasi adalah kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan seseorang kepada orang lain.

Kemudian, Gordon B. Davis (1999: 28) juga memberikan definisi. Menurutnya, informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Di samping itu, dalam Oxford English Dictionary, dijabarkan informasi sebagai sesuatu yang dapat diberitahukan atau dijelaskan (that of which is apprised or told), keterangan (intelligence), dan berita (news) (Zorkoczy,1998:9). Berita, menurut Arifin (1997), adalah informasi yang menarik, penting, dan belum pernah didengar.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah Keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dengan demikian, pengertian informasi dalam modul menggunakan definisi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008.

Terkait dengan mutu informasi, Buckland (Rivalina, 2004: 203)menjabarkan informasi menjadi:

1. information-as-process (berperan menyampaikan),
2. information-as-knowledge(sesuatu yang dirasakan dalam information-as-process, pengetahuan yang dikomunikasikan), dan
3. information-as-thing, informasi adalah objek, seperti data dan dokumen yang dapat memberikan informasi (Rivalina, 2004: 203).

Individu sebagai pengguna tentu mengharapkan informasi yang akurat. Informasi harus sesuai dengan kenyataan. Keandalan suatu informasi meningkat apabila

informasi tersebut dapat diverifikasi, yakni kebenarannya dapat dibuktikan secara independen. Informasi harus cukup up-to-date. Sesuai dengan maksud penggunaannya, informasi harus lengkap dan tepat sehingga pihak yang menerima dapat memilih perincian spesifik yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi harus bermakna jelas, yakni dapat dimengerti oleh si penerima (Zorkoczy, 1988: 12-13).

Informasi dalam konteks sistem informasi akan menjadi bernilai, semakin formal, dan ideal apabila didasarkan pada sepuluh sifat menurut Burch dan Strater (Davis, 1999: 58-59) berikut.

1. Accesibility: sifat ini menunjukkan mudah dan cepatnya diperoleh keluaran informasi.
2. Luas dan lengkapnya (comprehensiveness): sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai output informasinya.
3. Ketelitian (accuracy): berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan pengeluaran informasi.
4. Kecocokan (appropriateness): sifat ini menunjukkan seberapa jauh keluaran informasi berhubungan dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus berhubungan dengan masalah.
5. Ketepatan waktu (timeliness): berhubungan dengan waktu yang dilalui dan yang lebih pendek pada saat diperolehnya informasi.
6. Kejelasan (clarify): atribut ini menunjukkan tingkat keluaran informasi dan bebas dari istilah-istilah yang tidak dipahami.
7. Keluwesan (flexibility): sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi.
8. Dapat dibuktikan (verifiability): atribut ini menunjukkan kemampuan beberapa pengguna informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama.

9. Tidak ada prasangka (freedom from bias): sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya.
10. Dapat diukur (quantifiable): sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan pada sistem informasi formal

Menurut Zorkoczy (1988: 14), suatu informasi yang bermutu tinggi dapat membuat si penerima peka terhadap lingkungan sehingga mampu mengambil tindakan untuk mengatasi setiap perubahan situasi yang terjadi. Daya atau kemampuan yang dimiliki informasi ini tampak dalam kemampuannya membentuk gagasan, baik fisik maupun mental. Dalam kelanjutannya, informasi yang bermutu rendah dapat menimbulkan kesalahpahaman atau penyimpangan makna sebagai akibat suatu gangguan terhadap sumber informasi atau proses transmisi. Informasi merupakan sarana baku untuk menunjang dan meningkatkan kegiatan bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi.

Ada bermacam-macam jenis informasi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Salah satunya melalui kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jenis informasi untuk kegiatan manusia menurut Soetaminah (1991) terdiri atas hal- hal berikut.

1. Informasi untuk kegiatan politik. Informasi ini digunakan oleh para politikus dalam melakukan kegiatan politiknya. Misalnya, informasi yang didapat oleh anggota partai politik A mengenai akan adanya reshuffle kabinet. Kemudian, informasi ini digunakan oleh partai politiknya untuk menyusun strategi mendekati kepala negara agar mendapatkan kursi di kabinet. Akan tetapi, oleh partai politik B yang juga mendengar informasi itu, digunakan untuk melemahkan kinerja pemerintahan agar menggoyangkan kabinet yang sedang berjalan dan mereka berusaha menggulingkan pemerintahan.
2. Informasi untuk kegiatan pemerintahan. Informasi ini digunakan para pejabat untuk menyusun rencana, membuat keputusan, dan kebijakan- kebijakan pemerintah. Misalnya, informasi dari para menteri kepada presiden tentang daerah yang terkena bencana alam. Informasi ini digunakan oleh presiden

untuk menyusun strategi membuat kebijakan tentang penanggulangan bencana alam secara menyeluruh.

3. Informasi untuk kegiatan sosial. Informasi ini digunakan oleh pemerintah untuk menyusun rencana-rencana, membuat keputusan dan kebijakan, serta menentukan program kerja, antara lain untuk program-progam kerja kesehatan, pendidikan, atau di luar kegiatan utama dari departemen yang membawahinya.
4. Informasi untuk dunia usaha. Informasi yang dibutuhkan untuk dunia usaha mencakup masalah-masalah:
    a. pemupukan modal usaha melalui pinjaman dari bank;
    b. investasi;
    c. lokasi pabrik;
    d. berbagai macam hal yang terkait dengan produksi, seperti jenis produksi, kualitas dan kuantitasnya, pemasaran hasil produksi, dan distribusi hasil produksi;
    e. hubungan perusahaan dengan pemerintahan; serta
    f. persaingan, alih teknologi, dan lain-lain.
5. Informasi untuk kegiatan militer. Informasi ini diperlukan oleh pejabat militer agar selalu mengikuti informasi kemiliteran yang meliputi perubahan sistem persenjataan, perubahan sistem logistik, perubahan sistem administrasi, perencanaan strategi, dan pembinaan pasukan.
6. Informasi untuk penelitian. Untuk melakukan penelitian, seorang peneliti perlu mengetahui berbagai macam penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, termasuk hasilnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari duplikasi penelitian. Di samping itu, peneliti perlu mengetahui dari mana sumber-sumber informasi itu diperoleh, misalnya melalui jurnal-jurnal, baik tercetak maupun online.
7. Informasi untuk pengajar. Pengajar, baik guru maupun dosen, membutuhkan informasi untuk menambah pengetahuan mereka. Untuk memperluas cakrawala pengetahuan, mereka dapat membacanya dari buku- buku, majalah, atau hasil-hasil penelitian, baik tercetak maupun elektronik.

8. Informasi untuk tenaga lapangan. Tenaga lapangan, baik penyuluh pertanian maupun penyuluh kesehatan, adalah orang-orang yang bekerja memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka butuh informasi yang praktis dan mudah, misalnya petunjuk bergambar untuk identifikasi hama padi atau petunjuk bergambar untuk membersihkan sarang nyamuk, cara memberantas sarang-sarang nyamuk, dan sebagainya. Petunjuk-petunjuk itu bisa mereka dapatkan dari buku-buku praktis.
9. Informasi untuk individu adalah informasi yang dibutuhkan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, pendidikannya, dan kegiatannya. Sebagai contoh, seseorang yang membutuhkan informasi untuk membantu kegiatannya dalam dunia perdagangan, misalnya informasi tentang kurs dolar ke rupiah; orang yang ingin bepergian ke Arab Saudi, misalnya kurs real ke rupiah; atau informasi tentang keberangkatan pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya.
10. Informasi untuk pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa membutuhkan informasi guna mengembangkan pengetahuannya. Mereka mencari informasi dari buku teks, buku wajib, majalah, dan sebagainya guna memperoleh tambahan pengetahuan.

Dari besar dan banyaknya informasi yang ada di alam ini, hanya sebagian yang berhasil dirasakan, didengar, dilihat, dan direkam oleh manusia. Akan tetapi, informasi yang sempat direkam dalam berbagai bentuk perekaman inilah yang kelak bisa dikembangkan dalam kinerja kehidupan manusia. Informasi terekam ini banyak dicari dan dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kepentingannya (Yusup, 2002: 91).

Terkait dengan hal itu, ada pembagian jenis informasi lain yang terkait dengan dokumentasi, seperti yang disebutkan oleh Pramanto (2004) dalam Wulandari, dkk (2007), yaitu informasi yang terekam dan informasi tak terekam. Informasi terekam adalah informasi yang dapat direkam melalui berbagai alat atau media, antara lain media grafis, media elektronik, dan media audiovisual, tak terkecuali media cetak. Selanjutnya, jenis informasi ini disebut dokumen. Contohnya, informasi tentang suatu artikel tentang suatu subjek tertentu dimasukkan dalam jurnal ilmiah,

kemudian disimpan dalam CD-ROM. Sementara itu, informasi yang tak terekam merupakan informasi yang belum atau tidak dapat direkam karena situasi dan kondisi serta nilai kepentingan yang dikandung informasi itu. Misalnya, informasi informal mengenai kecelakaan kereta api atau pesawat.

Informasi sangat berperan dalam komunikasi manusia. Dalam suatu organisasi, karakteristik informasi disesuaikan dengan jajaran manajemen untuk menyelaraskan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu, jajaran manajemen perlu mengenali karakteristik informasi, seperti apa yang ditulis oleh Wulandari (2007) sebagai berikut.

1. Luas informasi

   Luas informasi adalah seberapa luas ruang lingkup informasi tersebut. Misalnya, pada manajemen tingkat bawah, luas informasi yang dibutuhkan lebih terbatas daripada manajemen tingkat menengah. Apalagi manajemen tingkat atas yang tentunya informasi yang dibutuhkan lebih luas. Misalnya, manajemen tingkat bawah, pada subbagian akademis, membutuhkan informasi berapa jumlah anggaran untuk pengelolaan administrasi akademis di fakultas tersebut. Sementara itu, manajemen tingkat menengah, yaitu kepala bagian tata usaha, membutuhkan informasi berapa dana yang didapat untuk pengelolaan ketatausahaan, yang meliputi bidang akademis, rumah tangga, serta kepegawaian dan keuangan. Sementara itu, manajemen tingkat atas, misalnya pembantu dekan bidang administrasi dan keuangan, perlu mengetahui informasi berapa dana yang didapat untuk kebutuhan seluruh fakultas. Ini meliputi tata usaha dan jurusan-jurusan yang ada.

2. Kepadatan informasi

   Kepadatan informasi yang dimaksud adalah seberapa berisinya informasi yang diterima. Misalnya, untuk manajemen tingkat atas, informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang terseleksi dan padat, tetapi mencakup hal-hal yang luas. Untuk manajemen tingkat menengah, informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang cukup padat, tetapi tidak terlalu luas dan cukup terseleksi untuk lingkup bidangnya yang menitikberatkan bidang operasionalnya. Untuk

manajemen tingkat bawah, informasi yang dibutuhkan tidak sepadat dan terseleksi tingkat menengah, tetapi sangat terseleksi untuk subbidang tugasnya.

3. Frekuensi informasi

   Frekuensi informasi artinya keseringan informasi atau tingkat rutinitas informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing tingkatan manajemen. Untuk manajemen tingkat bawah, frekuensi informasi yang diterima lebih rutin sesuai dengan sifat pekerjaannya. Untuk manajemen tingkat menengah, frekuensi informasi tidak menentu dan mungkin bisa mendadak saat dibutuhkan pimpinan. Sementara itu, untuk manajemen tingkat atas, frekuensi lebih tidak terstruktur dan mendadak sewaktu-waktu untuk pengambilan keputusan.

4. Waktu informasi

   Waktu informasi adalah informasi tentang kondisi atau situasi yang telah dilalui dan akan dihadapi oleh organisasi tersebut di masa depan. Pada manajemen tingkat atas dan menengah, informasi yang dibutuhkan adalah informasi prediksi masa depan, tingkat menengah lebih ke informasi masa kini, dan manajemen tingkat bawah lebih pada informasi historis untuk mengontrol tugas-tugas rutin yang telah dilakukan karyawan.

5. Sumber informasi

   Sumber informasi berarti sumber dari mana informasi tersebut didapat, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal banyak dibutuhkan manajemen tingkat bawah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan operasional sehari-hari. Sumber informasi eksternal banyak dibutuhkan oleh manajemen tingkat menengah dan atas yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang berjangka panjang

Mengembangkan praktik-praktik manajemen informasi adalah kunci yang difokuskan pada beberapa organisasi, baik oleh organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Manajemen informasi adalah suatu payung yang mencakup semua sistem dan proses dalam suatu organisasi untuk mengkreasikan dan menggunakan informasi dalam organisasi tersebut. Dalam istilah teknologi, manajemen informasi meliputi sistem-sistem berikut

1. Content management system (CMS) atau sistem manajemen berdasarkan isi adalah sistem manajemen yang melihat isi informasinya. CMS mendukung kreasi, manajemen, penerbitan, dan penemuan dalam informasi perusahaan yang juga sering dikenal dengan nama web content management. Sistem ini difokuskan pada isi online (online content) yang ditargetkan untuk website perusahaan ataupun intranet.
2. Enterprise content management system (ECMS) atau sistem informasi manajemen perusahaan berdasarkan isi adalah suatu sistem manajemen yang terdiri atas inti manajemen yang didasarkan web dengan penambahan kemampuan-kemampuan untuk mengelola ruang lingkup organisasi yang lebih luas. Hal ini sering berisi manajemen dokumen, manajemen record, manajemen aset digital, atau keistimewaan-keistimewaan perusahaan.
3. Document management system (DMS) atau sistem pengelolaan dokumen didesain untuk membantu organisasi mengelola kreasi dan alur dokumen melalui syarat-syarat yang disentralkan pada repository atau kekayaan lokal serta alur kerja yang membuka ketentuan-ketentuan bisnis dan metadata. Fokus DMS terletak pada penyimpanan dan temu kembali pada sumber- sumber elektronik dengan format orisinalnya.
4. Records management system (RMS) atau sistem record manajemen: standard Australia pada record manajemen (AS4390) mendefinisikan pemeliharaan sistem record sebagai sistem informasi yang menangkap, mengutamakan, dan memberikan akses kepada record-record sepanjang waktu. Hal ini mencakup pengelolaan record fisik (kertas) maupun dokumen-dokumen elektronik.
5. Digital asset management (DAM) system atau digital aset manajemen sistem mendukung penyimpanan, penemuan kembali, dan penggunaan kembali objek-objek digital dalam suatu organisasi. DAM berbeda dengan dokumen manajemen dan manajemen isi karena di dalamnya difokuskan pada sumber-sumber multimedia, seperti gambar-gambar, video, dan audio. DAM khususnya memberikan hak-hak kemampuan manajemen.

6. Brand management system (BMN) atau sistem manajemen perusahaan adalah aplikasi spesifik dari beberapa kategori produk DAM pada manajemen materi-materi periklanan dan produksi.
7. Library management system (LMS) atau sistem manajemen perpustakaan memberikan suatu solusi lengkap untuk administrasi semua fungsi perpustakaan dan layanan ke masyarakat. Hal ini mencakup penelusuran aset-aset yang dimiliki perpustakaan serta pengelolaan peminjaman melalui dukungan kegiatan-kegiatan administrasi sehari-hari dari perpustakaan tersebut.
8. Digital imaging system atau sistem gambar digital mengautomasikan kreasi versi-versi elektronik dari dokumen-dokumen yang berupa kertas (semacam bentuk PDFs atau TIFFs) dan digunakan sebagai masukan pada sistem record manajemen. Dengan mengkreasikan sumber-sumber elektronik, hal tersebut dapat dimanipulasikan langsung oleh sistem record yang membatasi kebutuhan filing fisik.
9. Learning management system (LMS) atau sistem manajemen untuk pembelajaran mengautomasikan administrasi dan pembelajaran- pembelajaran lain. Hal ini mencakup pendaftaran mahasiswa, pengelolaan sumber-sumber pelatihan, hasil-hasil record, dan kursus-kursus umum administrasi. LMS didesain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akhir dari trainer dan pengajar.
10. Learning content management system (LCMS) atau sistem manajemen isi pengajaran memadukan kemampuan dari CMS dengan LMS. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengelola kedua isi bahan-bahan training dan administrasi dari training tersebut.
11. Geographic information system (GIS) atau sistem informasi geografis adalah sistem yang digunakan pada hal-hal khusus berdasarkan komputer untuk pengambilan, penyimpanan, analisis, dan penyajian ruang data.

2.1.2 Kebutuhan Data Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Daerah

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan daerah. Pada hakekatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metoda dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan suatu daerah tertentu.

Pengembangan metoda yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Namun di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena:

1. Data tentang daerah sangat terbatas. Dengan data yang sangat terbatas sangat sukar untuk menggunakan metoda yang telah dikembangkan dalam memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah.
2. Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
3. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional menyebabkan data aliran yang masuk dan keluar sukar diperoleh.
4. Data yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah.

Kalau analisis pembangunan nasional dibandingkan dengan analisis pembangunan daerah, maka akan tampak bahwa analisis pembangunan ekonomi daerah sangat ketinggalan, baik ditinjau dari cakupan analisis maupun kedalamannya. Di samping

itu, analisis regional yang ada bertitik tolak dari analisis permasalahan dan kebijaksanaan pembangunan daerah di negara maju, padahal struktur perekonomian negara-negara maju sangat berbeda dengan struktur perekonomian negara sedang berkembang, demikian juga dengan struktur perekonomian daerahnya. Perbedaan struktur ini mengakibatkan perlunya analisis dan cara pendekatan yang berbeda pula.

1. Teori Ekonomi Klasik

   Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah nya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang ber upah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

2. Teori Basis Ekonomi

   Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation).

   Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

   Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun

global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

3. Teori Lokasi

   Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu: lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluang nya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.

   Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas atau suitabilitas suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (Diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, sering kali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri.

   Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

4. Teori Tempat Sentral

   Teori tempat sentral (central place theory) menganggap bahwa ada hirarki tempat (hierarchy of places). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

   Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang ber tetangga (berbatasan).

Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

5. Teori Kausasi Kumulatif

   Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari Tesis kausasi kumulatif (cumulative causation) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal (1957) sebagai backwash effects.

6. Model Daya Tarik

   Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasari nya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialist melalui pemberian subsidi dan insentif.

7. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

   Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2-1 Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus Mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan “kondisi” penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan Komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan Angkatan Kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

2.1.3 Statistik dan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana bunyi pda Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 yang berbunyi "Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan"

Dalam pengelolaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan suatu sistem informasi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 274 yang berbunyi "Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem lnformasi Pembangunan Daerah". Untuk itu pemerintah daera wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dikatakan pada undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 391 yang berbunyi "Pemerintah Daerah Wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi".

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 pasal 2 Tentang Satu Data Indoneisa menyatakan bahwa Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh lnstansi Pusat dan lnstansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 144 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem lnformasi Pembangunan Daerah.

BAB 2. Pendekatan Teori, Konsep dan Metode Peunyusunan

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pasal4 (1) Pemerintah Daerah Wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas lnformasi Pembangunan Daerah & lnformasi Keuangan Daerah; (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.

Peran data dalam siklus perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bahwa ketersediaan data dibutuhkan pada setiap siklus perencanaan. Dalam menyusun rencana data merupakan hal yang penting untuk dapat menyusun rencana yang tepat dimana dengan ketersediaan data indikator dan target kinerja dapat ditentukan sehingga pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana juga didasarkan data eksisteng untuk dapat menilai dengan tepat.

Keterkaitan ketersediaan data dalam siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan rencana dibutuhkan data eksisting sebagai baseline data yang menjadi pijakan awal untuk kemudian dilakukan penetapan rencana dimana ditentukan target capaian yang diharapkan data pada saat target capaian mempunyai nilai yang sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan nilai data digunakan sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan pada akhirnya pelaksanaan rencana dilakukan evaluasi apakah target dari pelaksanaan sudah menghasilkan nilai data yang sesuai atau data yang dibutuhkan dihitung nilai capaiannya untuk selanjutnya hasil evaluasi terhadap data pendukung tersebut digunakan untuk penyusunan perencanaan selanjutnya. Pada prinsipnya Pembangunan dimulai dengan ketersediaan data dan diakhiri dengan menghasilkan data.

Gambar 2.1 Ketersediaan Data dalam Siklus Perencanaan

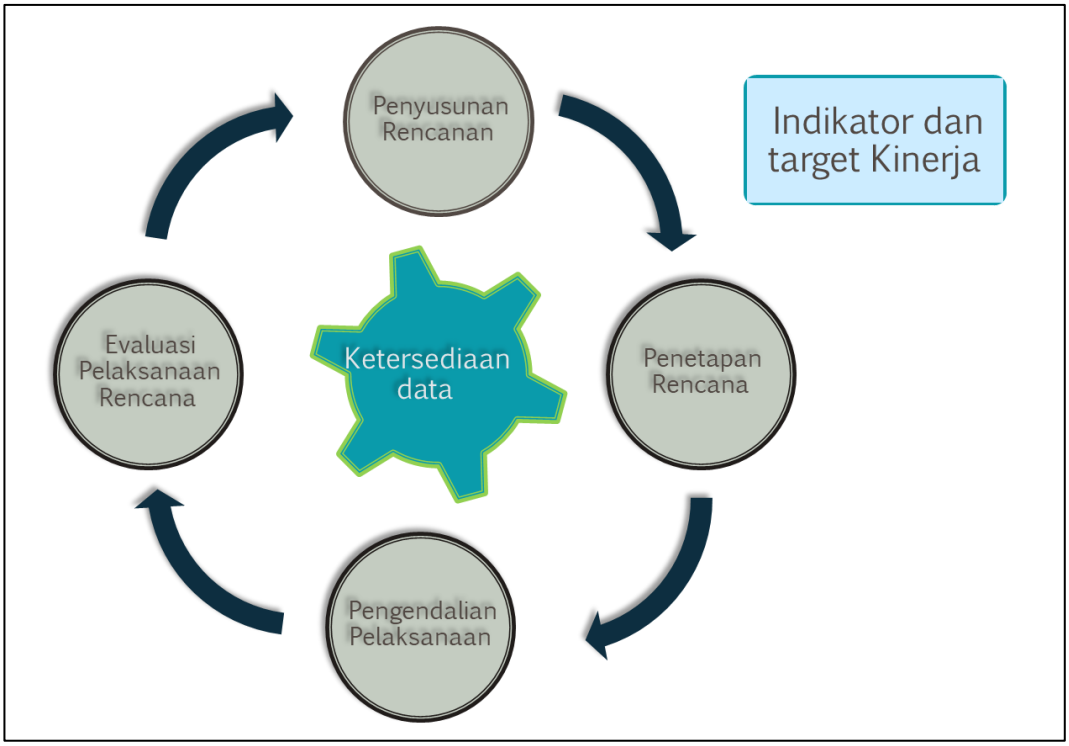

Fungsi statistik dalam siklus pembangunan antara lain antara lain:

1. Sebagai Dasar Informasi Rencana Kebijakan
    a. Perencanaan Pembangunan
    b. Pelaksanaan Pembangunan
    c. Evaluasi Pembangunan
2. Sebagai Panduan Ketercapaian Pembangunan
    a. Pengendalian Pembangunan

Dalam pemanfaatan Data untuk pembangunan diperlukan data berkualitas, dikatakan data bekualitas untuk perencanaan pembangunan didasari oleh beberapa hal yaitu :

1. Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia
    a. Memenuhi standar data
    b. Memiliki metadata
    c. Memenuhi kaidah interoperabilitas
    d. Menggunakan kode referensi/Data Induk

2. Memenuhi Dimensi Kualitas
    a. Relevance
    b. Akurat
    c. Timeliness dan Puctuality
    d. Acsessibility
    e. Coherence dan Comparibility
    f. Interpretability
3. Dapat digunakan sebagai basis data pembuatan kebijakan

    Penggunaan basis data dalam tahap perencanaan pembangunan
    a. Alat identifikasi maslah
    b. Alat identifikasi perencanaan
    c. Alat identifikasi kebijakan
    d. Alat monitoring dan evaluasi

Untuk memastikan Data Statistik Sektoral dibutuhkan Peran Penyelenggara Satu Data Kota Tangerang antara lain:

1. Pembina Data

    BPS Kota Tangerang
2. Walidata

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang
3. Walidata Pendukung dan Produsen Data

    OPD Kota Tangerang
4. Koordinator Forum Data

    Bappeda Kota Tangerang

Gambar 2.2 Kebutuhan Data Berkualitas

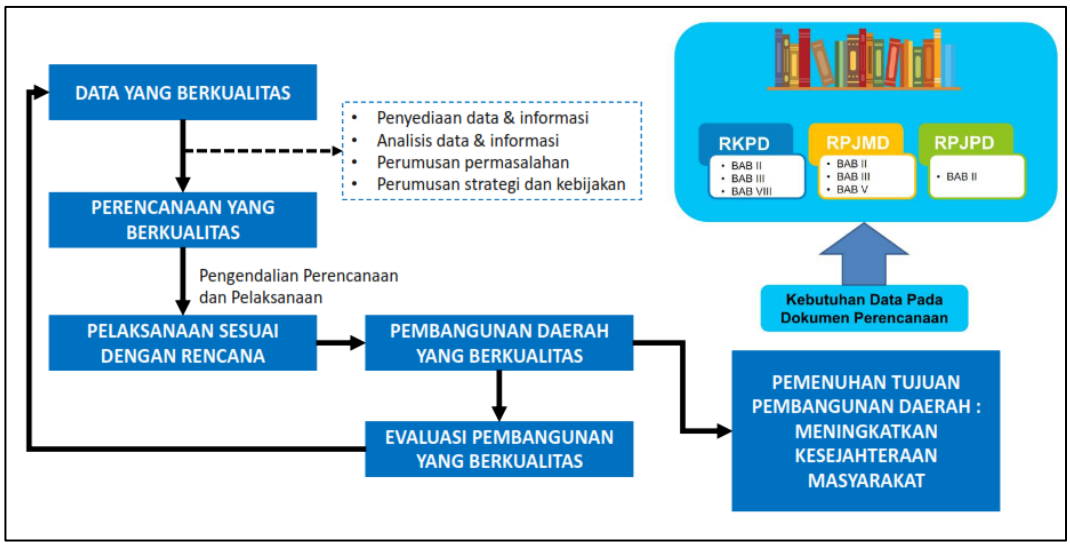

2.2 KONSEP PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL

Strategi Pembangunan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Statistik
   a. Hubungan Kerja Antara Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data
   b. Koordinasi dengan BPS Selaku Pembina Data Statistik
   c. Sinergitas antara pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara OPD
2. Pengembangan Kapabilitas Statistik

   Menyediakan Infrastruktur Statistik dalam menunjang penyelenggaraan statistik di Kota Tangerang
   a. Manajemen standar data dan metadata
   b. Pengelolaan kerangka sampel dan kerangka geospasial
   c. Pengumpulan data
   d. Pengolahan data dan analisis statistik
   e. Diseminasi statistik
   f. Penjaminan kualitas data

3. Peningkatan Kapasitas Statistik
   a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan statistik
   b. Meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik. Untuk mendukung pembangunan daerah
   c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik

A Penguatan Tata Kelola Statistik

Gambar 2.3 Tata Kelola Statistik Di Tingkat Daerah

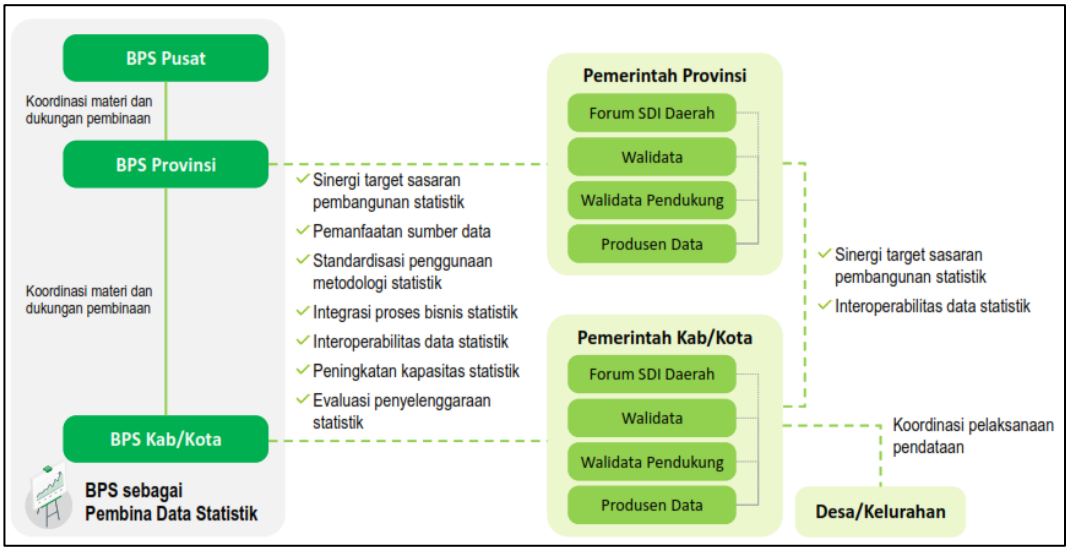

Tata kelola statistik di Kota Tangerang antara lain:

1. Koordinasi dengan BPS Kota Tangerang sebagai pembina data Statistik
   Koordinasi Pemerintah Kota Tangerang dengan BPS Kota Tangerang berkaitan antara lain:
   a. Sinergi target sasaran pembangunan statistik
   b. Pemanfaatan sumber data
   c. Standarisasi penggunaan metodologi statistik
   d. Integrasi proses bisnis statistik
   e. Interoperabilitas data statistik
   f. Peninngkatan kapasitas statistik
   g. Evaluasi penyelenggaraan statistik
2. Hubungan kerja pengelolaan data lingkup internal Kota Tangeang

a. Forum SDI Kota Tangerang
b. Walidata
c. Walidata pendukung
d. Produsen data

3. Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Baten

   Sinergitas Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Provinsi Baten berkaitan dengan:

   a. Sinergi target sasaran pembangunan statistik
   b. Interoperabilitas data statistik

4. Hubungan kerja dengan Kelurahan

   Hubungan kerja dengan kelurahan terkati dengan koordinasi pelaksanaan pendanaan.

Gambar 2.4 Model Proses Bisnis Statistik

Model proses bisnis statistik berkaitan dengan manajemen metadata dan kualitas manajemen antara lain:

1. Spesifikasi Kebutuhan

   Proses identifikasi kebutuhan statistik yang diperlukan oleh para pengguna sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah
2. Perancangan

   proses merancang output, konsep, metodologi, instrumen pengumpulan, dan proses operasional mengenai kegiatan statistik yang akan dilakukan
3. Pembangunan

   proses membangun, mengembangkan dan mengujicobakan instrumen yang mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik
4. Pengumpulan Data

   proses pengumpulan informasi dari responden, sumber data administrasi, dan/atau sumber big data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistik
5. Pengolahan Data

   proses mendeskripsi aktivitas-aktivitas terkait ‘pembersihan’ atau validasi data, dan penyiapan data untuk dianalisis
6. Analisis statistik

   proses mentransformasi hasil pengumpulan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menambah nilai pada output statistik
7. Diseminasi statistik

   Proses penyebarluasan statistik yang telah dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan statistik kepada publik
8. Evaluasi statistik

   proses penilaian secara sistematis dan obyektif terhadap kualitas data dan seluruh proses bisnis statistik untuk melakukan perbaikan pada setiap proses.

Gambar 2.5 Proses Bisnis Statistik

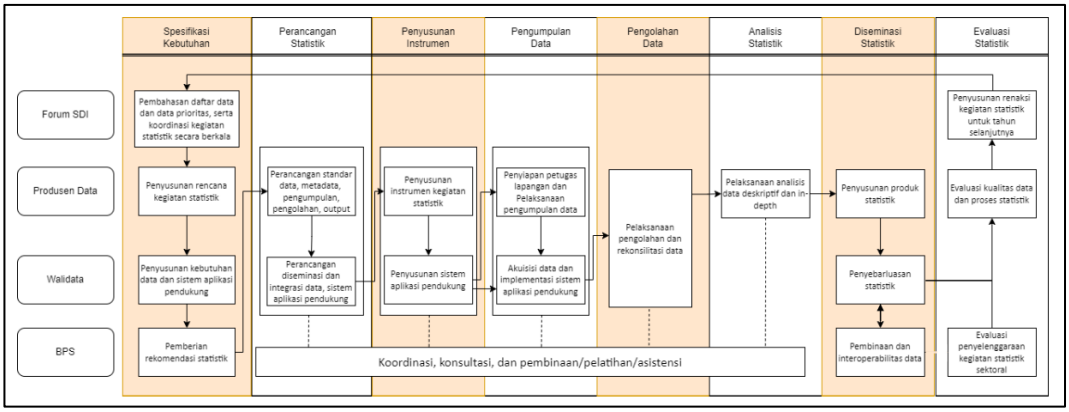

B Pengembangan Kapabilitas Statistik

B.1 Infrastruktur Statistik

Infrastruktur statistik merupakan satu set sistem, platform, aplikasi, tools yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis dan penjaminan kualitas statistik.

Pengguna dari infrastruktur statistik adalah penyelenggara kegiatan statistik dasar dan statistik sektoral antara lain anggota forum SDI, Walidata, Produsen Data.

Tujuan dari infrastruktur statistik antara lain:

1. Mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik
2. Mewujudkan harmonisasi dan koherensi proses bisnis statistik dalam meningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan statistik.

Fungsi utama dari infrastruktur statistik antara lain:

1. Sebagai manajemen standar data dan metadata
2. Pengelolaan kerangka sampel
3. Pengumpulan data
4. Pengolahan data
5. Analisis statistik
6. Diseminasi statistik
7. Fungsi lain sesuai perkembangan teknologi

Gambar 2.6 High Level Architecture

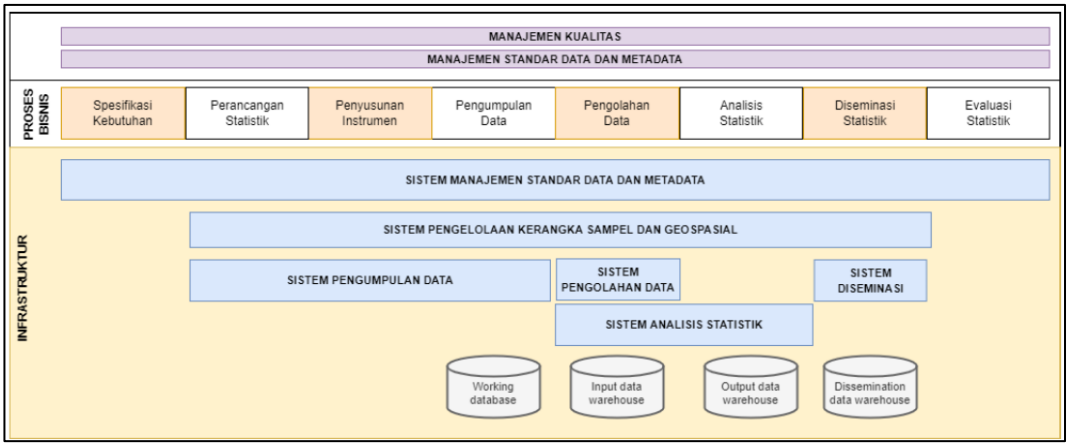

B.2 Manajemen Metadata

Metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata merupakan alat untuk menyusun spesifikasi kebutuhan data, perancangan data, penyusunan, pengumpulan, analisis, memudahkan proses diseminasi dan Evaluasi.

Manfaat metadata antara lain:

1. Pada Pembina Data

   Sebagai alat bagi pengukururan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik
2. Pada Produsen Data

   Menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran
3. Pada Validata

   Memudahkan memahami dan pengelolaan data dan informasi
4. Pada Pembina Data

   Memudahkan memahami data serta memudahkan penggunaan dan interpretasi data

Metadata terdiri dari:

1. Metadata Kegiatan Statistik berisikan antara lain:
   a. Nama Kegiatan

b. Identifikasi penyelenggara
c. Tujuan pelaksanaan
d. Periode pelaksanaan
e. Cakupan wilayah
f. Rancangan pengumpulan data/metodologi
g. Rancangan pengolahan data
h. Level estimasi
i. analisis

2. Metadata Variabel berisikan antara lain:
   a. Kode kegiatan
   b. Nama variabel
   c. Alias
   d. Konsep
   e. Definisi
   f. Referensi pemilihan
   g. Referensi waktu
   h. Tipe data
   i. Domain value
   j. Kalimat pertanyanyaan
   k. Apakah varabel dapat diakses umum
3. Metadata Indikator berisikan antara lain:
   a. Nama indikator
   b. Konsep
   c. Definis
   d. Interpretasi
   e. Rumus perhitungan
   f. Ukuran
   g. Satuan
   h. Klasifikasi
   i. Publikasi
   j. Indikator pembangunan

k. Kode kegiatan indikator pembangunan
l. Variabel pembangun
m. Level estimasi
n. Apakah diakses umum

B.3 Penjaminan Kualitas Statistik

Penjaminan kualitas statistik merupakan serangkaian proses sistematis yangdilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.

Tujuan dari penjaminan kualitas statistik antara lain:

1. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pada pengguna data terhadap data dan informasi yang dihasilkan penyelenggara kegiatan statistik
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi yangdihasilkan
3. Menjaga kredibilitas organisasi

Penyelenggaraan penjaminan kualitas statistik antara lain:

1. Dilaksanakan secara mandiri oleh setiap penyelenggara kegiatan statistik dengan mengacu pada pedoman penjaminan kualitas statistik
2. Pedoman penjaminan kualitas statistik disusun dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik

Instrumen penjaminan kualitas statistik antara lain:

1. Monitoring kualitas
   sistem peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan kegiatan penting dan besar di BPS
2. Quality Gates
   titik pengambilan keputusan di berbagai area strategis dalam proses statistik
3. Pengukuran kualitas
   penilaian terhadap kualitas output yang dilakukan pada tahap spesifikasi kebutuhan hingga evaluasi

Gambar 2.7 Pemanfaatan Instrumen Penjaminan Kualitas

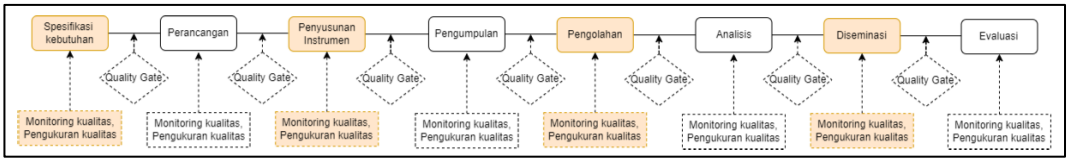

2.3 EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk:

1. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dimanfaatkan :

1. Badan Pusat Statistik untuk perencanaan dan monitoring pembinaan Statistik Sektoral.
2. Instansi Pusat untuk perencanaan dan monitoring peningkatan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral.
    a. Kementeriaan PAN dan RB sebagai salah satu indikator reformasi birokrasi dalam evaluasi reformasi birokrasi nasional
    b. Kementeriaan PPN/Bappenas sebagai acuan evaluasi implementasi satu Data Indonesia
    c. Kementeriaan Dalam Negeri untuk pembinaan perencanaan di Daerah
3. Pemerintahan Daerah untuk perencanaan dan monitoring peningkatan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral.
    a. Diskominfo Kota Tangerang digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama urusan Statistik
    b. Bappeda sebagai indikator dalam RPJMD

Hasil penilaian dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan representasi perkembangan kondisi penyelenggaraan statistik sektoral pada tahun n.

Penyusun Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menghasilkan Output Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral antara lain:

1. Indeks Pembangunan Statistik
2. Indeks Domain
3. Indeks Aspek

Komponen Penyusun Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 5 domain, 19 aspek dan 38 Indikator antara lain:

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia
    a. Aspek Standar Data Statistik
        1.) Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik
    b. Aspek Metadata Statistik
        1.) Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik
    c. Aspek Interoperabilitas Data
        1.) Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data
    d. Aspek Kode Referensi
        1.) Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi
2. Domain Kualitas Data
    a. Aspek Relevansi
        1.) Indikator Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna
        2.) Indikator Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data
    b. Aspek Akurasi
        1.) Indikator Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data
    c. Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu
        1.) Indikator Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data
        2.) Indikator Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi
    d. Aspek Aksesibilitas

1.) Indikator Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data
2.) Indikator Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data
3.) Indikator Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data

e. Aspek Keterbandingan dan konsistensi
1.) Indikator Tingkat Kematangan Keterbandingan Data
2.) Indikator Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik

3. Domain Proses Bisnis Statistik
a. Aspek Perencanaan Data
1.) Indikator Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik
2.) Indikator Tingkat Kematangan Desain Statistik
3.) Indikator Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen

b. Aspek Pengumpulan Data
1.) Indikator Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data

c. Aspek Pemeriksaan Data
1.) Indikator Tingkat Kematangan Pengolahan Data
2.) Indikator Tingkat Kematangan Analsisis Data

d. Aspek Penyebarluasan Data
1.) Indikator Tingkat Kematangan Diseminasi Data

4. Domain Kelembagaan
a. Aspek Profesionalitas
1.) Indikator Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
2.) Indikator Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyjektivitas terhadapPenggunaan Sumber Data dan Metodologi
3.) Indikator Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data
4.) Indikator Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data

b. Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel
1.) Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik

2.) Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data

c. Aspek Pengorganisasian Statistik
   1.) Indikator Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
   2.) Indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
   3.) Indikator Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik
   4.) Indikator Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata

5. Domain Statistik Nasional
   a. Aspek Pemanfaatan Data Statistik
      1.) Indikator Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan
      2.) Indikator Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan
      3.) Indikator Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik
   b. Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik
      1.) Indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik
   c. Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan
      1.) Indikator Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik
      2.) Indikator Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data
      3.) Indikator Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data

Gambar 2.8 Komponen Penyusun Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

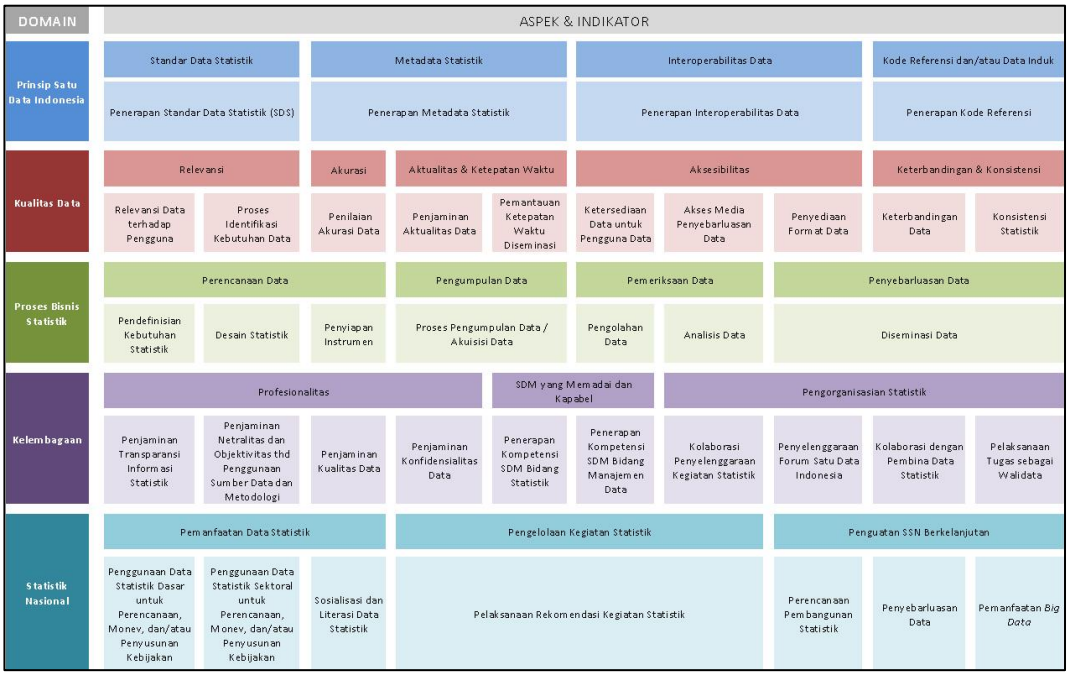

Sumber : BPS

Nilai Indeks Pembangunan Statistik akan diberi predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral yang dikelompokkan berdasarkan lima kategori sebagaimana terlihat pada Gambar 2.9 dibawah ini.

Gambar 2.9 Predikat Nilai Indeks Pembangunan Statistik

Sumber : BPS

Nilai Tingkat Kematangan pembangunan statistik antara lain:

1. Nilai 1 = Rintisan

Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja

2. Nilai 2 = Terkelola
   Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri
3. Nilai 3 = Terdefinisi
   Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisas
4. Nilai 4 = Terpadu dan Terukur
   Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
5. Nilai 5 = Optimum
   Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

2.4 PENDEKATAN METODE

Adapun alternatif pendekatan yang dapat digunakan dalam Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

A Pendekatan Informasi Komprehensif dan Efektif

Secara keseluruhan, Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang merupakan integrasi file antara data dan Informasi yang dapat didokumentasikan secara visual. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan rangkaian informasi yang secara langsung mutlak untuk ditampilkan dalam

Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

Media Visual berisikan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk text document, data statistik (tabel dan bagan), data grafis (peta-peta, gambar dan photo) sebagai bentuk pengembangan penyajian data dan informasi secara efektif.

B Pendekatan Eksplorasi

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggali permasalahan. Kegiatan dilakukan dengan mencari dan mengidentifikasi objek/substansi permasalahan seluas mungkin, dengan harapan memperoleh pengetahuan baru, atau hal-hal baru sebagai informasi kebijakan.

Eksplorasi secara terstruktur dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu struktur informasi yang disampaikan dalam kebijakan, sehingga diperoleh kerangka materi inti yang selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pengembangan master-desain materi masukan dalam alternatif penanganan.

Dalam pendekatan eksploratif ini sangat memungkinkan diperoleh informasi-informasi tambahan yang tidak diduga sebelumnya atau yang tidak pernah dikemukakan dalam teori-teori yang ada. Informasi yang didapat dengan pendekatan ini dapat bersifat situasional dan berdasarkan pengalaman sumber. Proses eksplorasi ini akan mengkerucut pada suatu bentuk pendekatan yang konfirmatif dalam menilai keseusaian karakteristik kelompok sasaran dengan kebutuhan penyampaian materi sosialisasi untuk tiap karakteristik yang berbeda.

Ciri pendekatan eksplorasi – sistematis antara lain berupa:

- Proses analisa yang kompleks, mengintervensi dan mengelola konflik kebijakan yang tidak terlepas dari perubahan wilayah (Rondinelli, 1973).
- Penerapan disiplin ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan membentuk informasi rencana/kebijakan yang relevan sehingga dapat digunakan, antara lain dalam perancangan dan

penyusunan materi sosialisasi, untuk mencapai tujuan kebijakan untuk menanggulangi permasalahan publik (William N. Dunn, 1981).

Dari berbagai definisi yang dijelaskan tersebut terlihat bahwa eksplorasi – sistematis merupakan model pendekatan yang relevan untuk menilai, menganalisa dan menghasilkan informasi yang tepatguna dalam proses pelaksanaan pekerjaan guna menghasilkan suatu rumusan permasalahan dan kebutuhan pengembangan strategi.

C Perencanaan Rinci Menyeluruh Dan Terpadu

Merupakan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu serta didasarkan pada potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan yang ada. Pendekatan menyeluruh memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada aspek / wilayah / fokus / lokasi yang hendak direncanakan, tetapi ditinjau dan dikaji pula kepentingan yang lebih luas, dan pada aspek lainnya yang terkait. Secara terpadu mengartikan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan tidak hanya dipecahkan sektor per sektor saja tetapi didasarkan kepada kerangka perencanaan terpadu antar tiap-tiap sektor, di mana dalam perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antar sektor. Secara umum pendekatan yang dilakukan dalam Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

1. Tinjauan Ulang (Review) Kebijakan-Kebijakan.
    a. Tinjauan ulang (review) kebijakan-kebijakan merupakan desk study atau studi literatur dengan maksud untuk pemahaman terhadap beberapa kebijakan tentang perencanaan tata ruang terhadap wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi , baik secara internal maupun eksternal atau wilayah yang lebih luas (lingkup propinsi dan nasional);
    b. Memahami konsep yang telah dipertimbangkan dan dipadukan konsep-konsep yang termuat dalam Kajian kebijakan/program Wilayah Pengembangan Kegiatan pelaku usaha

2. Kajian teoritis dan praktis sosialisasi program/ kebijakan. Secara substansial ada beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut :
   a. Menelaah sejumlah teori dan pelaksanaan sosialisasi sejenis yang pernah dilakukan dibeberapa wilayah yang berbeda;
   b. Mengoptimalkan penggunaan data/informasi untuk memperkaya bahasan;
   c. Mengkaji sistem sosialisasi usaha ekspor dalam kaitannya dengan pengintegrasian aspek perencanaan dan implementasi perdagangan;
3. Memahami secara lebih mendalam muatan kebijakan/program pada Kota Tangerang dalam keterkaitaann dengan Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

D Pendekatan Kelembagaan dan Tata Kelola

Pelibatan Pelaku Pembangunan

Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat sebagai pemanfaat ruang (pelaksana rencana tata ruang) dan sebagai pihak yang terkena dampak positif maupun negatif dari perencanaan ruang itu sendiri. Oleh karena itu dalam penyusunan rencana ini digunakan pendekatan partisipasi masyarakat (stakeholder approach) untuk mengikutsertakan masyarakat di dalam proses penyusunan rencana tata ruang melalui forum diskusi pelaku pembangunan.

Konsultan dalam hal ini berusaha untuk melibatkan secara aktif pelaku pembangunan yang ada dalam setiap tahapan perencanaan. Di dalam penyusunan rencana ini masyarakat tidak hanya dilihat sebagai pelaku pembangunan (stakeholder) tetapi juga sebagai pemilik dari pembangunan (shareholder).

Keterlibatan masyarakat sebagai shareholder dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan wilayah terhadap investor dari luar wilayah, tetapi yang diharapkan

adalah kerjasama antara investor dengan masyarakat sebagai pemilik lahan di wilayah tersebut. Dengan posisi sebagai shareholder diharapkan masyarakat akan benar-benar memiliki pembangunan diwilayahnya, dapat bersaing dengan penduduk pendatang, dan dengan demikian masyarakat lokal tidak tergusur dari wilayahnya. Pelibatan pelaku pembangunan dalam pekerjaan ini dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini.

Gambar 2.10 Keterlibatan Pelaku Pembangunan Dalam Proses Perencanaan

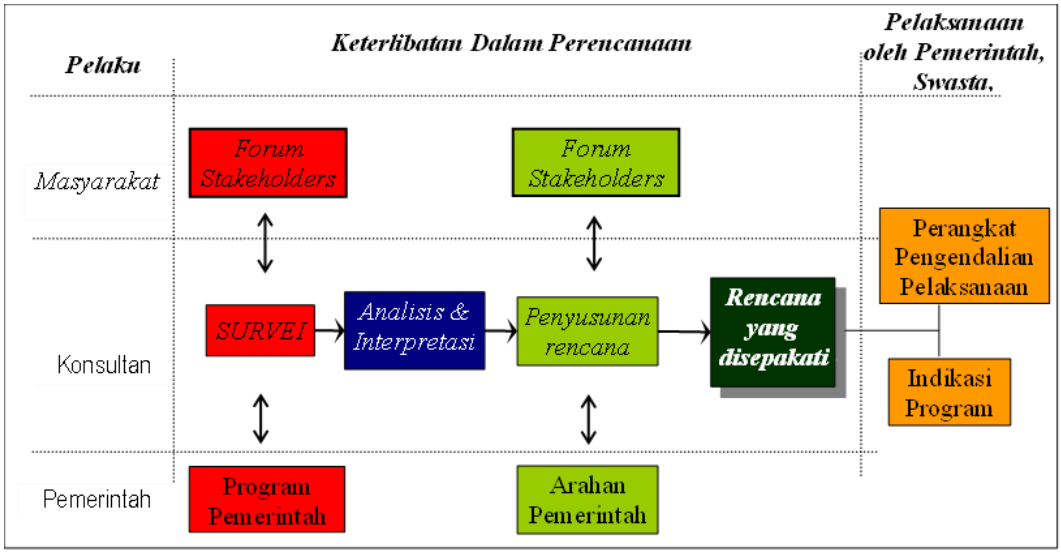

Partisipasi Masyarakat

Pendekatan participatory digunakan untuk memperoleh urutan prioritas pengembangan dan masukan-masukan dari berbagai stakeholders untuk melengkapi peta potensi yang sudah dihasilkan. Selain melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, pendekatan participatory ini juga dilakukan dengan melalui pembahasan-pembahasan/seminar-seminar untuk mengkaji lebih lanjut hasil analisis yang dibuat.

Pertimbangan menggunakan participatory approach adalah, bahwa saat ini pemaksaan kehendak dan perencanaan dari atas sudah tidak relevan lagi. Di era reformasi ini perlu melibatkan berbagai pihak dalam setiap kegiatan pembangunan.

Manfaat penggunaan pendekatan tersebut adalah untuk meminimalkan konflik berbagai kepentingan yang berarti juga mendapatkan hasil akhir yang menguntungkan untuk semua pihak. Keuntungan lainnya yang akan diperoleh adalah jaminan kelancaran implementasi hasil kajian ini di kemudian hari. Sepenuhnya disadari bahwa penggunaan participatory approach akan menimbulkan berbagai persoalan dalam prosesnya, terutama masalah keterbatasan waktu. Masalah ini akan dicoba diminimalkan melalui persiapan materi dan pelaksanaan seminar yang matang, sehingga kesepakatan dapat dengan segera dicapai tanpa mengurangi kebebasan stakeholders untuk mengeluarkan pendapatnya. Di antara persoalan-persoalan yang akan muncul, pemilihan stakeholders yang akan dilibatkan juga bukan merupakan hal yang mudah. Ada dua pilihan solusi untuk masalah ini. Yang pertama adalah menyebarkan undangan secara terbuka melalui media massa dan yang lainnya, dan membebaskan setiap yang berminat untuk berurun rembug. Persoalannya kemudian adalah kesulitan mengontrol jalannya pembahasan. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh kemungkinan terlalu banyaknya pihak yang akan datang, tetapi belum tentu berkepentingan secara langsung. Dengan sendirinya akan sulit memperoleh suatu kesepakatan. Sedang yang kedua adalah melalui undangan terbatas. Kesulitan solusi kedua ini adalah dalam penentuan daftar undangan. Ada kemungkinan terjadi kesalahan mengundang. Pihak-pihak yang diundang belum tentu mewakili stakeholders secara keseluruhan.

E Pendekatan Aspek Keberlanjutan

Pelibatan Pelaku Pembangunan

Kualitas hidup manusia di planet bumi, tidak lepas dari kualitas lingkungan hidupnya. Adanya hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya menyebabkan perubahan atas komponen lingkungan hidup. Perubahan ini berdampak balik terhadap kehidupan manusia, baik dampak negatif maupun positif. Manusia memiliki tanggungjawab terhadap alam dan jenis mahluk hidup lain

seperti hewan dan tumbuhan. Ada prinsip-prinsip yang secara moral mengatur bagaimana manusia menggunakan atau mengelola sumber daya dan lingkungannya. Etika berkaitan dengan moral dan nilai. Etika lingkungan mengkaji dan membahas hubungan moral antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Universalists memandang bahwa prinsip dasar etika bersifat umum dan tidak dapat berubah. Aturan-aturan benar atau salah tergantung pada minat, sikap, atau pandangan kita. Relativists, aliran yang mengklaim bahwa prinsip-prinsip moral selalu relativ berlaku untuk seseorang, masyarakat atau situasi. Dalam pandangan ini, nilai-nilai etik selalu bersifat kontekstual. Tidak ada fakta, kecuali interpretasi yang ada pada generasi sekarang (Friedrich, dalam Cunningham, 2003). Nihilists, aliran yang memandang bahwa kekuatan (power) penting untuk mempertahankan hidup, sementara menurut Utilitarians suatu aktivitas yang benar jika menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Berbuat sesuatu terhadap lingkungan untuk kemaslahatan orang banyak adalah sesuatu yang lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali.

Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai dasar yang berkembang sering masih bersifat materialistik. Etika lingkungan sebagai cabang filosofi, secara intensif mengartikulasikan nilai-nilai etika alam semesta. Kearifan lokal lahir akibat adanya kedekatan masyarakat dengan alam lingkungannya. Dalam wujud budaya tradisional, kearifan lokal melahirkan etika dan norma kehidupan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya. Selama masyarakat masih menghormati budaya tradisional yang memiliki etika dan nilai moral dengan lingkungan alamnya, maka konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi hal yang mutlak. Dalam kehidupan masyarakat demikian, etika lingkungan tidak tampak secara teoretik tetapi menjadi pola hidup dan budaya yang dipelihara oleh setiap generasinya.

Etika lingkungan merupakan tatanan nilai-nilai hubungan antara manusia dengan lingkungan, yang dapat diterima oleh anggota masyarakat. Etika dalam konservasi sumber daya dan lingkungan, mengandung makna penghargaan atas keterbatasan

dan kelemahan sumber daya alam dalam menopang kehidupan manusia, rasa keindahan alam, hak hidup mahluk biologis lain, serta kepercayaan atas ciptaan Tuhan (Callicott, 1994). Nilai-nilai yang bermakna moral dan etis terhadap lingkungan, banyak yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Hal ini tidak saja mengandung nilai-nilai pendidikan lingkungan dan konservasi, tetapi adanya kepatuhan atas kepecayaan kepada sang gaib.

Mahluk hidup lain memiliki hak untuk hidup seperti manusia. Untuk itu manusia perlu menghargai mahluk hidup lain yang menjadi bagian dari komunitas hidup manusia. Semua spesies (mahluk hidup) saling terkait satu sama lain, membentuk komunitas biotik. Komunitas ini berinteraksi dengan unsur-unsur lingkungan tak hidup (abiotik), membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Dalam ekosistem, kepunahan satu spesies dapat memberi dampak bagi komponen lain dalam komunitas ini (Cunningham, 2003).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan sumber daya alam, aktivitas ini memberi dampak terhadap sumber daya dan lingkungannya. Kekeliruan dan ketidakpedulian dalam pengelolaan lingkungan akan berakibat kerusakan dan kepunahan sumber daya. Peduli terhadap lingkungan pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku bawaan manusia. Akan tetapi munculnya ketidak pedulian manusia adalah pikiran atau persepsi yang berbeda-beda ketika manusia berhadapan dengan masalah lingkungan. Manusia harus memandang bahwa dirinya adalah bagian dari unsur ekosistem dan lingkungannya. Naluri untuk mempertahankan hidup akan memberi motivasi bagi manusia untuk melestarikan ekosistem dan lingkungannya.

Etika lingkungan akan berdaya guna jika muncul dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan dan kearifan kita terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apa pun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan berperilaku arif dalam kehidupan.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang terpadu haruslah memiliki sifat berkelanjutan (dapat ditindaklanjuti) baik secara program maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat penanganan suatu kawasan tidak dapat dilakukan dalam satu saat saja, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Dalam menjamin terlaksananya sifat yang berkelanjutan, maka harus diidentifikasi tingkat kemampuan dan investasi pada kawasan pengembangan. Beberapa prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Harus didasari oleh kebutuhan (needs assesment);
2. Penetapan keadaan yang harus dimiliki dan keadaan akhir yang akan dicapai serta dampak sosial budaya yang ditimbulkan;
3. Penetapan dampak lingkungan;
4. Kesepakatan institusional untuk melaksanakan program pembangunan;
5. Penetapan cara mengatasi beban "pengoperasionalan dan pemeliharaan" jangka panjang;
6. Penggunaan teknologi tepat guna.

Beberapa prasyarat agar pengembangan tersebut dapat terpadu adalah suatu perencanaan yang dilaksanakan dapat dilakukan sendiri oleh pemangku kepentingan daerah dengan kemampuan sendiri adalah:

- Pelaksanaan program merupakan kesepakatan dari sebanyak mungkin pihak yang terkait
- Didukung oleh sistem inventori yang mampu memberikan informasi keadaan awal daerah serta permasalahannya dan potensi yang dimiliki;
- Dampak sosial ekonomi dari program;
- Kemampuan kelembagaan termasuk sumber daya manusia;
- Affordability atau kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan program berkelanjutan, pengoperasionalan dan peneliharaan serta re-investasi;

- Penerapan sistem pengelolaan peremajaan kawasan yang berdasarkan sistem pengelolaan sumber daya terpadu.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan ambang batas bagi upaya pemanfaatan ekosistem alam. Ambang batas ini bersifat fleksibel dimana pemberlakukannya akan sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi dan teknologi pemanfaatan SDA, serta kemampuan biosfer untuk menerima dampak kegiatan manusia. Dapat pula dikatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem alam dengan tidak merusak kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi manusia.

Secara umum pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi:

1. Dimensi Ekologis

   Setiap ekosistem alam memiliki 4 (empat) fungsi pokok yaitu :

   a. Jasa-jasa pendukung kehidupan : berbagai hal dasar yang mendukung keberadaan manusia yaitu udara, air dan ruang;
   b. Jasa-jasa kenyamanan : jasa yang diberikan oleh ekosistem yang mempunyai nilai estetika/keindahan sehingga dapat membantu pemulihan manusia secara mental;
   c. Penyedia sumber daya alam;
   d. Penerima limbah.

   Selanjutnya berdasarkan keempat fungsi ekosistem tersebut, maka secara ekologis terdapat tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu:

   - Keharmonisan spasial;
   - Kapasitas asimilasi;
   - Pemanfaatan berkelanjutan.

2. Dimensi Sosial Ekonomi

   Jika dimensi ekologis pada dasarnya menyajikan kemampuan alam untuk menyediakan sumber dayanya bagi kehidupan manusia, maka kemudian pola

pembangunan yang dijalankan hendaknya dapat dikelola dengan baik sehingga aspek permintaan yang ditimbulkannya tidak melampaui batas penyediaan tersebut. Secara sosial ekonomi konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa setiap keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari dari pemanfatan alam, harus diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Dimensi Sosial Politik

   Secara umum dampak buruk kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatannya akan bersifat eksternalitas, dimana justru penerimanya adalah pihak lain yang bukan pembuat kerusakan tersebut. Mengacu pada kondisi tersebut maka pembangunan berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratis dan transparan.

4. Dimensi Hukum dan Kelembagaan

   Pembangunan berkelanjutan juga mensyaratkan adanya sebuah aturan yang bersifat institusional dan sistematis yang mampu mengendalikan kegiatan setiap individu dari setiap tindakan yang berpotensi merusak lingkungan

Di dalam perubahan keempat UUD 45 Pada Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33, ayat (4), “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”, menunjukan bahwa Perekonomian Nasional mengarah pada Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Perekonomian Terpadu dimana pada Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Perekonomian Terpadu ini telah memberikan peran pada aspek pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan manusia adalah bagaimana manusia dapat mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan serta pengembangan literasi membaca agar mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Dalam Sejarah Peradaban manusia menunjukan bahwa bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Perekonomian Terpadu merupakan upaya yang komprehensif pada Pilar Ekonomi, Sosial dan Lingkungan yang didukung Tata Kelola Pemerintahan. Untuk memperkuat konsep tersebut perlu upaya peningkatan pengembangan dari Aspek Pembangunan manusia, Aspek Tata Ruang Wilayah dan Aspek Sosial yang menghasilkan irisan kondisi sempurna dalam pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.11 Aspek Pada Konsep Pembangunan Berkelanjutan

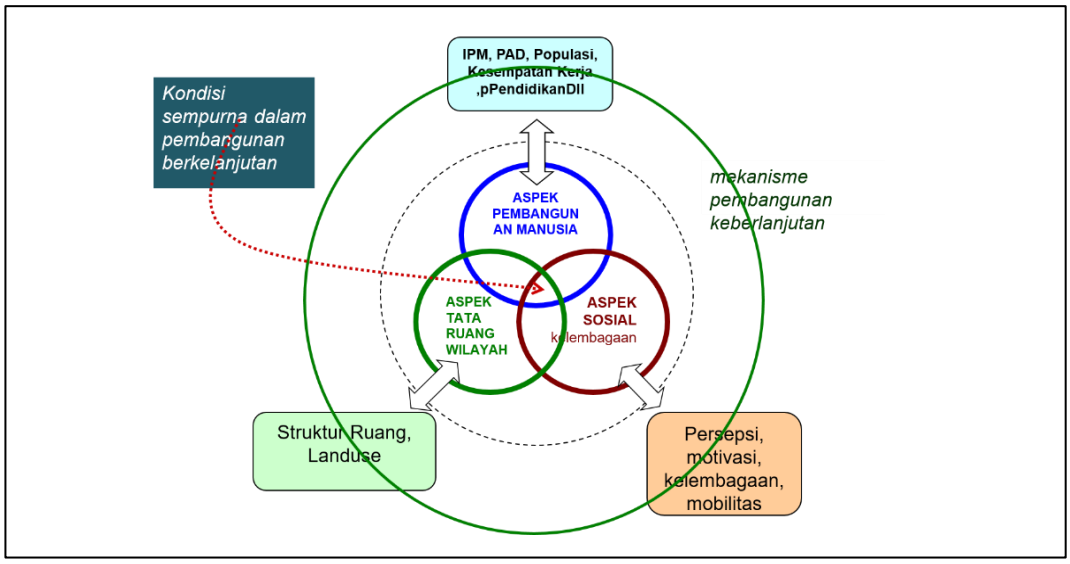

Konsep Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan pertama kali dikemukakan oleh komisi Brundlant. Komisi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup manusia kini tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia di masa mendatang. Makna lain dari keberlanjutan diungkapkan oleh Solow (1991) dalam uraian Rainy (2009) yang mengatakan bahwa keberlanjutan dapat tercipta jika masyarakat generasi mendatang setidaknya memiliki kekayaan sumber daya (manusia, fisik, dan alam) yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Berdasarkan pengertian keberlanjutan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa prinsip yang penting jika suatu kegiatan dikatakan berlanjut. Pada intinya suatu kegiatan dapat dikatakan berlanjut jika kegiatan

tersebut mampu memenuhi kebutuhan sekarang hingga kebutuhan pada masa yang akan datang. Selain itu kegiatan tersebut tidak hanya dapat bertahan pada suatu kondisi, namun juga harus dapat berkembang lebih baik agar kegiatan tersebut dapat dikatakan berlanjut. Adapula prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam konsep pengembangan ekonomi lokal. Konsep PEL menekankan pada kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membangun kapasitas dan potensi lokal, dengan tujuan memperbaiki ekonomi suatu wilayah. Dengan melihat kedua prinsip konsep keberlanjutan dengan konsep PEL dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan berlanjut secara konsep PEL jika kegiatan tersebut mampu bertahan dan berkembang lebih baik, serta mampu membangun kapasitas lokal untuk memperbaiki ekonomi di masa kini hingga masa mendatang.

Pendekatan Eksplanatoris

Pendekatan ini pada intinya berupaya untuk menjelaskan suatu kondisi/fenomena/permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu objek/substansi pekerjaan. Melalui pendekatan ini, diupayakan adanya analisa untuk menemukan jawaban asal- muasal/penyebab permasalahan.

Pendekatan ini akan memahami adanya tahapan yang lazim berlaku dalam proses suatu kondisi menjadi permasalahan. Diawali dengan identifikasi terhadap problematika yang muncul di ranah publik, pihak tertentu yang berpekentingan kemudian mengupayakan permasalahan tersebut dikemukakan ke hadapan publik sehingga diketahui dan disadari bahwa persoalan yang muncul terkait dengan kepentingan publik (public issues). Ketika semakin banyak yang menaruh perhatian (concerned), maka isu publik beranjak menjadi agenda publik, yang biasanya ditindak-lanjuti dengan berbagai aksi-reaksi antara pemangku kepentingan dengan lembaga publik yang berwenang menerbitkan kebijakan.

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini tidak kaku dan tidak terstandarisasi. Kegiatan yang kualitatif sifatnya fleksibel, dalam arti kesesuaiannya tergantung dari tujuan setiap penelitian. Walaupun demikian, selalu ada pedoman untuk diikuti,

tapi bukan aturan yang mati (Cassel & Symon, 1994; Strauss, 1987; Taylor & Bogdan, 1984). Jalannya kegiatan dapat berubah sesuai kebutuhan, situasi lapangan serta hipotesa- hipotesa baru yang muncul selama berlangsungnya penelitian tersebut

Pendekatan Pemberdayaan Stakeholder

Membangun keseimbangan posisi tawar antar stakeholders dengan mendorong keberpihakan pada masyarakat, membangun hubungan saling menguntungkan antar stakeholders serta menempatkan masing-masing sesuai fungsinya yakni:

Pemerintah sebagai fasilitator sekaligus regulator. Pemerintah jangan sampai masih memiliki kerancuan dalam berperan sebagai provider (penyedia layanan), bahkan hal ini masih tampak dominan ketimbang peran sebagai fasilitator. Oleh karenanya master plan ini diharapkan dapat menonjolkan peran Pemerintah sebagai fasilitator.

Sektor swasta sebagai pemilik modal yang berorientasi pada keuntungan. Akan tetapi ke depan, kepentingan pada keuntungan perlu diimbangi pula dengan kepentingan lain yang juga memperhatikan soal lingkungan, sosial budaya dan kepentingan masyarakat, sehingga pada gilirannya terjadi keseimbangan dan sharing of power.

Masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan sekaligus penerima manfaat. Pada banyak proses pembangunan, masyarakat masih belum banyak berperan. Mereka tidak pernah diajak bicara dalam menentukan hal-hal strategis bahkan untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karenanya, master plan ini harus dapat mengakomodasi kepentingan jangka panjang mereka yang sekaligus juga dapat meningkatkan posisi tawar jika dibanding stakeholder lainnya.

F Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif (descriptive approach) akan menjelaskan seluruh fenomena objek dan subjek pekerjaan secara komprehensif berdasarkan kasus (permasalahan)

yang teridentifikasi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut diharapkan melalui pekerjaan ini dapat disajikan pemecahan permasalahan yang difokuskan pada upaya penanganan masalah.

Menurut Surakhmad (1978), ciri-ciri penelitian yang bersifat deskriptif antara lain:

- Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual;
- Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis (karena itu metode ini sering pula disebut metode analisis).

Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan akan meminimalisasi subjektivitas sekaligus dapat diperoleh suatu kesimpulan yang lebih obyektif.

G Pendekatan Preskriptif

Pendekatan preskriptif (prescriptive approach) merupakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan ataupun kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu hasil rancangan, dalam hal ini untuk menelusuri alternatif penanganan penyerahterimaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan dan permukiman, untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat.

H Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif atau participatory approach merupakan pendekatan yang melibatkan partisipasi stakeholders dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya pada proses retrospektif.

Pendekatan partisipatif pada intinya merupakan usaha penyelesaian persoalan yang menjadi target pekerjaan secara aktif dengan melakukan pelibatan semua stakeholder terkait, baik pemerintah daerah, developer, masyarakat, maupun para pakar dan pihak lainnya yang berkaitan dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum

perumahan dan permukiman. Pendekatan partisipatif dalam pekerjaan ini lebih mengarah pada bentuk pengumpulan dan pertukaran informasi dan dalam proses identifikasi kebutuhan masing- masing kelompok sasaran yang akan diakomodir dalam upaya perumusan masalah kebijakan penanganan penyerahterimaan fasilitas sosial dan fasilitas.

Selain dalam bentuk diskusi, pendekatan partisipatif juga dapat diterapkan dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi. Pendekatan ini akan memungkinkan penggalian dan pengumpulan informasi terutama yang bersifat kualitatif dan lebih informatif. Dalam pengumpulan informasi melalui pendekatan partisipatif ini, para stakeholder tidak diposisikan sebagai obyek penelitian, namun sebaliknya didudukan sebagai subyek studi terhadap kebutuhan stakeholders untuk diakomodir yang akan lebih fokus pada masing-masing kepentingan kelompok sasaran.

Pendekatan partisipatif ini dipilih dalam penyelesaian pekerjaan untuk menggali informasi yang dalam, sehingga rumusan persoalan dan solusi yang dihasilkan melalui materi sosialisasi akan lebih tepat pada sasarannya. Pendekatan ini memungkinkan ’ownership’ yang tinggi dari stakeholders terkait yang akan menjadi kelompok sasaran pekerjaan.

I Peran Data Berkualitas Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah

Data yang baerkualitas digunakan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas, dimana perencanaan yang berkualitas haruslah melalui proses antara lain:

1. Penyediaan Data dan Informasi
2. Analisis Data dan Informasi
3. Perumusan Permasalahan
4. Perumusan Strategi dan Kebijakan

Agar perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana maka diperlukan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan pembangunan

daerah yang berkualitas. Dengan data yang berkualitas pula pembangunan daerah dapat di evaluasi.

2.5 METODOLOGI

2.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pekerjaan ini dilakukan dengan mencari pada 2 (dua sumber yaitu:

A Sumber Primer In-depth Interview

Pengumpulan data melalui sumber primer didapat melalu wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dapat berfungsi deskriptif maupun berfungsi eksploratif. wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktural yang berarti perpaduan antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur. Hal yang dimaksud adalah sebelum melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan pokok terlebih dahulu untuk menjadi pedoman dalam berkomunikasi dengan responden. Selanjutnya di dalam proses wawancara tersebut dapat memunculkan pula berbagai pertanyaan baru yang diperoleh dari jawaban yang diberikan oleh responden. Oleh sebab itu, dalam wawancara yang berlangsung akan diperoleh data baru atau yang lebih luas namun tetap terarah ke masalah penelitian yang sedang dikaji oleh pewawancara

Pertanyaan yang akan disampaikan mungkin tidak berurut dan pilihan kata-kata dalam wawancara akan disesuaikan dengan konteks informan. Terhadap informan yang mungkin mengalami kesulitan dalam penggunaan istilah-istilah tertentu maka akan diupayakan mencari istilah sama yang dapat dimengertinya. Kegunaan dari wawancara ini adalah sebagai pelengkap metoda pengumpulan data lainnya.

Wawancara dilakukan terhadap responden dengan teknik purposive sampling yaitu dengan pemilihan responden sesuai dengan jenis informasi yang didapatkan.

Responden yang akan dijadikan narasumber terkait dengan pengelolaan pembangunan daerah. Beberapa pihak yang akan dijadikan sumber adalah pengambil dan penentu kebijakan, akademisi (diwakili oleh staf pengajar dari Fakultan Ekonomi dan Jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah) dan praktisi.

B Sumber Sekunder/instansional

Sumber sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, seperti tentang gambaran umum daerah penelitian. Selain itu studi dokumentasi juga dilakukan mendapatkan berbagai macam dokumen berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, kertas kerja, majalah ilmiah, bulletin, surat kabar, brosur-brosur yang berkaitan dengan tema penelitian. Studi dokumentasi juga dilakukan pada instansi-instansi terkait.

Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka, review peraturan, dan inventarisasi data-data publikasi dari dinas, lembaga, badan, yang terkait dengan analisis

C Observasi

Observasi merupakan metode survey dengan mengamati langsung melalui proses pemotretan yang telah ditentukan variabel dan batasan yang merumuskan pemantauan.

2.5.2 Metode Analisis

Metode analisis yang akan ditempuh dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Analisis statistik.
2. Analisis kebijakan.

1. Analisis Statistik

BAB 2. Pendekatan Teori, Konsep dan Metode Peunyusunan

Analisis Statistik merupakan metode yang berhubungan dengan penyajian dan penafsiran kejadian yang bersifat peluang dalam suatu penyelidikan terencana atau penelitian ilmiah.

Didalam analisis Statistik ada terbagi dalam dua pekerjaan yaitu :

a. Penyajian Data dan Informasi

   Data dan Informasi yang akan disajikan bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder. Untuk dapat mengolah data dan informasi didalam metode statistik, data dan Informasi mensyaratkan bentuk data numerik, untuk itu data Kategorik terlebih dahulu harus diubah ke bentuk numerik dengan memberi bobot pada setiap kategori dan kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan analisis.

   Agar analisis penelitian menghasilkan hasil yang benar, paling tidak ada empat tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui, yaitu:

   1) Editing

      Merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir atau kuesioner apaka jawaban dalam kuesioner itu sudah:

      a) Lengkap: semua (pertanyaan sudah terisi jawabannya)
      b) Jelas: jawaban pertanyaan apakah tulisannya cukup jelas terbaca
      c) Relevan: jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pertanyaannya
      d) Konsisten: apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan isi jawabannya konsisten, misalnya antara pertanyaan Usia denagn pertanyaan Jumlah anak. Bila dipertanyakan usia terisi 15 tahun dan dipertanyakan jumlah anak terisi 9, ini berarti tidak konsisten.

   2) Koding

      Koding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka/bilangan. Misalnya untuk variabel pendidikan dilakukan koding 1=SD, 2=SMP, 3=SMU, 4+PT. Jenis kelamin: 1=laki-laki dan 2=perempuan, dsb. Kegunaan koding adalah untuk mempermudah pada saat analisis data dan mempercepat pada saat entri data.

   3) Proccessing

Setelah seluruh data terisi penuh dan benar, dan sudah melewati pengkodingan, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis. Pemprosesan data dilakukan dengan cara mengentri data kuesioner ke paket komputer. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk pemprosesan data denagn masing-msing kelebihan dan kekurangannya. Salah satu paket program yang sering digunaka untuk entri data adalah paket program SPSS for Window. (Statistical Program for Sosial Science)

4) Cleaning

Cleaning (pembersihan data) merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dientri apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut kemungkinan terjadi pada saat kita mengentri data ke komputer. Misalnya untuk data pendidikan ada variabel yang bernilai 7, mestinya berdasarkan koding yang ada, pendidikan kodenya hanya 1 s/d 4.

Salah satu alasan diperlukannya statistik adalah generalisasi akan parameter suatu populasi yang dapat diambil dengan hanya meneliti sebagian kecil anggota populasi (sampel). Generalisasi ini bukan tanpa kesalahan, tetapi secara statistik, kesalahan generalisasi dan hal lain yang berhubungan dengan sampel, pengambilan data, rumus (perhitungan) dan lain-lain selalu dapat diprediksi.

b. Penafsiran Data dan Informasi

Setelah selesai melakukan pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah data dianalis. Data mentah (raw data) yang sudah susah payah kita kumpulkan tidak akan ada artinya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analis data lah data dapat mempunyai arti/makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian.

Teknik statistik mampu melakukan tiga tugas penting dalam ilmu pengetahuan, yaitu menerangkan gejala, meramalkan kejadian dan mengontrol keadaan.

Statistik deskriptif merupakan bagian statistik yang memikul tugas untuk menerangkan suau gejala. Statistik inferensia merupakan bagian laindari statistik yang membuat ramalan dan mengontrol kejadian.

Metode Statistika adalah prosedur-prosedur atau cara-cara penyajian dan penafsiran data.

Penyajian data meliputi : pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan dan penyajian data (data collection, organization, summarization, presentation).

Penafsiran data meliputi : pendugaan, pengujian dugaan dan penarikan kesimpulan (generalisasi).

Pada umumnya analisis data bertujuan untuk:

1) Memperoleh gambaran/deskripsi masing-masing variabel
2) Membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan
3) Menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan
4) Mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu.

Analisis data mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Namun perlu dimengerti bahwa dengan melakukan analisis tidak dengan sendirinya dapat langsung menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Menginterpretasikan berarti kita menggunakan hasil analisis guna memperoleh arti/makna.

Interpretasi mempunyai dua bentuk, yaitu: arti sempit dan arti luas. Interpretasi dalam arti sempit (deskriptif) yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedang interpretasi dalam arti luas (analik) yaitu interpretasi guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan/menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga melakukan intervensi (generalisasi) dari data yang diperoleh denagn teori-teori yang relevan denagn hasil-hasil penelitian tersebut.

Langkah-langkah analisis yang digunakan untuk pendekatan kuantitatif antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif (Univariat)

   Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan/mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Bentuknya tergantung dari jenis datanya. Untuk data numerik digunakan nilai rata-rata (mean), median, standar deviasi dan inter kuartil range, minimal dan maksimal.

2. Analisis Analitik

   a. Analisis Bivariat

      Setelah diketahui karakteristik masing-masing variabel dapat diteruskan analisis yang lebih lanjut. Apabila analisis hubungan antara dua variabel, maka analisis dilanjutkan pada tingkat bivariat. Misalnya ingin diketahui hubungan antara berat badan denagn tekanan darah. Untuk mengetahui hubungan dua variabel tersebut biasanya digunakan pengujian statistik. Jenis uji statistik yang digunakan sangat tergantung pada jenis data/variabel yang dihubungkan.

   b. Analisis Multivariat

      Merupakan analisis yang menghubungkan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

2. Analisis Kebijakan

Tujuan digunakannya analisis kebijakan adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan penilaian yang beralasan dalam merumuskan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi pada Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.

Analisis Kebijakan adalah disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi-informasi kebijakan agar dapat digunakan secara politis. Untuk menyelesaikan masalah kebijakan.

Lima kombinasi metode yang biasa digunakan pada analisis kebijakan antara lain adalah :

a. Deskriptif,
   Merupakan metode yang bersifat monitoring yang menghasilkan informasi sebab dan akibat kebijakan yang lalu
b. Prediktif
   Merupakan metode yang bersifat forecasting yang meramalkan akibat suatu kebijakan dimasa mendantang
c. Evaluatif
   Merupakan metode yang bersifat evaluation yang memberikan informasi tentang manfaat suatu kebijakan
d. Preskriptif
   Merupakan metode yang bersifat recommendation dan pertanyaan advokatif yang memberikan informasi tentang kemungkinan bahwa serangkaian tindakan yang akan datang akan mendatangkan manfaat yang bernilai
e. Perumusan masalah
   Perumusan masalah menjadi dasar dalam melakukan pengkajian-pengkajian

Didalam melakukan analisis kebijakan harus mempunyai kepekaan terhadap masalah dan kepekaan adanya solusi terhadap masalah tersebut.

Pada prinsipnya analisis kebijakan merupakan pengkajian praktis yang akan menghasilkan kesimpulan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut

Gambar 2.12 Analisa Kebijakan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral

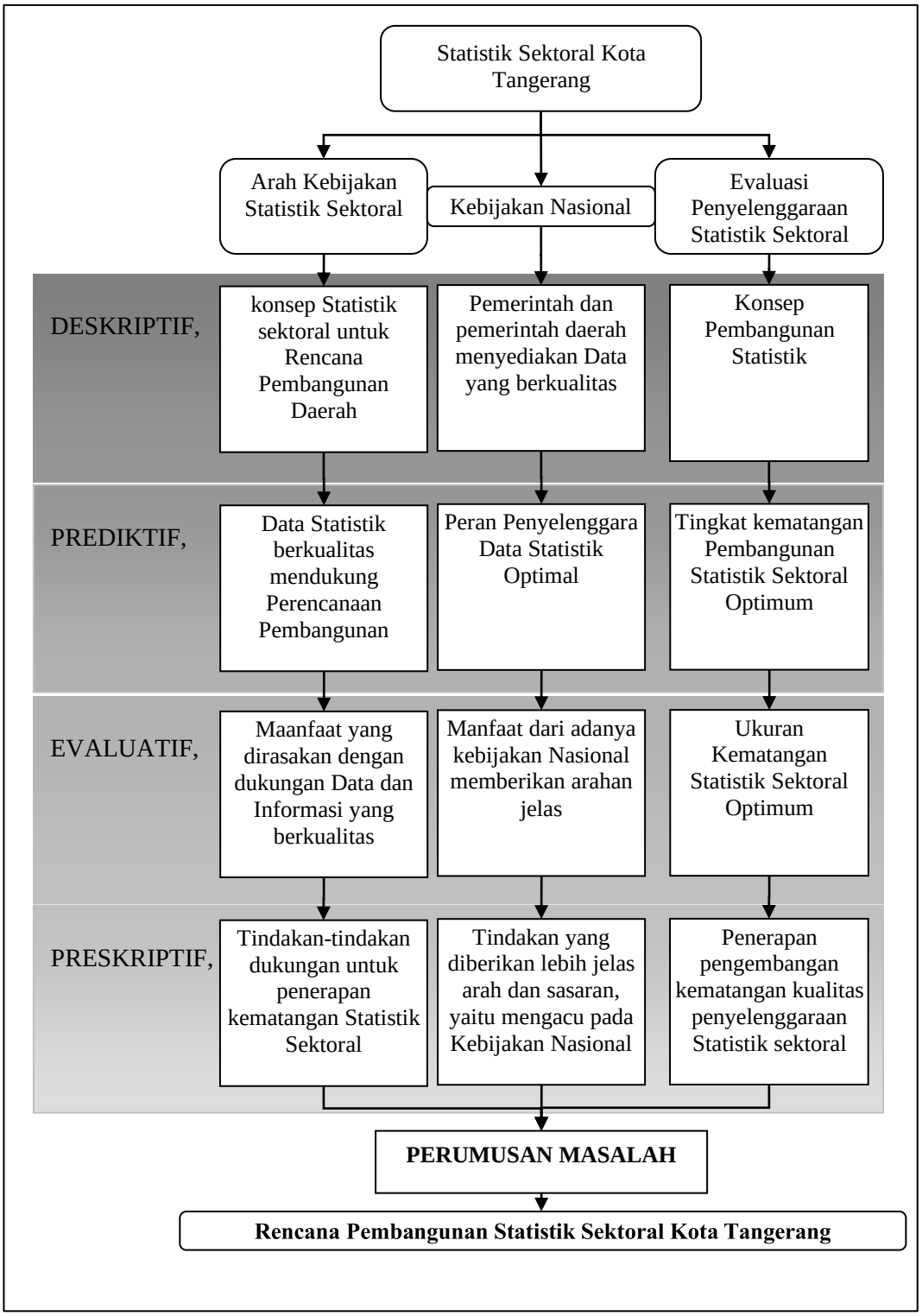

2.5.3 Proses Analisis

Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang Lokalis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud adalah dimana kegiatan kajian itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu Rasional, Empiris, dan Sistematis.

Pekerjaan Penyediaan Jasa Konsultansi Pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK: Penyusunan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang merupakan analisis kualitatif. Moleong (2001:27) menekankan bahwa analisis kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan. Mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, dan lebih mementingkan proses daripada hasil.

Analisis deskriptif oleh Sumanto (1995:8) disebut kegiatan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau gagasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek analisis pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat perseorangan, lembaga dan sebagainya.

Tahapan Analisis

A Kerangka Kerja Logis

Kerangka kerja logis adalah alat untuk perencanaan, monitoring, dan Evaluasi, kerangka kerja logis membutuhkan pengetahuan dan informasi yang cukup terkait

fenomena/persoalan tertentu sehingga model Logframe mampu digunakan sebagai alat perencanaan.

Kerangka kerja logis merupakan metode dengan pendekatan :

1. berpikir struktur

   pendekatan berpikir struktur adalah berpikir dengan pendekatan unsur pembentuk fenomena/masalah/gejala

2. berpikir sistem.

   Pendekatan berpikir sistem adalah berpikir dengan pendekatan dengan menggunakan sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan fenomena yang telah terdefinisikan struktur pembentuknya.

   Paradigma dalam berpikir sistem adalah suatu perubahan perilaku attau dinamika dimunculkan oleh suatu struktur.

   Esensi berpikir sistem antara lain.

   a. melihat hubungan saling-bergantung (dipengaruhi dan mempengaruhi atau umpan-balik atau interdependent), bukan hubungan sebab-akibat searah
   b. melihat adanya proses-proses perubahan (proses yang berlanjut, ongoing processes), bukan potret-potret sesaat

   Pendekatan Berpikir Sistem Bersifat “Non-Linier” Namun Implementasinya Dalam Kerangka Kerja Logis Dilakukan Bersifat “Linier”, Karena Suatu Proses Pelaksanaan Program-Kegiatan Tidak Memungkinkan Berlangsung “Non-Linier”, Melainkan Harus Melalui Pentahapan Secara Berurutan.

   Cara berpikir sistem membantu identifikasi masalah lebih tajam, sehingga rumusan kebijakan dalam perencanaan strategik lebih *robust* dalam menjawab permasalahan.

mengharuskan berpikir terstruktur dan tersistem = dapat menghubungkan kegiatan-investasi-hasil, dapat digunakan untuk menetapkan indikator kinerja dan pengalokasikan tanggung jawab, dapat digunakan sebagai sarana untuk

berkomunikasi dengan tepat dan jelas, dapat juga digunakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dapat memperhitungkan risiko.

Analisis logis yang digunakan antara lain:

1. Analisis logis vertikal

   Analisis vertikal dilakukan menjelaskan mengapa dan bagaimana project akan dilakukan dalam mencapai target secara bertingkat

2. Analisis logis horizontal

   Analisis horizontal dilakukan untuk menjelaskan prasyarat apa yang dibutuhkan supaya setiap kegiatan dapat dilakukan

Gambar 2.13 Kerangka Kerja Logis Dalam Perencanaan

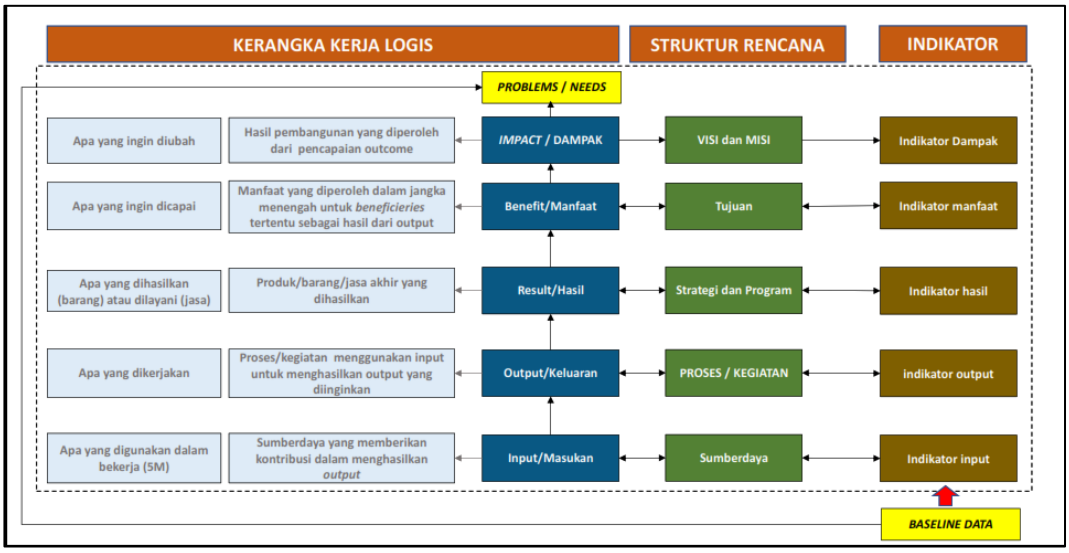

Tabel 2-2 Matriks Kerangka kerja Logis

Objective Hierarchy/Intervention Logic		Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVI)	Sources and Means of Verification (MOV)	Assumptions
Impact/Dampak	apa yang ingin diubah	indikator yang menunjukkan kondisi perubahan yang diinginkan	Alat/sumber informasi/data yang digunakan untuk menjelaskan indikator dan sasaran kinerja pada kolom	asumsi-asumsi terpenting yang mengikuti tujuan disetiap tingkatan. Merpakan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi
Outcome/Hasil	apa yang ingin dicapai	indikator yang menunjukkan kondisi yang ingin dicapai		

Objective Hierarchy/Intervention Logic		Objectively Verifiable Indicators of Achievement (OVI)	Sources and Means of Verification (MOV)	Assumptions
Output/Keluaran	apa yang dihasilkan	indikator yang menunjukkan kondisi tercapainya dari suatu keluaran		pencapaian tujuan indikator dan sasaran kinerja disemua tingkatan
Proses/Kegiatan	apa yang dikerjakan	indikator yang ingin dicapai		

Matrik kerangka Kerja Logis Pada logika vertikal:

- Jika kegiatan/input tersedia dan asumsi benar, maka output dihasilkan
- Jika output dihasilkan dan asumsi benar, maka hasil tercapai
- Jika hasil tercapai dan asumsi benar maka dampak terwujud
- Kelengkapan asumsi sebagai justifikasi dalam melihat kualitas keterkaitan indikator Output-Outcome-Impact
- Jika asumsi tidak diketahui, maka akan sulit melihat kualitas indikator Output-Outcome-Impact

Pada logika vertikal, hubungan jika-maka akan lebih kuat jika didasarkan pada:

- Kearifan lokal
- Berfirkir sistem
- Hasil evaluasi
- Penelitian dan bukti
- Praktik-praktik baik di lapangan

Matrik kerangka Kerja Logis Pada logika horizontal:

- Pelaksanaan suatu kegiatan akan mencapai keluaran yang harus terukur ditunjukkan oleh indikator kinerja dan dibuktikan dengan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis oleh berbagai sumber data yang dapat dipercaya.
- Hasil yang dicapai dari suatu program dan kegiatan harus dibuktikan oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dipercaya.

- Dampak dari suatu program harus dapat diuji melalui oleh berbagai indikator kinerja yang diperoleh dari berbagai sumber data yang dapat dipercaya.

Gambar 2.14 Logika Vertikal dan Horizontal

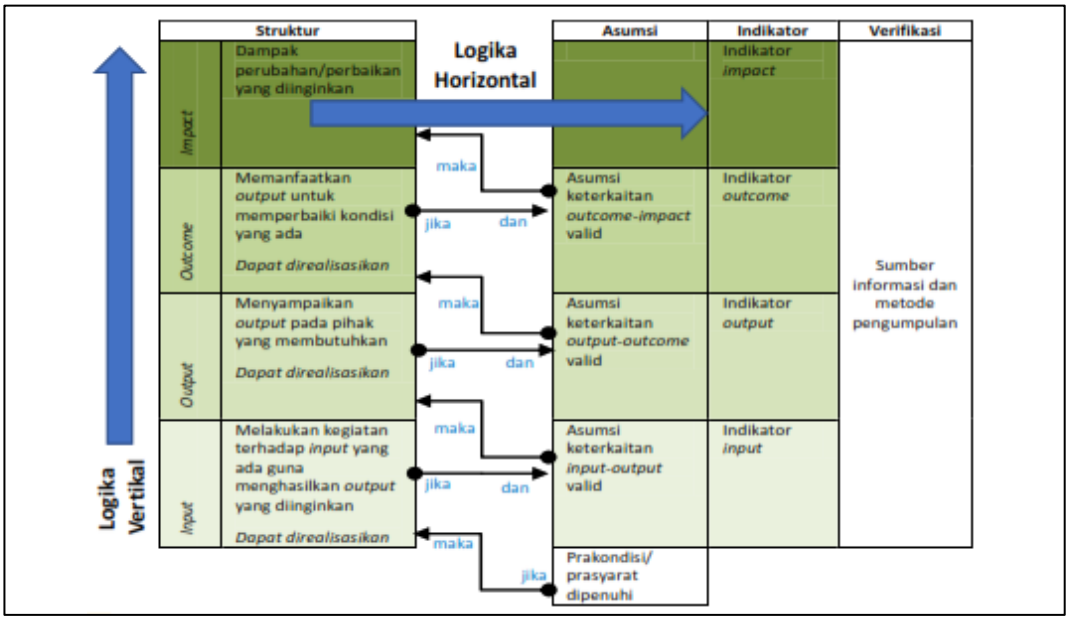

B Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan hasil tabulasi data primer untuk memberi gambaran tentang kondisi eksisting dan karakteristik. Analisis deskriptif menggunakan penjelasan secara grafis dan memetakan dengan tabel dengan menghitung secara statistik distribusi frekuensi, mean, simpangan dan lain-lain.

C Pendekatan Sistem

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dalam konteks perumusan rencana zona dan sistem prasarana pada kawasan sentra industri kecil menengah maka pendekatan wilayah administratif meliputi batas administratif desa dan kecamatan yang menjadi lokasi kajian.

D Analisa Peraturan Perundang-undangan

Analisa peraturan perundang-undangan melalui Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. enelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengatur perbankan syariah, khususnya sistem pembiayaan murabahah. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)

Metode Pendekatan atau pola pemikiran secara ilmiah dalam analisa yuridis normatif digunakan metode pendekatan yang meliputi:

1. Conceptual Approach

   Conceptual Approach atau Pendekatan Konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
2. Statute Approach

   Metode Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

E Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas pemerintah kota dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk pengaturan serta organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

Analisis diharapkan menghasilkan beberapa bentuk dan operasional kelembagaan terlibat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian operasoinalisasi. Analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kajian

F Proses Bisnis Statistik

Proses bisnis Statistik dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

1. Perencanaan Data
    a. Identifikasi Kebutuhan
    b. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
    c. Standar data
    d. Rancangan Implementasi rancangan
2. Pengumpulan Data
    a. Pengumpulan
3. Pemeriksaan data
    a. Proses
    b. Analisis
4. Penyebarluasan Data
    a. Desiminasi
    b. Penyusunan dan Pelaporaon metadata statistik
    c. Evaluasi

BAB. 3 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Perumusan permasalahan pembangunan statistik merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan terhadap arah pembangunan statistik yang akan ditentukan, maka perumusan masalah dengan melihat tingkat kematangan Domain, Aspek dan Indikator dari capaian indeks pembangunan statistik, Indeks Domain dan Indeks Aspek dari nilai evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Tangerang Tahun 2023.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan Statistik adalah untuk mengidentifikasi Domain dan Aspek yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja penyelenggaraan statistik sektoral Kota Tangerang dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya

Pada Bab ini diuraikan Potensi, Masalah dan Tantangan yang akan mempegaruhi penentuan pada tahap perencanaan dengan pemahaman sebagai berikut:

1. Potensi
   Potensi merupakan kondisi yang dimiliki yang menjadi kekuatan dalam mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Masalah
   Merupakan gap antara keadaan sekarang dengan kinerja yang diharapkan
3. Tantangan
   Tantangan merupakan keinginan capaian kinerja yang diharapkan menjadi tantangan Kota Tangerang untuk mencapainya

Tantangan merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang yang menjadi Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini,

namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Potensi dan Permasalahan didasarkan pada penilaian domain penyelenggaraan dan aspek penyelenggaraan Statistik di Kota Tangerang dari Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 Pemerintah Kota Tangerang yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Berikut penilaian hasil evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 Pemerintah Kota Tangerang disertai dengan target Tahun 2024 pada Tabel 3-1 berikut:

Tabel 3-1 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 dan Target Nilai Tahun 2024 Pemerintah Kota Tangerang

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Nilai Evaluasi BPS 2023	Target Nilai 2024
1	Prinsip SDI	101	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	3	4
		102	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	3	4
		103	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	3	4
		104	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	3	4
2	Kualitas Data	201	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	3	4
				Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	2	3
				Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	2	3
		202	Akurasi	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	1	2

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Nilai Evaluasi BPS 2023	Target Nilai 2024
		203	Aktualitas dan Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	1	2
				Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	3	4
		204	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	3	4
				Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	3	4
				Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	3	4
		204	Keterbandingan dan Konsistensi	Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	2	3
				Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	3	4
3	Proses Bisnis Statistik	301	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Desain Statistik	3	4
				Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	3	4
				Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data	3	4
		302	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	2	3
		303	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Analisis Data	2	3
				Tingkat Kematangan Diseminasi Data	3	4
		304	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	3	4
4	Kelembagaan	401	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	3	4
				Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	3	4
				Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	3	4
				Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	2	3

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Nilai Evaluasi BPS 2023	Target Nilai 2024
		402	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	2	3
				Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	3	4
		403	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data	4	5
				Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	3	4
				Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data	3	4
				Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	3	4
5	Statistik Nasional	501	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	3	4
				Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	2	3
				Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	1	2
		502	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	2	3
		503	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	3	4
				Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data	1	2

Sumber : BPS Kota Tangerang

Potensi, Permasalahan dan Tantantang Berdasarkan Domain, Aspek dan Indikator Aspek Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3-2 Domain Penyelenggaraan, Aspek, Indikator Aspek Statistik Sektoral, Potensi, Permasalahan dan Tantangan

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
1	Prinsip SDI	101	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	Penerapan SDS dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penerapan SDS dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
		102	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	Penerapan Metadata Statistik dilakukan berdasarkan kaidah berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penerapan Metadata dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
		103	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	Penerapan Interopebalitas Data antar unit kerja telah dilakukan berdasarkan kaidah berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penerapan Interoperabilitas data dilakukan revieu dan evaluasi berkala dan dilakukan pemutakhiran
		104	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	Penerapan Kode Referensi berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Diterapkannya kode referensi dilakukan oleh seluruh Produsen Data sesuai standar/kaidah untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
2	Kualitas Data	201	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	Relevansi Data terhadap pengguna telah diidentifikasi berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Relevansi data didasrkan prosedur baku untuk seluruh produsen data, data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran

Domain	Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
			Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Proses identifikasi kebutuhan data dilakukan berdasarkan prosedur baku yang yang berlaku pada masing-masing produsen data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Identifikasi kebutuhan data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
	202	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	Penilaian akurasi data dilakukan setiap produsen data sesuai standar masing-masing	prosedur baku belum ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data	Penilaian akurasi data dilakukan sesuai standar data yang berlaku untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
	203	Aktualitas dan Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	penjaminan aktualitas data dilakukan belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	Prosedur baku belum ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data	Kematangan Penjaminan Aktualitas Data ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
			Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Pemantauan ketepatan waktu diseminasi belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	prosedur baku belum ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data	Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasiditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
		204	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Penjaminan ketersediaan data telah dilakukan produsen data berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	prosedur baku belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data telah dilakukan produsen data berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku seluruh produsen data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Akses Media Penyebarluasan Datadilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	Penjaminan penyediaan format data telah dilakukan produsen data berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku seluruh produsen data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penyediaan Format Datadilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
		205	Keterbandingan dan Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	Penjaminan keterbandingan data telah dilakukan produsen data berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku seluruh produsen data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Keterbandingan Data ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	Penjaminan Konsistensi Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	Penjaminan konsistensi statistik belum dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan	Diterapkannya Konsistensi Statistik sesuai standar/kaidah untuk seluruh produsen data, dilakukan

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
						dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
3	Proses Bisnis Statistik	301	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Pendefinisian Kebutuhan Statistik telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Pendefinisian Kebutuhan Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Desain Statistik	Penerapan Desain Statistik telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Desain Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	Penyiapan Instrumen telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penyiapan Instrumen dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
		302	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data	Pengumpulan Data/ Akuisisi Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	Belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
		303	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	Pengolahan Data telah dilakukan oleh setiap Produsen	Pengolahan Data belum dilakukan berdasarkan prosedur baku yang	Pengolahan Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
					Data sesuai standarnya masing-masing	ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Analisis Data	Proses Analisis Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	Proses Analisis Data belum dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	Analisis Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
		304	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	Proses Data telah dilakukan oleh Walidata berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Diseminasi Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
4	Kelembagaan	401	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penjaminan Netralitas dan Obyjektivitas terhadapPenggunaan Sumber Data dan Metodologi dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penjaminan Kualitas Data dilakukan revieu dan

Domain	Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
				berlaku untuk seluruh Produsen Data		evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
			Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk informasi (TI) untuk memastikan keamanan data seluruh produsen Data	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
	402	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai dengan perencanaan	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik belum dilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
			Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai dengan perencanaan	Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data belum dilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
	403	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah dilaksanakan oleh tim dan dibentuk secara formal	belum dikoordinasikan dengan BPS dan belum dilakukan review dan evaluasi berkala	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
				Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data	Walidata/Walidata pendukung telah melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan/ disepak:ati dalam Forum Satu Data Indonesia dan berkolaborasi dengan Walidata lain atau Pembina Data Statistik	hasil revieu dan evaluasi belum ditindak lanjuti	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
				Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan Pembina Data Statistik telah dilakukan secara formal	Belum dilakukan reviu dan evaluasi berkala	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data	Tugas/program kerja Walidata telah dilakukan seluruhnya	belum dikoordinasikan dalam forum SDI dan belum di reviu dan evaluasi secara berkala	Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
5	Statistik Nasional	501	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data bersama Walidata untuk kepentingan Instansi Pusat /Pemerintahan Daerah/Nasional.	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Domain	Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
			Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data bersama Walidata sesuai kepentingan Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
			Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Sosialisasi Data Statistik kepada publik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	Sosialisasi Data Statistik kepada publik yang belum dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
		502 Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	pelaksanaan kegiatan survey statistik	Pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS belum dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data	Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
		503 Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	Perencanaan Pembangunan Statistik di lnstansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah disusun dan ditetapkan	Perencanaan Pembangunan Statistik di lnstansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah disusun dan ditetapkan belum dilaksanakan	Diterapkannya Perencanaan Pembangunan Statistik sesuai standar/kaidah untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
			Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh Walidata untuk	belum dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	Penyebarluasan Data dilakukan revieu dan

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Potensi	Permasalahan	Tantangan
					kepentingan Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah		evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran
				Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data		Pemanfaatan Big Data dalam kegiatan Statistik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	Diterapkannya Pemanfaatan Big Data sesuai standar/kaidah untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran

BAB. 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI

Kondisi pembangunan statistik sektoral Kota Tangerang menjadi dasar untuk menentukan Visi dari Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

Visi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang juga memperhatikan Visi Renstra BPS, Visi Indonesia Emas 2025-2045 dan Visi Provinsi Banten 2025-2045.

Visi Renstra BPS 2020-2024

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah

"**Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju**"

Dalam visi tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

BAB 4. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Visi Indonesia Emas 2045

Pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjan Nasional 2025-2045 menjelaskan bahwa Penyusunan RPJPN dimulai dengan landasan pemikiran bahwa visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu, Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur yang dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar , megatren, global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjan Nasional 2025-2045 Visi Indonesia Emas 2045: **Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**.

Visi Provinsi Banten 2045

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2025-2045 menyampaikan dengan didasarkan Visi Indonesia Emas 2045 pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjan Nasional 2025-2045 bahwa Visi Provinsi Banten adalah **Banten Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan berlandaskan Iman dan Taqwa**

Visi Kota Tangerang 2045

Visi Kota Tangerang 2045 masih berdasarkan Rancangan Teknokratif RPJPD 2025-2045 mengacu Visi Provinsi Banten 2045 pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045 pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjan Nasional 2025-2045 bahwa Visi Kota Tangerang adalah **Kota Tangerang Maju dan Berkelanjutan**

BAB 4. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Visi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

Dengen mengacu pada Visi Renstra BPS 2020-2024, Visi Provinsi Banten 2045 pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045 pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjan Nasional 2025-2045 dan Visi Kota Tangerang masih berdasarkan Rancangan Teknokratif RPJPD 2025-2045 visi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang Kota Tangerang adalah **Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk Kota Tangerang Maju dan Berkelanjutan** sebagaimana padaTabel 4-1 berikut.

Tabel 4-1 Perumusan Visi

Visi		Visi Perencanaan Statistik Sektoral
Visi Renstra BPS	Penyedia Data Statistik **Berkualitas** untuk Indonesia Maju	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk Kota Tangerang Maju dan Berkelanjutan
Visi Indonesia Emas 2045	Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	
Visi Banten 2045	Banten **Maju**, Sejahtera, dan Berkeadilan berlandaskan Iman dan Taqwa	
Visi Kota Tangerang 2045	Kota Tangerang **Maju** dan **Berkelanjutan**	

Visi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang merupakan harapan ketercapaian pembangunan statistik sektoral Kota Tangerang yang mutakhir dengan Data yang berkualitas, proses bisnis yang Prima dengan SDM yang Unggul dan Adaptif sebagaimana terlihat pada Tabel 4-2 berikut.

Tabel 4-2 Penjelasan Visi Perencanaan Statistik Sektoral Kota Tangerang

Visi Perencanaan Statistik Sektoral	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk Kota Tangerang Maju dan Berkelanjutan	
Mutakhir	Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang berkesinambungan
Data yang Berkualitas	Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan ketepatan waktu, Aksesibilitas, dan Keterbandingan dan Konsitensi
Prima	Proses Bisnis Statistik yang Prima
Unggul dan Adaptif	SDM yang Profesional dan berkemampuan yang Responsif terhadap perkembangan teknologi

4.2 Misi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

Dari Visi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang yang merupakan harapan untuk pencapaian Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang yang bersifat Strategis perlu dituangkan dalam harapan capaian bersifat taktis melalui misi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang. Penuangan Misi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang merupakan keterkaitan langkah taktis pencapaian Visi dengan berlandaskan isu Strategis Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

Misi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang antara lain:

1. Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral
2. Pengembangan Kapabilitas Statistik Sektoral
3. Peningkatan Kapasitas Statistik Sektoral

Tabel 4-3 Keterkaitan dari Domaiin,Aspek, Indikator Aspek Statistik Sektoral dengan misi

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Tantangan	Misi
1	Prinsip SDI	101	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	Penerapan SDS dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	Pengembangan Kapabilitas Statistik Sektoral
		102	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	Penerapan Metadata dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		103	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	Penerapan Interoperabilitas data dilakukan revieu dan evaluasi berkala dan dilakukan pemutakhiran	
		104	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	Diterapkannya kode referensi dilakukan oleh seluruh Produsen Data sesuai standar/kaidah untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
2	Kualitas Data	201	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data	Relevansi data didasrkan prosedur baku untuk seluruh produsen data, data	

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Tantangan	Misi
				Terhadap Pengguna	dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Identifikasi kebutuhan data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		202	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	Penilaian akurasi data dilakukan sesuai standar data yang berlaku untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		203	Aktualitas dan Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	Kematangan Penjaminan Aktualitas Data ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasiditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		204	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	Akses Media Penyebarluasan Datadilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	Penyediaan Format Datadilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		205	Keterbandingan dan Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	Keterbandingan Data ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Tantangan	Misi
				Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	Diterapkannya Konsistensi Statistik sesuai standar/kaidah untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
3	Proses Bisnis Statistik	301	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Pendefinisian Kebutuhan Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Desain Statistik	Desain Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	Penyiapan Instrumen dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		302	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data	Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data, , dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		303	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	Pengolahan Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Analisis Data	Analisis Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		304	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	Diseminasi Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
4	Kelembagaan	401	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	Peningkatan Kapasitas Statistik Sektoral
				Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan	Penjaminan Netralitas dan Obyjektivitas terhadapPenggunaan Sumber Data dan Metodologi dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Tantangan	Misi
				Sumber Data Metodologi		
				Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Kualitas Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		402	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		403	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral
				Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	
				Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data	Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
5	Statistik Nasional	501	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan /	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Tantangan	Misi
				atau Penyusunan Kebijakan		
				Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		502	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Statistik dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
		503	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	Diterapkannya Perencanaan Pembangunan Statistik sesuai standar/kaidah untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	Penyebarluasan Data dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	
				Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data	Diterapkannya Pemanfaatan Big Data sesuai standar/kaidah untuk seluruh produsen data, dilakukan revieu dan evaluasi berkala serta dilakukan pemutakhiran	

4.3 Tujuan Dan Sasaran

Dari Misi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang mempunyai tujuan untuk mendapatkan sasaran pencapaian Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang

Tabel 4-4 Misi, Tujuan Dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Pengembangan Kapabilitas Statistik Sektoral	Meningkatkan Kapabilitas proses data sektoral	Meningkatnya proses data sektoral sesuai dengan prinsip SDI
		Meningkatnya Kualitas Data yang relevan terhadap pengguna, Akurat, aktual, tepat waktu, mudah di akses, dapat dibandingkan dan konsisten
		Meningkatnya kapabiltas kelembagaan dalam Proses Bisnis data Statistik Sektoral terpadu, terukur dan berkesinambungan
Peningkatan Kapasitas Statistik Sektoral	Meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional, memadai dan kapabel
Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral	meningkatkan kualitas proses tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral secara berkesinambungan	meningkatnya pengorganisasian statistik
		meningkatnya tata kelola statistik sektoral yang mendukung sistem statistik nasional

BAB. 5 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN ROADMAP PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang merupakan arah pada pencapaian dari visi Misi untuk menguraikan tahapan pada roadmap Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

Strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Kota Tangerang dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan statistik sektoral disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan dalam evaluasi penyelenggaraan Statistik.

Serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat dalam mencapai target Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang .

Penjelasan mengenai arah kebijakan melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan statistik sektoral.

BAB 5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Roadmap Pembangunan Statistik Sektoral

Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang dapat dilihat pada Tabel 5-1 berikut

Tabel 5-1 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya proses data sektoral sesuai dengan prinsip SDI	Peningkatan Prinsip Satu Data Indonesia	Data Statistik yang dihasilkan merujuk pada satu standar data pada regulasi standar data statistik nasional (SDSN)
	Membanguna Metadata Statistik Sektoral yang Matang	Metadata dengan informasi metadata mengikuti struktur dan format baku BPS
	Standarisasi Metadata dapat berbagi pakai secara terintegrasi	Setiap Data yang dihasilkan mampu dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi
	Penerapan Kode Referensi Metadata yang terdefinisi, terpadu, terukur dan optimum	kode referensi/data induk dilakukan dengan bridging/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dan kode wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang dapat diakses
Meningkatnya Kualitas Data yang relevan terhadap pengguna, Akurat, aktual, tepat waktu, mudah di akses, dapat dibandingkan dan konsisten	Peningkatan relevansi data statistik yang dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna	Identifikasi relevansi data terhadap pengguna
		identifikasi dan analisa kebutuhan pengguna
	Peningkatan Penilaian akurasi data dengan mekanisme dan sistem yang tepat	menyediakan mekanisme/sistem untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data dan output statistik
	Penerapan penjaminan dan pemantauan kecepatan data tersedia dan ketepatan jadwal rilis data bagi pengguna data	pembuatan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh OPD
		pemantauan ketepatan waktu (kesesuaian jadwal rilis dan waktu rilis
	Peningkatan Ketersediaan data untuk penggunaan data dan akses media penyebarluasan	Publikasi data statistik, digunakan, dan disebarluaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku
		Penyebarluasan statistik dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk semua pengguna
		mereview dan evaluasi efektifitas dan ketepatan penyediaan format data

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		yang memberikan kemudahan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik
	Peningkatan keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah dengan prosedur yang memastikan data statistik yang dihasilkan konsisten	penerapan keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah
		setiap data yang dihasilkan harus selaras dengan data-data sumber lain.
Meningkatnya kapabiltas kelembagaan dalam Proses Bisnis data Statistik Sektoral terpadu, terukur dan berkesinambungan	Peningktaan perencanaan data melalui proses menentukan kebutuhan data dan rancangan kegiatan statistik dan rancangan instrumen yang teruji	meningkatkan proses menentukan kebutuhan data berdasar tujuan yang ingin dicapai
		memastikan proses pembuatan rancangan kegiatan statistik dengan tepat
		memastikan pembangunan dan pengujian isntrumen yang dirancang dibangun sudah cukup baik digunakan
	Peningkatan pencarian data/informasi/akuisisi dari sumber lain pada proses statistik	menentukan prosedur baku Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data ditetapkan dan berlaku seluruh OPD dalam rangka peningkatan kualitas data
	Peningkatan pemeriksaan data dengan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan dan analisis data yang dihasilkan dari proses statistik	memastikan proses pengolahan data yang sudah dikumpulkan menghasilkan data yang dibutuhkan
		memastikan proses tahapan kegiatan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik seluruh OPD
	peningkatan penyebaran informasi yang dapat termanfaatkan	memastikan proses penyebaran informasi termanfaatkan dengan baik
Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional, memadai dan kapabel	Peningkatan Profesionalitas dalam menetapkan hak pengguna data memanfaatkan data statistik, menjamin data/informasi yang objektik, memberikan	memastikan profesionalitas SDM OPD pada penjaminan transparasi informasi statistik

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	informasi kuualitas data dan penjaminan konfidensialitas data	
		memastikan profesionalitas SDM OPD dalam penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi
		memastikan profesionalitas SDM OPD dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
		memastikan profesionalitas SDM OPD dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
	Pemenuhan kompetensi SDM Bidang Statistik dan manajemen data	memastikan profesionalitas SDM OPD Bidang Statistik
		memastikan profesionalitas SDM OPD bidang manajemen data
meningkatnya pengorganisasian statistik	meningkatnya kapasitas pengorganisasian statistik dengan kolaborasi pada tahap penyelenggaraan melalui forum satu data, peran tugas walidata dengan pembina data statistik	memastikan tahap penyelenggaraan kegiatan statistik terkolaborasi dengan baik
		Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pembina data untuk penyelenggaraan Forum Satu Datai Kota Tangerang
		meningkatkan kolaborasi terkait dengan pembangunan/pengembangan data dengan BPS
		meningkatkan tugas Kominfo sebagai walidata
meningkatnya tata kelola statistik sektoral yang mendukung sistem statistik nasional	Peningkatan penggunaan Data Statistik dasar, sektoral. Sosialisasi dan data dan literasi data statistik	Meningkatkan kualitas penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan
		Memastikan penggunaan data statistik sektoral memenuhi kebutuhan OPD menyelenggarakan tugas pokok OPD
		meningkatkan sosialisasi dan literasi data statistik OPD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Pelaksanaan kegiatan statistik mengikuti rekomendasi BPS	meningkatkan pelaksanaan hasil rekomendasi BPS terhadap kegiatan survei statistik
	Penguatan SSN melalui penyusunan perencanaan, penerapan perencanaan, Optimalisasi pemanfaatan Tangerang Satu data dan pemanfaatan big data untuk mendukung data statistik yan dihasilkan	melaksanakan Perencanaan Pembangunan Statistik yang menerapkan SDI
		meningkatkan penyebarluasan data melalui portal tangerang satu
		melaksanakan pemanfaatan big data dengan optimum

5.2 ROADMAP RENCANA PEMBANGUNAN STATISTIK SEKTORAL KOTA TANGERANG

Roadmap Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang adalah sebagai berikut

Tabel 5-2 Roadmap Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang Tahun 2024-2028

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
Data Statistik yang dihasilkan merujuk pada satu standar data pada regulasi standar data statistik nasional (SDSN)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Standar Data Statistik	mengukur Data Statistik yang dihasilkan sudah merujuk dan berkesesuaian SDSN beserta rekomendasi perbaikan dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi	2	2	2	2	2
Metadata dengan informasi metadata mengikuti struktur dan format baku BPS	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Penyusunan dokumen review dan evaluasi Metadata Statistik Sektoral pada tiap OPD	mengukur capaian Informasi dalam metadata dengan mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan BPS	Jumlah Dokumen review dan evaluasi Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (100% Metadata OPD terhimpun)	50%	100%			
Setiap Data yang dihasilkan mampu dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan dokumen review dan evaluasi Standarisasi Metadata untuk berbagi pakai	Standarisasi Metadata mengikuti kaidah interoperabilitas data, setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ko	Jumlah Dokumen review dan evaluasi Metadata Statistik Sektoral yang dapat berbagi pakai (100% Metadata OPD)	25%	50%	75%	100%	

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
					mposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan						
kode referensi/data induk dilakukan dengan bridging/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dan kode wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang dapat diakses	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan dokumen review dan evaluasi Kode Referensi Metadata Statistik Sektoral Pada OPD	Review dan Evaluasi berdasarkan: 1) referensi didasarkan kesepakatan forum satu data Indonesia 2021 dan forum SDI tematik 2021, 2) dilakukan bridging/relasi antar kode wilayah kerja statistik	Jumlah Dokumen review dan evaluasi Sektoral yang menggunakan kode referensi (100% penerapan kode referensi OPD berelasi antar kode wilayah kerja statistik)	25%	50%	75%	100%	
Identifikasi relevansi data terhadap pengguna	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan dokumen review dan evaluasi Identifikasi relevansi data statistik	1) Identifikasi kebutuhan pengguna, 2) analisis kebutuhan pengguna statistik, FGD dengan pengguna data, rekomendasi penentuan prioritas kebutuhan	Jumlah Dokumen review dan evaluasi Sektoral yang menggunakan kode referensi (100% penerapan kode referensi OPD berelasi antar kode wilayah kerja statistik)	25%	50%	75%	100%	

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
				melakukan monitoring dan evaluasi relevansi data OPD	monitoring dan evaluasi mengenai relevansi kebutuhan pengguna dan melakukan tindak lanjut perbaikan	Jumlah dokumen yang dibuat (persentase dokumen terhadap OPD)		25%	50%	75%	100%
identifikasi dan analisa kebutuhan pengguna	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Identifikasi dan analisis data statistik kebutuhan pengguna	1) Tinjauan Teori dan Kebijakan, 2) Identifikasi Kebutuhan Data untuk pengguna data, 3) Analisis Kebutuhan Pengguna 4) melakukan proses konsutasi terstruktur dengan stakeholder dan pengguna data, 5 Rekomendasi peningkatan kematantagan penilaian akurasi data	Jumlah dokumen yang dibuat (persentase dokumen terhadap OPD)	25%	50%	75%	100%	
menyediakan mekanisme/sistem untuk menilai dan memvalidasi sumber data,	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	Penyusunan SOP dan panduan akurasi data	SOP menilai dan validasi sumber data, itegrasi data dan output statistik	jumlah dokumen yang dibuat	1				

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
integrasi data dan output statistik	Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data Statistik Sektoral	dan Diseminasi Data Statistik Sektoral								
				Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan akurasi data	inventarisasi permasalahan, dan kesalahan data pada OPD	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			
				Penyusunan Revisi SOP dan panduan akurasi data	SOP menilai dan validasi sumber data, itegrasi data dan output statistik jika ditemukan permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan akurasi data	jumlah dokumen yang dibuat			1		
pembuatan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh OPD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Prosedur baku aktualitas dan ketepatan waktu data dan informasi dirilis	prosedur penyedia data terkait waktu, format dan alur pengiriman data, perhitungan akhir periode data sampai data dirilis	jumlah dokumen yang dibuat	1				
				Penyusunan Dokumen	diperolehnya permasalahan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
				review dan Evaluasi penerapan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	penerapan pada OPD						
				Penyusunan Revisi Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	jumlah dokumen yang dibuat			1		
pemantauan ketepatan waktu (kesesuaian jadwal rilis dan waktu rilis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Prosedur Baku SDM tiap OPD dalam Pemantauan ketepatan waktu diseminasi	Prosedur Baku SDM tiap OPD dalam Pemantauan ketepatan waktu diseminasi memiliki kalender liris untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis. Informasi ketepatan waktu	jumlah dokumen yang dibuat	1			100%	

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
					rilis tersedia untuk pengguna						
				Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Prosedur pemantauan ketepatan waktu Diseminasi	Identifikasi permasalahan penerapan pada OPD dan Rekomendasi perbaikan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			
				Penyusunan Revisi penerapan Prosedur pemantauan ketepatan waktu Diseminasi	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	jumlah dokumen yang dibuat			1		
Publikasi data statistik, digunakan, dan disebarluaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	1) publikasi statistik, penggunaan dan penyebarluasan sesuai dengan regulasi yang berlaku, 2) penyajian data	jumlah dokumen yang dibuat		1			

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
					disertai dengan metadata dan penjelasan teknis, 3) memudahkan interpretasi data statistik						
				Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Identifikasi permasalahan penerapan pada OPD dan Rekomendasi perbaikan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			
				Penyusunan Revisi Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan ketersediaan data untuk pengguna data	jumlah dokumen yang dibuat			1		
Penyebarluasan statistik dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk semua pengguna	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi pelaksanaan akses media	revie dan evaluasi antara laian: 1)katalog publikasi dan layanan lain yang tersedia, 2)cara penyebarluasan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
	Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data Statistik Sektoral		penyebarluasan data	statistik, 3) Penerapan regulasi terkait. 4) efektifitas unit pelayanan yang memberi bantuan pengguna dalam mengakses dan menginterpetasi data						
mereview dan evaluasi efektifitas dan ketepatan penyediaan format data yang memberikan kemudahan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penjaminan penyediaan format data	reviiw dan evaluasi dari 1) efektifitas tata letak dan kejelsan teks, tabel dan grafik. 2) efektifitas format yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			
penerapan keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan keterbandingan data	diperolehnya permasalahan definisi, klasifikasi dan metodologi yang menjadikan data	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
	Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data Statistik Sektoral			sulit untuk dibandingkan						
				Penyusunan Revisi Prosedur baku keterbandingan data	perbaikan definisi, klasifikasi dan metodologi agar dapat dibandingkan	jumlah dokumen yang dibuat			1		
setiap data yang dihasilkan harus selaras dengan data-data sumber lain.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan kajian SOP dan panduan penerapan konsistensi statistik Kota Tangerang	1) penerapan standar statistik. 2) menyelasaran data-dari dari sumber lain. 3) tersusunnya prosedur yang memastikan data statistik dihasilkan konsisten	jumlah dokumen yang dibuat					
meningkatkan proses menentukan kebutuhan data berdasar tujuan yang ingin dicapai	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan dokumen revie dan evaluasi pendifinisian kebutuhan statistik	mereview dan evaluasi fase pendifinisian kebutuhan statistik: 1) idintifikasi kebutuhan. 2) konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, 3) menentukan tujuan, 4)	Jumlah dokumen analisis	1				

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
					identifikasi konsep dan definisi, 5) pembuatan proposal kegiatan						
memastikan proses pembuatan rancangan kegiatan statistik dengan tepat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan dokumen revie dan evaluasi proses rancangan kegiatan statistik	mereviewdan evaluasi proses rancangan kegiatan statistik: 1) rancangan output. 2) rancangan deskripsi variabel, 3) rancangan pengumpulan data, 4) rancangan kerangka sampel dan pengambilan sampel, 5) rancangan pengolahan dan analisis, 6) rancangan sistem dan alur kerja	Jumlah dokumen analisis		1			
memastikan pembangunan dan pengujian isntrumen yang dirancang dibangun sudah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan dokumen revie dan evaluasi penyiapan instrumen	mereviewdan evaluasi penyiapan instrumen: 1) pengumpulan data. 2) komponen	Jumlah dokumen analisis		1			

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
cukup baik digunakan	Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data Statistik Sektoral			pengolahan dan analisis data, 3) komponen diseminasi data, 4) ralur kerja sesuai rancangan, 5) uji sistem dan instrumen, 6) uji proses bisnis statistik, 7) finalisasi sistem						
menentukan prosedur baku Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data ditetapkan dan berlaku seluruh OPD dalam rangka peningkatan kualitas data	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan prosedur baku Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data	Penyusunan prosedur baku Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data: 1)penyiapan kerangka sampel dan sampel terpilih, 2) pengumpulan data	Jumlah dokumen analisis/kajian		1			
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelatihan Peningkatan SDM OPD dalam pengumpulan data/akuisisi data	Pelatihan penyiapan pengumpulan data hingga finalisasi pengumpulan data	Jumlah SDM yang Meningkat kemapuannya dalam proses pengumpulan data/Akuisisi data (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)			50%	75%	100%

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
memastikan proses pengolahan data yang sudah dikumpulkan menghasilkan data yang dibutuhkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan SOP dan panduan Pengolahan Data	menyusun SOP dan Panduan Pengolahan Data terkait antara lain: 1) integrasi data 2) klasifikasi dan pemberian kode, 3) review dan validasi data, 4) penyuntingan dan imputasi, 5) perhitungan variabel turunanmenghitung penimbang, 7) data agregat, 8) finalisasi data	Jumlah dokumen yang dibuat		1			
				Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Pengolahan Data	Identifikasi permasalahan penerapan pengolahan data pada OPD dan Rekomendasi perbaikan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			
				Penyusunan Revisi penerapan Prosedur pengolahan data	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan	jumlah dokumen yang dibuat			1		

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
					Prosedur pengolahan data						
memastikan proses tahapan kegiatan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik seluruh OPD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan SOP dan panduan Analisis Data	Menyusun SOP dan Panduan pelaksanaan analisis data antara lain:: 1) tabulasi, 2) konsistensi antar tabel, 3) iterpretasi output, 4) penerapan Discolusre control, 5 Finalisasi	Jumlah dokumen yang dibuat		1			
				Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapanAnalisis Data	Identifikasi permasalahan penerapan Analisis Data pada OPD dan Rekomendasi perbaikan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi		1			
				Penyusunan Revisi penerapan Prosedur Analisis Data	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan Analisis Data	jumlah dokumen yang dibuat			1		

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
memastikan proses penyebaran informasi termanfaatkan dengan baik	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan dokumen revie dan evaluasi Diseminasi data OPD	mereview dan evaluasi diseminasi data OPD : 1) sinkronisasi data dengan metadata, 2) produk desiminasi, 3) manajemen rilis produk diseminasi, 4) manajemen user support	Jumlah dokumen yang dibuat (persentase dokumen terhadap OPD)		25%	50%	75%	100%
memastikan profesionalitas SDM OPD pada penjaminan transparasi informasi statistik	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Evalusasi SDM OPD pada transaransi informasi statistik	Evalusi SDM dalam melaksanakan 1)prosedur memastikan kerahasiaan data 2) menyediakan informasi yang berkaitan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik terbuka untuk publik, 3) informasi kebijakan diseminasi ke publik, 4)	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)	20%	40%	60%	80%	100%

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
					melaksanakan program kerja dan laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progres kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik							
				bimbingan teknik profesionalitas SDM OPD pada transparansi informasi statistik	meningkatkan kemampuan menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Transparansi Informasi Statistik (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)		25%	50%	75%	100%
memastikan profesionalitas SDM OPD dalam penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Evalusasi SDM OPD pada Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	Evalusi SDM dalam melaksanakan 1)Output statistik yang dihasilkan, 2)sumber, konsep definisi, metodologi dan proses menghasilkan diseminasi	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)	20%	40%	60%	80%	100%

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
				bimbingan teknik profesionalitas SDM OPD pada Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	meningkatkan kemampuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)		25%	50%	75%	100%
memastikan profesionalitas SDM OPD dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Evalusasi SDM OPD pada Penjaminan Kualitas Data	Evalusi SDM dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)	20%	40%	60%	80%	100%
				bimbingan teknik profesionalitas SDM OPD	meningkatkan kemampuan memberikan informasi kualitas	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam penjaminan kulatias		25%	50%	75%	100%

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
				pada Penjaminan Kualitas Data	data kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal.	data (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)					
memastikan profesionalitas SDM OPD dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Evalusasi SDM OPD pada Konfidensialitas Data	Evalusi SDM dalam melaksanakan 1) regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data, 2) perlindungan kerahasiaan data, 3) memastikan keamanan data 4) audit sistem keamanan data	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)	20%	40%	60%	80%	100%
				bimbingan teknik profesionalitas SDM OPD pada Konfidensialitas Data	meningkatkan kemampuan menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Jumlah SDM yang Meningkatkemampuan menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)		25%	50%	75%	100%

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
memastikan profesionalitas SDM OPD Bidang Statistik	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Evalusasi SDM Bidang Statistik OPD	Evalusi SDM dalam rangka peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM Statistik	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)	20%	40%	60%	80%	100%
				bimbingan teknik profesionalitas SDM Bidang Statistik OPD	meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Statistik pada proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia statistik (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)		25%	50%	75%	100%
memastikan profesionalitas SDM OPD bidang manajemen data	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Evalusasi SDM Bidang Manajemen Data OPD	Evalusi SDM dalam rangka Peningkatan Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan.	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)	20%	40%	60%	80%	100%

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
				bimbingan teknik profesionalitas SDM Bidang Manajemen Statistik OPD	meningkatkan kemampuan mengumpulkan, menyimpan dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya dan juga lebih efisien proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat kemampuan mengumpulkan, menyimpan dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya dan juga lebih efisien. (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)		25%	50%	75%	100%
memastikan tahap penyelenggaraan kegiatan statistik terkolaborasi dengan baik	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Evalusasi SDM yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan statistik terkolaborasi dengan baik	Evalusi SDM dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistik tidak tumang tindih antar OPD dan daerah dengan pusat (antar kewenangan)	Jumlah SDM yang dievaluasi terhadap SDM yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan statistik dalam tim formal		100%			
				bimbingan teknis SDM dalam kolaborasi penyelenggaraan statistik	meningkatkan kemampuan SDM dalam kolaborasi penyelenggaraan statistik	Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis BPS terhadap SDM yang dievaluasi			100%		
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kapasitas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat	Komunikasi dan koordinasi Kominfo Kota	komunikasi dan koordinsi dalam pelaksanaan	komunikasi dan koordinasi Personal	100%				

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
dengan pembina data untuk penyelenggaraan Forum Satu Datai Kota Tangerang	Statistik Sektoral	Kelembagaan Statistik Sektoral	Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Tangerang dengan BPS dalam mereview dan evaluasi penyelenggaraan forum satu data dalam pelaksanaan Rencana Aksi SDI	review dan evaluasi: 1) implementasi Standar penyelenggaraan dan penguatan Prinsip SDI, 2) penguatan kolaborasi, 3) pengembangan infrastruktur dan platform data, serta fasilitas analitika data,4) penguatan SDM, 5) percepatan SDI, 6) pemanfaatan data mendukung agenda pembangunan nasional	Incharge Kominfo dengan BPS					
meningkatkan kolaborasi terkait dengan pembangunan/pengembangan data dengan BPS	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	review dan evaluasi kolaborasi dengan BPS	hasil review dan evaluasi dilakukan Bimbingan teknis dengan BPS untuk peningkatan kualitas	Bimbingan teknis dengan BPS kebutuhan peningkatan hasil review dan evaluasi	100%				
meningkatkan tugas Kominfo	Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat	review dan evaluasi	hasil review dan evaluasi	Bimbingan teknis dengan BPS	100%				

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
sebagai walidata	Kelembagaan Statistik Sektoral	Kelembagaan Statistik Sektoral	Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	pelaksanaan tugas kominfo Kota Tangerang	dilakukan Bimbingan teknis dengan BPS untuk peningkatan kualitas	kebutuhan peningkatan hasil review dan evaluasi					
Meningkatkan kualitas penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Unit yang menerapkan Infrastruktur Statistik yang mutakhir dan berkualitas	review dan evaluasi OPD Data Statistik Dasar pada OPD untuk pemanfaatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	review dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Data Statistik Dasar untuk pemanfaatan penggunaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Jumlah OPD yang di review dan evaluasi terhadap keselurahan OPD	25%	50%	75%	100%	
Memastikan penggunaan data statistik sektoral memenuhi kebutuhan OPD menyelenggarakan tugas pokok OPD	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Unit yang menerapkan Infrastruktur Statistik yang mutakhir dan berkualitas	review dan evaluasi OPD dalam pemanfatan data statistik sektoral untuk kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok OPD	hasil review dan evaluasi dilakukan untuk peningkatan kualitas data sektoral pemanfaatan tugas pokok OPD	Jumlah OPD yang di review dan evaluasi terhadap keselurahan OPD	20%	40%	60%	80%	100%
meningkatkan sosialisasi dan	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Unit yang menerapkan Infrastruktur Statistik	penyusunan panduan prosedur baku	panduan prosedur untuk peningkatan kualitas sosialisasi	Jumlah OPD yang menerapkan prosedur baku		40%	60%	80%	100%

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
literasi data statistik OPD			yang mutakhir dan berkualitas	dalam melaksanakan sosialisasi dan literasi data statistik	dan pemahaman publikasi statistik data sektoral digunakan dengan benar	terhadap keselurahan OPD					
meningkatkan pelaksanaan hasil rekomendasi BPS terhadap kegiatan survei statistik	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Unit yang menerapkan Infrastruktur Statistik yang mutakhir dan berkualitas	Kajian inventarisasi pelaksanaan survei statistik berkesesuaian dengan rekomendasi BPS	menginventarisir dan mengkaji kualitas kesesuaian rekomendasi BPS pada pelaksanaan survei statistik untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik	Jumlah survei statistik OPD yang dikasji terhadap keselurahan survei statistik OPD	100%				
				Penyusunan dan penerapan prosedur baku pemberitahuan rancangan kegiatan survei statistik	prosedur baku disusun agar pemberitahuan rancangan kegiatan survei statistik dapat secara baku diterapkan setiap OPD	Jumlah Pelaporan dengan prosedur baku survei statistik OPD yang diterapkan terhadap keselurahan survei statistik OPD		100%			
melaksanakan Perencanaan Pembangunan Statistik yang menerapkan SDI	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Unit yang menerapkan Infrastruktur Statistik yang mutakhir dan berkualitas	Penyusunan perencanaan pembangunan statistik Kota Tangerang	merencanakan arsitektur Pengembangan Infrastruktur dalam Penguatan	Jumlah perencanaan Infrastruktur Statistik mendukung Penguatan SSN Berkelanjutan	100%				

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
					SSN Berkelanjutan						
meningkatkan penyebarluasan data melalui portal tangerang satu	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	review dan evaluasi peran otorisasi Kominfo pada himpunan data statistik sektoral	review dan evaluasi fungsi Kominfo dan perbaikan hasil review dan evaluasi sebagai otorisasi penyebarluasan data kota tangerang melaui pusat rujukan informasi statistik, Portal satu data, jaringan informsi geospasial dan sistem Big Data	jumlah himpunan data statistik yang direview dan di evaluasi terhadap Jumlah data statistik yang dihimpun	50%	50%			
melaksanakan pemanfaatan big data dengan optimum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Penyusunan regulasi kebijakan pemanfaatan bigdata	naskah akademik kebijakan kota Tangerang terkait pemanfaatan bigdata untuk mendukung data statistik yang dihasilkan	Jumlah Dokumen	1				
				Penyusunan prosedur standar	Petunjuk teknis dan SOP pemanfaatan bigdata sebagai	Jumlah Dokumen		1			

Arah Kebijakan	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	keterangan Pekerjaan			Target Tahapan				
				Uraian	Ruang Lingkup	Output	2024	2025	2026	2027	2028
				pemanfaatan big data	data statistik pendukung						
				pembentukan kelembagaan pengelola pemanfaatan dan pengembangan bigdata	Penyusunan SK tim pemanfaatan dan pengembangan bigdata	Jumlah Dokumen		1			
				Penyusunan arsitektur pemanfaatan bigdata Kota Tangerang	membangun arsitektur infrastruktur pemanfaatan bigdata	Jumlah Dokumen		1			
				review dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bigdata	review dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bigdata hingga tersedia untuk publik beserta perbaikan hasil review dan evaluasi	Jumlah Dokumen			1	1	1

BAB. 6 PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

.Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang merupakan perencnaan pada pembangunan Statistik sektoral Kota Tangerang untuk mencapai target pencapaian optimum dari Aspek Aspek pada Domain penilaian evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tangerang.

Perencanaan ini dibuat dengan menggunakan kerangka kerja logis untuk dengan pemanfaatan analisis logis vertikal dan analisis logis horizo.ntal.

Permasalahan dan Tantangan merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan terhadap arah pembangunan statistik yang akan ditentukan, maka perumusan masalah dengan melihat tingkat kematangan Domain, Aspek dan Indikator dari capaian indeks pembangunan statistik, Indeks Domain dan Indeks Aspek dari nilai evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Tangerang.

Visi Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang mengacu pada Visi Renstra BPS 2020-2024, Visi Provinsi Banten 2045 pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045 pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjan Nasional 2025-2045 dan Visi Kota Tangerang masih berdasarkan Rancangan Teknokratif RPJPD 2025-2045 visi Kota Tangerang adalah Penyelenggaraan Statistik Sektoral Berkualitas Untuk Kota Tangerang Maju dan Berkelanjutan

BAB 6. Penutup

Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan serangkaian kerangka kerja logis yang pada akhirnya untuk mendapatkan Roadmap Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang digunakan strategi dan arah kebijakan

Kaitan Domain, aspek dan Indikator Aspek dengan Arah Kebijakan antara lain:

Tabel 6-1 Hubungan Domain, Aspek dan Indikator Dengan Arah Kebijakan

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Arah Kebijakan
1	Prinsip SDI	101	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	Data Statistik yang dihasilkan merujuk pada satu standar data pada regulasi standar data statistik nasional (SDSN)
		102	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	Metadata dengan informasi metadata mengikuti struktur dan format baku BPS
		103	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	Setiap Data yang dihasilkan mampu dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi
		104	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	kode referensi/data induk dilakukan dengan bridging/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dan kode wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang dapat diakses
2	Kualitas Data	201	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	Identifikasi relevansi data terhadap pengguna
				Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	identifikasi dan analisa kebutuhan pengguna
		202	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	menyediakan mekanisme/sistem untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data dan output statistik
		203	Aktualitas dan Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	pembuatan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh OPD
				Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	pemantauan ketepatan waktu (kesesuaian jadwal rilis dan waktu rilis

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Arah Kebijakan
		204	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Publikasi data statistik, digunakan, dan disebarluaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku
				Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	Penyebarluasan statistik dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk semua pengguna
				Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	mereview dan evaluasi efektifitas dan ketepatan penyediaan format data yang memberikan kemudahan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik
		205	Keterbandingan dan Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	penerapan keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah
				Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	setiap data yang dihasilkan harus selaras dengan data-data sumber lain.
3	Proses Bisnis Statistik	301	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	meningkatkan proses menentukan kebutuhan data berdasar tujuan yang ingin dicapai
				Tingkat Kematangan Desain Statistik	memastikan proses pembuatan rancangan kegiatan statistik dengan tepat
				Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	memastikan pembangunan dan pengujian isntrumen yang dirancang dibangun sudah cukup baik digunakan
		302	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data	menentukan prosedur baku Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data ditetapkan dan berlaku seluruh OPD dalam rangka peningkatan kualitas data
		303	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	memastikan proses pengolahan data yang sudah dikumpulkan menghasilkan data yang dibutuhkan
				Tingkat Kematangan Analisis Data	memastikan proses tahapan kegiatan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik seluruh OPD

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Arah Kebijakan
		304	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	memastikan proses penyebaran informasi termanfaatkan dengan baik
4	Kelembagaan	401	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	memastikan profesionalitas SDM OPD pada penjaminan transparasi informasi statistik
				Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	memastikan profesionalitas SDM OPD dalam penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi
				Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	memastikan profesionalitas SDM OPD dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
				Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	memastikan profesionalitas SDM OPD dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
		402	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	memastikan profesionalitas SDM OPD Bidang Statistik
				Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	memastikan profesionalitas SDM OPD bidang manajemen data
		403	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	memastikan tahap penyelenggaraan kegiatan statistik terkolaborasi dengan baik
				Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pembina data untuk penyelenggaraan Forum Satu Datai Kota Tangerang
				Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	meningkatkan kolaborasi terkait dengan pembangunan/pengembangan data dengan BPS
				Tingkat Kematangan Penyelenggaraan	meningkatkan tugas Kominfo sebagai walidata

Domain		Aspek		Indikator Aspek	Arah Kebijakan
				Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data	
5	Statistik Nasional	501	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	Meningkatkan kualitas penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan
				Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	Memastikan penggunaan data statistik sektoral memenuhi kebutuhan OPD menyelenggarakan tugas pokok OPD
				Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	meningkatkan sosialisasi dan literasi data statistik OPD
		502	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	meningkatkan pelaksanaan hasil rekomendasi BPS terhadap kegiatan survei statistik
		503	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	melaksanakan Perencanaan Pembangunan Statistik yang menerapkan SDI
				Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	meningkatkan penyebarluasan data melalui portal tangerang satu
				Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data	melaksanakan pemanfaatan big data dengan optimum

Sedangkan Arah Kebijakan diimplementasikan dalam roadmap menjadi pekerjaan dengan ruang lingkup dan Output sebagai berikut:

Tabel 6-2 Arah Kebijakan dan Pekerjaan yang Direncanakan

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
Data Statistik yang dihasilkan merujuk pada satu standar data pada regulasi standar data statistik nasional (SDSN)	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Standar Data Statistik	Mereview dan mengevaluasi dari Data Statistik yang dihasilkan sudah merujuk dan berkesesuaian SDSN beserta rekomendasi perbaikan dari 1) konsep, 2) definisi, 3) klasifikasi, ukuran dan 4) satuan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi
Metadata dengan informasi metadata mengikuti struktur dan format baku BPS	Penyusunan dokumen review dan evaluasi Metadata Statistik Sektoral pada tiap OPD	Mereview dan mengevaluasi Metadata Statistik Sektoral pada tiap OPD terhadap capaian Informasi dalam metadata dengan mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan BPS	Jumlah Dokumen review dan evaluasi Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (100% Metadata OPD terhimpun)
Setiap Data yang dihasilkan mampu dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi	Penyusunan dokumen review dan evaluasi Standarisasi Metadata untuk berbagi pakai	Mereview dan mengevaluasi Standarisasi Metadata untuk berbagi pakai dengan melihat 1) Standarisasi Metadata mengikuti kaidah interoperabilitas data, 2) setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, 3) konsisten dalam struktur/ skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan	Jumlah Dokumen review dan evaluasi Metadata Statistik Sektoral yang dapat berbagi pakai (100% Metadata OPD)
kode referensi/data induk dilakukan dengan bridging/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dan kode wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang dapat diakses	Penyusunan dokumen review dan evaluasi Kode Referensi Metadata Statistik Sektoral Pada OPD	Review dan Evaluasi berdasarkan: 1) referensi didasarkan kesepakatan forum satu data Indonesia 2021 dan forum SDI tematik 2021, 2) dilakukan bridging/relasi antar kode wilayah kerja statistik	Jumlah Dokumen review dan evaluasi Sektoral yang menggunakan kode referensi (100% penerapan kode referensi OPD berelasi antar kode wilayah kerja statistik)

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
Identifikasi relevansi data terhadap pengguna	Penyusunan dokumen review dan evaluasi Identifikasi relevansi data statistik	Mereview dan mengevaluasi Identifikasi relevansi data statistik melalui 1) Identifikasi kebutuhan pengguna, 2) analisis kebutuhan pengguna statistik, FGD dengan pengguna data, rekomendasi penentuan prioritas kebutuhan	Jumlah Dokumen review dan evaluasi Sektoral yang menggunakan kode referensi (100% penerapan kode referensi OPD berelasi antar kode wilayah kerja statistik)
	melakukan monitoring dan evaluasi relevansi data OPD	monitoring dan evaluasi mengenai relevansi kebutuhan pengguna dan melakukan tindak lanjut perbaikan	Jumlah dokumen yang dibuat (persentase dokumen terhadap OPD)
identifikasi dan analisa kebutuhan pengguna	Penyusunan Identifikasi dan analisis data statistik kebutuhan pengguna	Penyusunan Identifikasi dan analisis data statistik kebutuhan pengguna dengan ruang lingkup: 1) Tinjauan Teori dan Kebijakan, 2) Identifikasi Kebutuhan Data untuk pengguna data, 3) Analisis Kebutuhan Pengguna 4) melakukan proses konsutasi terstruktur dengan stakeholder dan pengguna data, 5) Rekomendasi peningkatan kematantagan penilaian akurasi data	Jumlah dokumen yang dibuat (persentase dokumen terhadap OPD)
menyediakan mekanisme/sistem untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data dan output statistik	Penyusunan SOP dan panduan akurasi data	SOP menilai dan validasi sumber data, itegrasi data dan output statistik	jumlah dokumen yang dibuat
	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan akurasi data	inventarisasi permasalahan, dan kesalahan data pada OPD	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi
	Penyusunan Revisi SOP dan panduan akurasi data	SOP menilai dan validasi sumber data, itegrasi data dan output statistik jika ditemukan permasalahan dan kesalahan	jumlah dokumen yang dibuat

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
		pada review dan evaluasi penerapan akurasi data	
pembuatan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh OPD	Penyusunan Prosedur baku aktualitas dan ketepatan waktu data dan informasi dirilis	prosedur penyedia data terkait waktu, format dan alur pengiriman data, perhitungan akhir periode data sampai data dirilis	jumlah dokumen yang dibuat
	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	diperolehnya permasalahan penerapan pada OPD	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi
	Penyusunan Revisi Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	jumlah dokumen yang dibuat
pemantauan ketepatan waktu (kesesuaian jadwal rilis dan waktu rilis	Penyusunan Prosedur Baku SDM tiap OPD dalam Pemantauan ketepatan waktu diseminasi	Prosedur Baku SDM tiap OPD dalam Pemantauan ketepatan waktu diseminasi memiliki kalender liris untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis. Informasi ketepatan waktu rilis tersedia untuk pengguna	jumlah dokumen yang dibuat
	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Prosedur pemantauan ketepatan waktu Diseminasi	Identifikasi permasalahan penerapan pada OPD dan Rekomendasi perbaikan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi
	Penyusunan Revisi penerapan Prosedur pemantauan ketepatan waktu Diseminasi	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	jumlah dokumen yang dibuat
Publikasi data statistik, digunakan, dan disebarluaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Penyusunan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	Ruang Lingkup Penyusunan Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data:	jumlah dokumen yang dibuat

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
		6) publikasi statistik, penggunaan dan penyebarluasan sesuai dengan regulasi yang berlaku, 7) penyajian data disertai dengan metadata dan penjelasan teknis, 8) memudahkan interpretasi data statistik	
	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Identifikasi permasalahan penerapan pada OPD dan Rekomendasi perbaikan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi
	Penyusunan Revisi Prosedur ketersediaan data untuk pengguna data	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan ketersediaan data untuk pengguna data	jumlah dokumen yang dibuat
Penyebarluasan statistik dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk semua pengguna	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi pelaksanaan akses media penyebarluasan data	revie dan evaluasi antara lain: 1) katalog publikasi dan layanan lain yang tersedia, 2) cara penyebarluasan statistik, 3) Penerapan regulasi terkait. 4) efektifitas unit pelayanan yang memberi bantuan pengguna dalam mengakses dan menginterpetasi data	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi
mereview dan evaluasi efektifitas dan ketepatan penyediaan format data yang memberikan kemudahan pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penjaminan penyediaan format data	reviiw dan evaluasi dari 1) efektifitas tata letak dan kejelsan teks, tabel dan grafik. 2) efektifitas format yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi
penerapan keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan keterbandingan data	diperolehnya permasalahan definisi, klasifikasi dan metodologi yang menjadikan data sulit untuk dibandingkan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
	Penyusunan Revisi Prosedur baku keterbandingan data	perbaikan definisi, klasifikasi dan metodologi agar dapat dibandingkan	jumlah dokumen yang dibuat
setiap data yang dihasilkan harus selaras dengan data-data sumber lain.	Penyusunan kajian SOP dan panduan penerapan konsistensi statistik Kota Tangerang	Penyusunan kajian SOP dan panduan penerapan konsistensi statistik Kota Tangerang dengan ruang lingkup: 1) penerapan standar statistik. 2) menyelasaran data-dari dari sumber lain. 3) tersusunnya prosedur yang memastikan data statistik dihasilkan konsisten	jumlah dokumen yang dibuat
meningkatkan proses menentukan kebutuhan data berdasar tujuan yang ingin dicapai	Penyusunan dokumen revie dan evaluasi pendifinisian kebutuhan statistik	mereview dan evaluasi fase pendifinisian kebutuhan statistik: 1) idintifikasi kebutuhan. 2) konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, 3) menentukan tujuan, 4) identifikasi konsep dan definisi, 5) pembuatan proposal kegiatan	Jumlah dokumen analisis
memastikan proses pembuatan rancangan kegiatan statistik dengan tepat	Penyusunan dokumen revie dan evaluasi proses rancangan kegiatan statistik	mereviewdan evaluasi proses rancangan kegiatan statistik: 1) rancangan output. 2) rancangan deskripsi variabel, 3) rancangan pengumpulan data, 4) rancangan kerangka sampel dan pengambilan sampel, 5) rancangan pengolahan dan analisis, 6) rancangan sistem dan alur kerja	Jumlah dokumen analisis
memastikan pembangunan dan pengujian isntrumen yang dirancang dibangun sudah cukup baik digunakan	Penyusunan dokumen revie dan evaluasi penyiapan instrumen	mereviewdan evaluasi penyiapan instrumen: 1) pengumpulan data.	Jumlah dokumen analisis

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
		2) komponen pengolahan dan analisis data, 3) komponen diseminasi data, 4) ralur kerja sesuai rancangan, 5) uji sistem dan instrumen, 6) uji proses bisnis statistik, 7) finalisasi sistem	
menentukan prosedur baku Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data ditetapkan dan berlaku seluruh OPD dalam rangka peningkatan kualitas data	Penyusunan prosedur baku Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data	Penyusunan prosedur baku Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data: 1) penyiapan kerangka sampel dan sampel terpilih, 2) pengumpulan data	Jumlah dokumen analisis/kajian
	Pelatihan Peningkatan SDM OPD dalam pengumpulan data/akuisisi data	Pelatihan penyiapan pengumpulan data hingga finalisasi pengumpulan data	Jumlah SDM yang Meningkat kemapuannya dalam proses pengumpulan data/Akuisisi data (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)
memastikan proses pengolahan data yang sudah dikumpulkan menghasilkan data yang dibutuhkan	Penyusunan SOP dan panduan Pengolahan Data	menyusun SOP dan Panduan Pengolahan Data terkait antara lain: 1) integrasi data 2) klasifikasi dan pemberian kode, 3) review dan validasi data, 4) penyuntingan dan imputasi, 5) perhitungan variabel turunan 6) menghitung penimbang, 7) data agregat, 8) finalisasi data	Jumlah dokumen yang dibuat
	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapan Pengolahan Data	Identifikasi permasalahan penerapan pengolahan data pada OPD dan Rekomendasi perbaikan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
	Penyusunan Revisi penerapan Prosedur pengolahan data	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan Prosedur pengolahan data	jumlah dokumen yang dibuat
memastikan proses tahapan kegiatan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik seluruh OPD	Penyusunan SOP dan panduan Analisis Data	Menyusun SOP dan Panduan pelaksanaan analisis data antara lain:: 1) tabulasi, 2) konsistensi antar tabel, 3) iterpretasi output, 4) penerapan Discolusre control, 5) Finalisasi	Jumlah dokumen yang dibuat
	Penyusunan Dokumen review dan Evaluasi penerapanAnalisis Data	Identifikasi permasalahan penerapan Analisis Data pada OPD dan Rekomendasi perbaikan	Jumlah Dokumen review dan Evaluasi
	Penyusunan Revisi penerapan Prosedur Analisis Data	perbaikan prosedur pada permasalahan dan kesalahan pada review dan evaluasi penerapan Analisis Data	jumlah dokumen yang dibuat
memastikan proses penyebaran informasi termanfaatkan dengan baik	Penyusunan dokumen revie dan evaluasi Diseminasi data OPD	mereview dan evaluasi diseminasi data OPD : 1) sinkronisasi data dengan metadata, 2) produk desiminasi, 3) manajemen rilis produk diseminasi, 4) manajemen user support	Jumlah dokumen yang dibuat (persentase dokumen terhadap OPD)
memastikan profesionalitas SDM OPD pada penjaminan transparasi informasi statistik	Evalusasi SDM OPD pada transaransi informasi statistik	Evalusi SDM dalam melaksanakan 1) prosedur memastikan kerahasiaan data 2) menyediakan informasi yang berkaitan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik terbuka untuk publik, 3) informasi kebijakan diseminasi ke publik,	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
		4) melaksanakan program kerja dan laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progres kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik	
	bimbingan teknik profesionalitas SDM OPD pada transparansi informasi statistik	meningkatkan kemampuan menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Transparansi Informasi Statistik (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)
memastikan profesionalitas SDM OPD dalam penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi	Evalusasi SDM OPD pada Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	Evalusi SDM dalam melaksanakan 1) Output statistik yang dihasilkan, 2) sumber, konsep definisi, metodologi dan proses menghasilkan diseminasi	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)
	bimbingan teknik profesionalitas SDM OPD pada Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	meningkatkan kemampuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)
memastikan profesionalitas SDM OPD dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal.	Evalusasi SDM OPD pada Penjaminan Kualitas Data	Evalusi SDM dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)
	bimbingan teknik profesionalitas SDM OPD pada Penjaminan Kualitas Data	meningkatkan kemampuan memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal.	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam penjaminan kulatias data (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)
memastikan profesionalitas SDM OPD dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak	Evalusasi SDM OPD pada Konfidensialitas Data	Evalusi SDM dalam melaksanakan 1) regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data, 2) perlindungan kerahasiaan data,	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab		3) memastikan keamanan data 4) audit sistem keamanan data	
	bimbingan teknik profesionalitas SDM OPD pada Konfidensialitas Data	meningkatkan kemampuan menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Jumlah SDM yang Meningkatkemampuan menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)
memastikan profesionalitas SDM OPD Bidang Statistik	Evalusasi SDM Bidang Statistik OPD	Evalusi SDM dalam rangka peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM Statistik	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)
	bimbingan teknik profesionalitas SDM Bidang Statistik OPD	meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Statistik pada proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia statistik (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)
memastikan profesionalitas SDM OPD bidang manajemen data	Evalusasi SDM Bidang Manajemen Data OPD	Evalusi SDM dalam rangka Peningkatan Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan.	Jumlah SDM yang dievaluasi (jumlah OPD dengan 100% SDM yang dievaluasi)
	bimbingan teknik profesionalitas SDM Bidang Manajemen Statistik OPD	meningkatkan kemampuan mengumpulkan, menyimpan dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya dan juga lebih efisien proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah SDM yang Meningkat kemampuan mengumpulkan, menyimpan dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya dan juga lebih efisien. (jumlah OPD dengan 100% SDM Kapasitas Meningkat)
memastikan tahap penyelenggaraan kegiatan statistik terkolaborasi dengan baik	Evalusasi SDM yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan statistik terkolaborasi dengan baik	Evalusi SDM dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistik tidak tumang tindih antar OPD dan daerah dengan pusat (antar kewenangan)	Jumlah SDM yang dievaluasi terhadap SDM yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan statistik dalam tim formal
	bimbingan teknis SDM dalam kolaborasi penyelenggaraan statistik	meningkatkan kemampuan SDM dalam kolaborasi penyelenggaraan statistik	Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis BPS terhadap SDM yang dievaluasi

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pembina data untuk penyelenggaraan Forum Satu Datai Kota Tangerang	Komunikasi dan koordinasi Kominfo Kota Tangerang dengan BPS dalam mereview dan evaluasi penyelenggaraan forum satu data dalam pelaksanaan Rencana Aksi SDI	komunikasi dan koordinsi dalam pelaksanaan review dan evaluasi: 1) implementasi Standar penyelenggaraan dan penguatan Prinsip SDI, 2) penguatan kolaborasi, 3) pengembangan infrastruktur dan platform data, serta fasilitas analitika data, 4) penguatan SDM, 5) percepatan SDI, 6) pemanfaatan data mendukung agenda pembangunan nasional	komunikasi dan koordinasi Personal Incharge Kominfo dengan BPS
meningkatkan kolaborasi terkait dengan pembangunan/pengembangan data dengan BPS	review dan evaluasi kolaborasi dengan BPS	hasil review dan evaluasi dilakukan Bimbingan teknis dengan BPS untuk peningkatan kualitas	Bimbingan teknis dengan BPS kebutuhan peningkatan hasil review dan evaluasi
meningkatkan tugas Kominfo sebagai walidata	review dan evaluasi pelaksanaan tugas kominfo Kota Tangerang	hasil review dan evaluasi dilakukan Bimbingan teknis dengan BPS untuk peningkatan kualitas	Bimbingan teknis dengan BPS kebutuhan peningkatan hasil review dan evaluasi
Meningkatkan kualitas penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	review dan evaluasi OPD Data Statistik Dasar pada OPD untuk pemanfaatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	review dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Data Statistik Dasar untuk pemanfaatan penggunaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Jumlah OPD yang di review dan evaluasi terhadap keselurahan OPD
Memastikan penggunaan data statistik sektoral memenuhi kebutuhan OPD menyelenggarakan tugas pokok OPD	review dan evaluasi OPD dalam pemanfatan data statistik sektoral untuk kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok OPD	hasil review dan evaluasi dilakukan untuk peningkatan kualitas data sektoral pemanfaatan tugas pokok OPD	Jumlah OPD yang di review dan evaluasi terhadap keselurahan OPD

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
meningkatkan sosialisasi dan literasi data statistik OPD	penyusunan panduan prosedur baku dalam melaksanakan sosialisasi dan literasi data statistik	panduan prosedur untuk peningkatan kualitas sosialisasi dan pemahaman publikasi statistik data sektoral digunakan dengan benar	Jumlah OPD yang menerapkan prosedur baku terhadap keselurahan OPD
meningkatkan pelaksanaan hasil rekomendasi BPS terhadap kegiatan survei statistik	Kajian inventarisasi pelaksanaan survei statistik berkesesuaian dengan rekomendasi BPS	menginventarisir dan mengkaji kualitas kesesuaian rekomendasi BPS pada pelaksanaan survei statistik untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik	Jumlah survei statistik OPD yang dikasji terhadap keselurahan survei statistik OPD
	Penyusunan dan penerapan prosedur baku pemberitahuan rancangan kegiatan survei statistik	prosedur baku disusun agar pemberitahuan rancangan kegiatan survei statistik dapat secara baku diterapkan setiap OPD	Jumlah Pelaporan dengan prosedur baku survei statistik OPD yang diterapkan terhadap keselurahan survei statistik OPD
melaksanakan Perencanaan Pembangunan Statistik yang menerapkan SDI	Penyusunan perencanaan pembangunan statistik Kota Tangerang	merencanakan arsitektur Pengembangan Infrastruktur dalam Penguatan SSN Berkelanjutan	Jumlah perencanaan Infrastruktur Statistik mendukung Penguatan SSN Berkelanjutan
meningkatkan penyebarluasan data melalui portal tangerang satu	review dan evaluasi peran otorisasi Kominfo pada himpunan data statistik sektoral	review dan evaluasi fungsi Kominfo dan perbaikan hasil review dan evaluasi sebagai otorisasi penyebarluasan data kota tangerang melaui pusat rujukan informasi statistik, Portal satu data, jaringan informsi geospasial dan sistem Big Data	jumlah himpunan data statistik yang direview dan di evaluasi terhadap Jumlah data statistik yang dihimpun
melaksanakan pemanfaatan big data dengan optimum	Penyusunan regulasi kebijakan pemanfaatan bigdata	naskah akademik kebijakan kota Tangerang terkait pemanfaatan bigdata untuk mendukung data statistik yang dihasilkan	Jumlah Dokumen
	Penyusunan prosedur standar pemanfaatan big data	Petunjuk teknis dan SOP pemanfaatan bigdata sebagai data statistik pendukung	Jumlah Dokumen
	pembentukan kelembagaan pengelola pemanfaatan dan pengembangan bigdata	Penyusunan SK tim pemanfaatan dan pengembangan bigdata	Jumlah Dokumen

Arah Kebijakan	keterangan Pekerjaan		
	Uraian	Ruang Lingkup	Output
	Penyusunan arsitektur pemanfaatan bigdata Kota Tangerang	membangun arsitektur infrastruktur pemanfaatan bigdata	Jumlah Dokumen
	review dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bigdata	review dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan bigdata hingga tersedia untuk publik beserta perbaikan hasil review dan evaluasi	Jumlah Dokumen

6.2 REKOMENDASI

Diharapkan Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan Roadmap Rencana Pembangunan Statistik Sektoral Kota Tangerang dengan Rencana Strategis Dinas komunikasi dan Informatika.